

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO *n*ext

Edisi 36
Desember 2021



RETROSPERSEKSI 2021

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat

Penghujujng Tahun Transformasi Digital

Salam jumpa kembali kepada para pembaca KominfoNext. Setelah hampir satu tahun disibukkan dengan aktivitas yang mengurus tenaga dan pikiran, tibalah kita di penghujung tahun 2021. Di akhir tahun ini, Majalah KominfoNext kembali menyapa para pembaca dengan sajian informasi menarik tentang rangkuman perjalanan dan capaian Kementerian Kominfo di bidang transformasi digital selama tahun 2021. Beragam sajian informasi terkait perkembangan transformasi digital pada edisi ini merupakan bagian dari hasil karya Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2021.

Di tengah Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menghantui masyarakat dunia dan juga Indonesia, Kementerian Kominfo terus memperjuangkan akselerasi transformasi digital agar bisa mewujudkan Indonesia Terkoneksi sebagaimana telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang menciptakan beragam disrupsi memaksa kita untuk beralih menjadi masyarakat yang cakap digital. Oleh karenanya, amanat Presiden Joko Widodo kini tengah dijalankan Kementerian Kominfo melalui Peta Jalan Transformasi Digital

yang meliputi 4 sektor strategis, yakni infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital.

Keempat sektor strategis tersebut telah mulai diimplementasikan sepanjang tahun 2021 seperti pembangunan BTS, internet *broadband*, *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, migrasi televisi analog ke digital, hingga pembangunan Pusat Data Nasional. Selain itu ada juga Program Literasi Digital dan Government Transformation Academy (GTA) untuk membangun kecakapan digital masyarakat Indonesia. Beragam program tersebut merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk menciptakan kedaulatan Indonesia di bidang teknologi digital.

Semua program yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Kominfo tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi multi pihak dan terutama masyarakat. Oleh karena itu, sajian informasi majalah KominfoNext edisi ini hadir sekaligus mengajak para pembaca untuk ikut ambil bagian dan berkolaborasi dalam menyukseskan program Kementerian Kominfo di masa yang akan datang. Sebab kolaborasi dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang paling penting dalam menyukseskan transformasi digital di tanah air.

Akhirnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk Umat Kristiani dan Selamat menyambut Tahun Baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang akan datang kita semakin solid membangun kolaborasi demi mendukung akselerasi transformasi digital di tanah air. Sehingga cita-cita menuju Indonesia sebagai digital nation baik di Asia maupun di dunia bisa terwujud. Salam transformasi digital "Menuju Indonesia Terkoneksi, Makin Digital Makin Maju."

Rhina Anita

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat
- **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**



Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

6 Rak Buku

16 Kabar Istana

28 Liputan Khusus

48 Kaleidoskop
kominfo 2021

60 Gagasan

74 Kata Civitas

82 Liputan
Khusus

90 Jurnal Foto

98 KomEvent

108 Kominfo
Daerah

116 Kabar
Covid-19

124 Foto Esai

130 Lintas
Kominfo

136 Top-10 Hoaks

140 KomikAsik



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30

Rak Buku



Penulis :
Adies Kadir

Menjaga Moral Pejabat Publik

Baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh moral pejabat publiknya. Oleh karena itu, ikhtiar menjaga moral pejabat negara adalah sebagai bentuk kecintaan kepada negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Bangsa Indonesia harus dipimpin oleh pejabat-pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral, agar cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dapat tercapai.

Rak Buku



Penulis :
Rita Gani
Ratri Rizki Kusumalestari
Nunik Siti Nurbaya

Jurnalistik Foto Suatu Pengantar

Setiap foto harus mampu memukau indra dan perhatian orang seketika itu. Bagaimana pun tampilannya, ketika dipamerkan di ruang publik, sebuah foto mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dapat menggetarkan perasaan dan menggugah pikiran orang yang melihat dan membacanya. "Tanpa gambar, aksara tak bermakna", begitulah kata pepatah lama. Fotografi adalah seni melihat yang dapat memberikan banyak kisah atas berbagai momen yang terjadi.



Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :
Agung (0813-8336-4421)

Penulis :
Silih Agung Wasesa
Dyota Laksmi
Aniza Pujiati



Personal Branding Code

Siapa pun kita: pejabat, politikus, bahkan ibu rumah tangga, pasti melakukan *personal branding*. Posting kegiatan harian kita di Instagram atau sekadar tersenyum pada orang yang baru kita kenal sesungguhnya juga merupakan bagian dari *personal branding*.

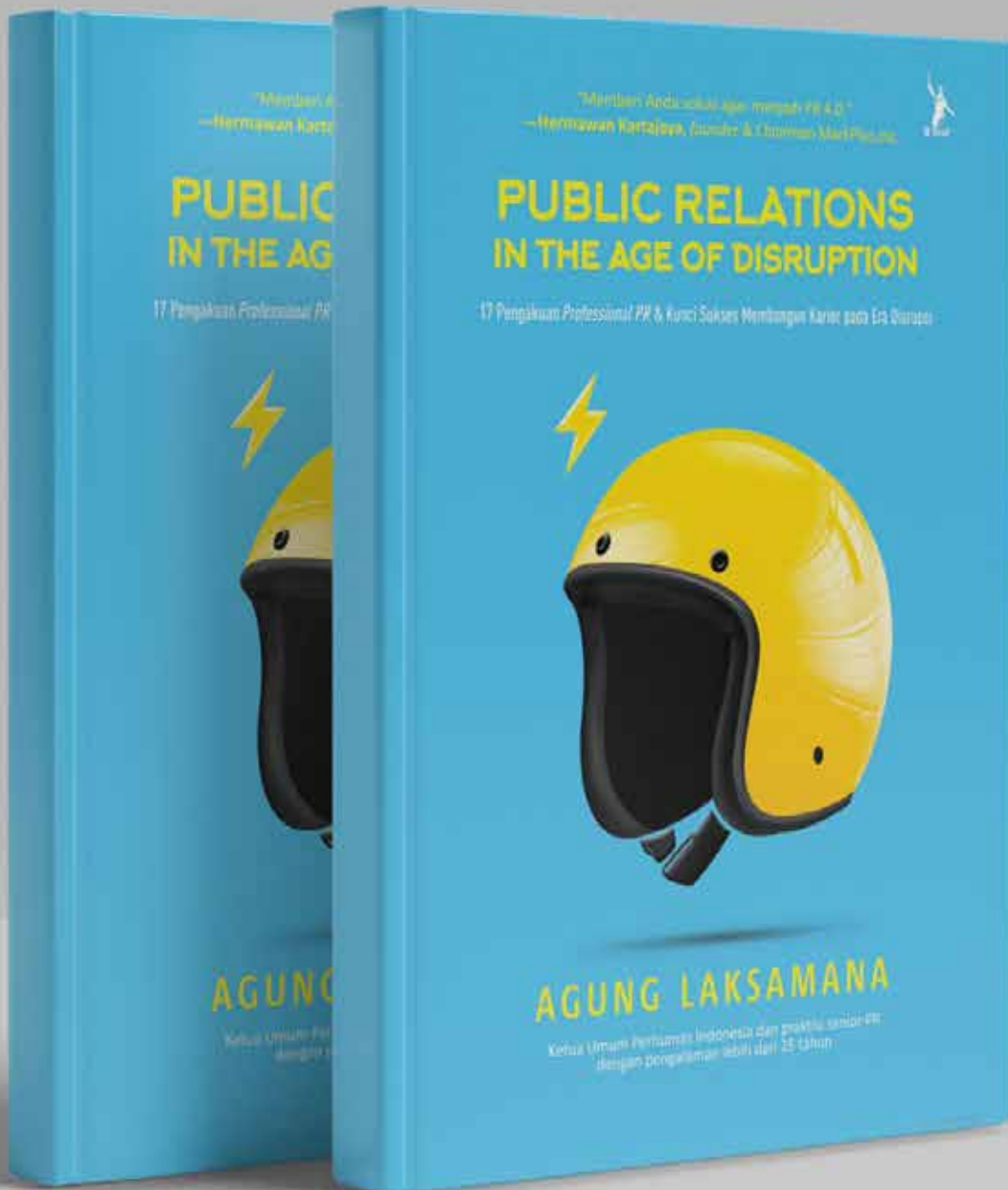
Personal branding adalah upaya membangun reputasi positif dengan menggali potensi diri dan kreativitas. Dengan begitu, ia akan membantu kita menjadi lebih dipercaya dalam membina hubungan dan kerja sama dengan orang lain.

Melalui buku ini, penulis menjabarkan cara *personal branding* dengan formula *Circle-P* (*Circle Personal*) yang disusun berdasarkan pengalaman selama 22 tahun menjadi konsultan *branding* produk ternama dan para tokoh, di antaranya dua mantan Presiden RI dan Ibu Negara.



Public Relations in the Age of Disruption

oleh : Helmi Fajar Andrianto
Redaktur Pelaksana KominfoNext



Era disrupsi adalah sebuah era dimana terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sebuah sistem, tatanan, dan lanskap yang ada ke cara-cara yang baru. Perubahan ini dipengaruhi oleh katalis-katalis eksternal yang masuk ke dalam sistem ataupun bisa juga muncul sebagai hasil pemikiran dari dalam sistem itu sendiri. Kunci dalam menghadapi disrupsi yang mengarah pada dinamika perubahan telah dipaparkan 162 tahun lalu oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul “*On the Origin of Species*”. Dari buku tersebut, Darwin mengambil kesimpulan bahwa ternyata bukan spesies yang paling pintar, bukan juga spesies yang paling kuat yang akan bertahan, tetapi spesies yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini dalam kaitannya dengan peran kita dalam sebuah organisasi. Perubahan dalam suatu organisasi terus terjadi, mulai dari CEO/pimpinan yang datang silih berganti dengan ragam kebijakannya, regulasi yang terus berganti, tuntutan *shareholders* maupun *stakeholders* yang terus berkembang, dan aspek-aspek lainnya. Dibutuhkan respon perubahan yang cepat dan tepat dari suatu organisasi dan seluruh elemen di dalamnya untuk berubah ke arah yang sama.

Di era Covid-19, Profesor Rhenald Kasali bahkan menyebut masa ini sebagai era *double disruption* dengan didasarkan pada guyonan bahwa ternyata yang bisa mendorong transformasi digital dalam suatu organisasi bukanlah para pemimpin organisasi ataupun regulasi, tetapi Covid-19. Sehingga, kemampuan adaptif dan eksploratif semakin penting untuk dimiliki siapapun dan di posisi apapun.

Buku karya Agung Laksamana berjudul “*Public Relations in the Age of Disruption*” menjadi contoh nyata tentang bagaimana suatu bidang pekerjaan harus beradaptasi merespon perubahan

”

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday's logic.

- Peter F. Drucker

yang selalu hadir. Tentunya, sesuai dengan keahlian Agung sebagai seorang praktisi bidang kehumasan, buku ini memberikan pengetahuan bagi para praktisi komunikasi publik/kehumasan tentang bagaimana seorang *Public Relation* (PR) menghadapi perubahan di lingkungannya. Dengan contoh dan pengalaman praktis yang dibagikan penulis dan para kontributor buku ini, menjadikan informasi dalam buku ini aplikatif bagi SobatKom yang bergelut ataupun tertarik dengan dunia kehumasan.

Bab awal buku ini membahas tentang deskripsi PR 65 tahun lalu, dimana PR digambarkan dalam film *The Man in the Gray Flannel Suit* (1956) sebagai seseorang dengan baju yang bersih dan mandi setiap hari. Tentunya, deskripsi ini sudah tidak relevan dengan masa sekarang. Dunia PR sudah

berkembang jauh bukan lagi semata bertugas menangani urusan *media relations* dan protokoler, tetapi sudah merasuk hingga fungsi strategis dan sentral dalam manajemen organisasi. Fungsinya juga semakin meluas, hingga mencakup bidang periklanan dan sosial media. Secara ringkas, Agung mendefinisikan PR sebagai : *PR works to develop relationships for mutual benefits between the organization and its key stakeholders.*

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini yang bertutur dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman menarik dari penulis, membuat kita yang membacanya merasakan hubungan langsung dan terasa *relate* dengan apa yang biasa kita lakukan sebagai PR. Seperti ketika Agung menceritakan pengalamannya ketika akan berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi. Cerita dengan latar di dalam kabin taksi menampilkan dialog Agung bersama seorang sopir taksi yang dihadapkan pada era disrupsi.

Dalam dialog tersebut, Agung menanyakan kepada pengemudi taksi tentang kompetensi di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang memungkinkan sopir taksi berasal dari Malaysia, Laos, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya. Dengan lugas, sopir tersebut menjawab tidak takut, karena dia yakin dengan kemampuan dia dalam menyerap teknologi dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

”

Advertising is saying you're good. PR is getting someone else to say you're good.

- Jean Louis Gasse

Pengalaman serta *lesson learned* dari Agung Laksmiana selalu ditampilkan di buku ini untuk memberikan pengalaman kepada para pembaca, sehingga bisa menyerap makna tersirat secara lebih sederhana.

Hal yang menarik juga diungkap pada awal bab buku ini. Bahwa PR tidak hanya sekedar gelar sarjana komunikasi saja. PR mengkombinasikan filosofi, sosiologi, ekonomi, bahasa, psikologi,

jurnalistik, komunikasi serta pengetahuan lainnya ke dalam sistem yang bisa dipahami oleh manusia. Realitas saat ini, semua orang bisa menjadi humas, mulai dari dokter, pengacara, insinyur, ahli geologi, dan lainnya. Namun tidak berlaku kebalikannya, humas tidak bisa menjadi dokter maupun pengacara. Dengan kata lain, bidang kompetisi PR tidak terbatas hanya pada lulusan sarjana komunikasi saja, tetapi semakin meluas pada lulusan bidang lainnya.

Dicontohkan juga beberapa PR yang dikenal Agung yang notabene tidak berlatar belakang ilmu komunikasi, seperti Irawan D. Kadarman (*Sampoerna Strategic*) yang berlatar belakang *mechanical engineering*, Andrew Saputro (Frisian Flag) yang berlatar belakang teknologi informasi, dan tentu saja ayahnya sendiri yang menginspirasi Agung untuk terjun di dunia kehumasan yang notabene berlatar belakang farmasi.

Namun, tentu saja ada hal lain yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menjadi PR yang sukses, tidak hanya untuk yang berlatar belakang bidang non-komunikasi, tetapi juga bagi yang berlatar belakang komunikasi.



Read, Read, Read – Be Informed

Seorang PR harus banyak membaca? Tentu saja, karena membaca adalah dasar dari semuanya. Seorang PR akan bertemu dengan banyak orang dengan beragam latar belakang, posisi jabatan, hingga budaya. Pengetahuan dan wawasan seorang PR harus luas di berbagai topik. Kunci untuk melakukan itu adalah dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, pengetahuan akan bertambah sehingga pembicaraan dengan klien akan bisa nyambung. Setidaknya lebih unggul dibandingkan dengan PR kompetitor Anda yang mungkin hanya tahu seputar topik kehumasan. Anda akan bisa memiliki *values* lebih di mata klien ada yang akan berujung pada *good relationship* yang akan terbina sebagai modal awal.

Agung menyarankan agar PR berpikir ulang mengenai kebiasaan membaca secara strategis. Caranya, dengan bertanya ke diri sendiri tentang seberapa baik Anda mengetahui tentang bagaimana bisnis proses berjalan di instansi, bagaimana politisi dipilih dan bagaimana mereka berperilaku di kantor, bagaimana orang sukses menangani krisis, pengetahuan apa di kantor kita yang sekiranya perlu kita tahu, serta hal-hal strategis lainnya. Hampir semua senior di bidang PR, mereka membaca buku bagus sebagai nutrisi otak mereka.

Seorang PR harus tahu tentang apa yang sedang terjadi di luar sana, tentang *stakeholders* Anda, tentang tren industri, tentang regulasi, tentang atasan, dan tentang media. Semua hanya bisa didapatkan melalui membaca.

Andre Saputro, *Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia*, membagikan pengalamannya

tentang pentingnya membaca bagi PR. Membaca yang dimaksud di sini bukan membaca postingan di sosial media ataupun puluhan email setiap hari, tetapi lebih ke aktivitas yang bertujuan untuk menyaring, mengerti, memahami, dan mencari dengan cepat relevansi informasi bagi kepentingan unit kerja maupun organisasi. Lebih lanjut, seorang PR harus membiasakan diri melahap koran, majalah, *online media*, *news-ticker* di televisi, brosur, dan juga billboard jalanan. Selain itu, buku atau bahan literasi lainnya juga menjadi santapan wajib. PR dituntut untuk mengetahui semua, dan untuk mencapai hal tersebut, membaca menjadi jalan ninja seorang PR.

Satu pengalaman menarik disampaikan oleh Andre ketika dia dan timnya pernah terhindar dari krisis komunikasi karena membaca. Pada suatu pagi, tim PR membaca tentang isu sensitif yang 'digoreng'. Seketika itu juga, Andre bersama timnya langsung mengubah pesan dan materi presentasi yang akan dipaparkan ke klien pada sore hari. Hasil membaca tersebut telah berjasa menghindarkan Andre dan tim dari krisis yang mungkin terjadi dari hasil presentasinya.

Write, Write, Write - Be a Good Writer

Writing is a skill , not a talent and this difference is important because a skill can be improved by practice

- Robert Stacy McCain

Yang pasti, seorang PR tentu bukan penulis seperti William Shakespeare, J.K. Rowling, atau John Grisham. Perlu diingat bahwa Twitter hanya 140 karakter (per November 2017 sudah menjadi 280 karakter) , video yang sukses hanya berdurasi 15-30 detik, dan kini, pembaca hanya menyimak

headlines dan dua paragraf awal berita. Lantas, mengapa menulis menjadi esensi kemampuan PR? Seorang PR harus bisa melihat *styles* ataupun pola-pola sambutan yang disukai oleh CEO. Sehingga, dalam menulis *speech*, bisa lebih inline dengan ekspektasi CEO.

Seorang PR tidak hanya pandai berkomunikasi secara langsung, tapi juga harus bisa berkomunikasi dengan baik melalui tulisan. Di era digital seperti ini saat ini, untuk mengetahui cara menulis surat, pidato, atau siaran pers yang profesional dan baik, kita bisa mencarinya di internet. Namun sekedar tahu ternyata tidak cukup, seorang PR harus terus melatih kemampuan menulisnya untuk menjelma menjadi seorang penulis yang baik.

Kemampuan teknis yang harus dimiliki PR, dirinci sebagai berikut :

- Penulisan berita, artikel buletin, korespondensi atau surat menyurat
- Laporan, pidato, booklet, naskah iklan radio dan televisi, naskah film atau promosi lainnya, artikel media massa, iklan korporasi, informasi produk/barang/jasa, and material lainnya.

”

Tulisan dari Prof Rhenald Kasali dalam buku Manajemen Kehumasan menjelaskan bahwa kegiatan kehumasan didominasi aktivitas tulis-menulis dibanding kegiatan lainnya. "Sekitar 70% kegiatan humas merupakan aktivitas tulis-menulis, selebihnya merupakan aktivitas lainnya".



Suharjo “Jojo” Nugroho (Managing Director IMOGEN PR) dalam tulisannya di buku ini menyampaikan bahwa dengan platform media yang berbeda, gaya penulisan PR juga harus berubah menyesuaikan dengan karakteristik khalayak di platform tersebut. Tidak sekedar siaran pers yang penuh jargon dan membosankan, tulisan PR saat ini dituntut untuk bisa menarik orang untuk membaca dengan beragam platform. Jadi, pelajari karakter platform media yang akan digunakan. Tantangannya, PR saat ini memiliki ruang yang terbatas (Twitter dengan 280 karakter) serta kompetitor konten yang jauh lebih banyak.

Jojo juga memberikan catatan khusus, agar PR tidak tenggelam dalam rimba kata-kata. Akibatnya, tulisan yang dibuat menjadi tidak jelas arahnya, penuh bahasa tidak efektif dan bertele-tele. Hal ini dapat menyebabkan pesan inti, menjadi kabur dan pembaca tidak mendapatkan esensi pesan dari penulis.

Untuk mengeceknya, kita bisa membaca ulang tulisan kita, jika ternyata tulisan yang kita buat, susah untuk kita cerna sendiri, berarti kita tersesat di rimba kata-kata. Lebih lanjut, terdapat dua hal penting dalam menulis siaran pers:

Pertama, seorang penulis harus memahami persoalan. Anda harus paham tentang ‘barang’ yang akan ditulis. Kalau kita tidak paham, bagaimana kita membuat orang lain paham saat membaca tulisan kita.

Kedua, mengetahui standar penulisan berita. Rumus 5W+1H wajib diterapkan. Panjang tulisan dua ribu karakter itu yang paling ideal, serta lebih menggunakan kalimat aktif dibandingkan pasif.

Sebagai langkah final, kita bisa minta teman untuk membaca artikel yang sudah kita buat, apakah informasinya bisa dicerna atau malah membuat bingung.

PR is Public Relations Power of Relationship

Dunia kehumasan adalah tentang hubungan kita dengan sesama praktisi, key influencer, serta stakeholders. Mulai dari pelanggan, media, jurnalis, klien, atasan, bahkan kompetitor sekalipun. Di era disrupsi, dimana banyak hal saling mendisrupsi, hubungan atau relationship akan selalu menjadi dasar bagi PR. Meski teknologi saat ini sudah memudahkan dalam berinteraksi, namun kita tidak boleh lupa untuk menjalin hubungan secara luring, karena interaksi luring masih jauh lebih efektif. Sehingga, seorang PR harus bisa mengkombinasikan keduanya.

Kemampuan membangun jejaring, merupakan keterampilan yang penting bagi seorang PR. Dengan berjejaring, Anda akan mendapatkan

banyak hal penting, mulai dari informasi, data, cara penyelesaian masalah, hingga peluang karir dan bisnis. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat jejaring adalah *build your network before you need them*. Jangan begitu ada maunya, baru anda mencari orang yang dibutuhkan demi kepentingan sendiri. Anda bisa mulai membuat jaringan dengan obrolan ringan, pertanyaan menarik, dan diskusi yang bermakna. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan riset dan mengetahui ketertarikan lawan bicara Anda.

Dalam kaitannya dengan membuat jejaring, Marianne Admardatine (CEO J. Walter Thompson & Mirum Indonesia) membagikan delapan poin pengalamannya dalam buku ini.

01

First and foremost, you have to like people

Anda harus menyukai dan bergaul dengan orang lain. Tunjukkan aura positif ketika memulai hubungan, karena jika kita tidak menyukai seseorang tersebut, orang itu akan bisa merasakannya dari pertemuan pertama hingga berpisah

02

Be a trusted advisor

Menjadi penasihat terpercaya tidak hanya tentang bertutur, tetapi juga menjadi pendengar yang baik, serta terlibat aktif dalam percakapan tanpa harus buru-buru mengambil kesimpulan.

03

Do not choose your network

Berjejaring tidak harus mengenal CEO atau pemimpin suatu lembaga/instansi, terkadang membuat jejaring dengan middle management bisa merupakan investasi jangka panjang yang tepat. Karena faktanya, seorang CEO lebih sering diganti dibandingkan middle management.

04

Do it outside the meeting room

Tidak ada jejaring yang berhasil jika hanya dilakukan di ruang rapat dengan presentasi resmi. Sambil menikmati teh, kopi, merupakan kesempatan kesempatan terbaik untuk berjejaring.

05

Be a connector

Perkenalkan orang kepada orang. The return of investment always doubles if not more.

06

Invest in time appropriately

Berjejaring layaknya seseorang yang akan menjalani kencan. Kita harus menunjukkan penampilan terbaik terlebih dahulu dan tidak perlu terburu-buru untuk mencapai tujuan. Saat terburu-buru atau dikejar waktu, secara otomatis kita akan kehilangan kesabaran dan terlalu cepat menjual keahlian kita.

07

Don't be afraid to share

Jika seseorang berbagi pengalaman profesionalnya ke kita, kita pasti akan membagikan pengalaman kita. Begitu pula yang terjadi dalam membuat jaringan, jika kita suka meng-share hal yang kita punya, secara tidak sadar kita akan memiliki teman berbagi hal-hal yang menarik.

08

Give help even when we know there is no money in it

Percayalah, ini merupakan bentuk investasi terbaik. Hal terbaik yang kita berikan ke orang lain, akan kembali pula ke diri kita. Tidak semuanya tentang uang ataupun kepentingan kita, namun jika kita dijadikan teman diskusi, tentunya akan terbangun kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu, hal baik akan kembali ke kita.

Komunikasi Krisis

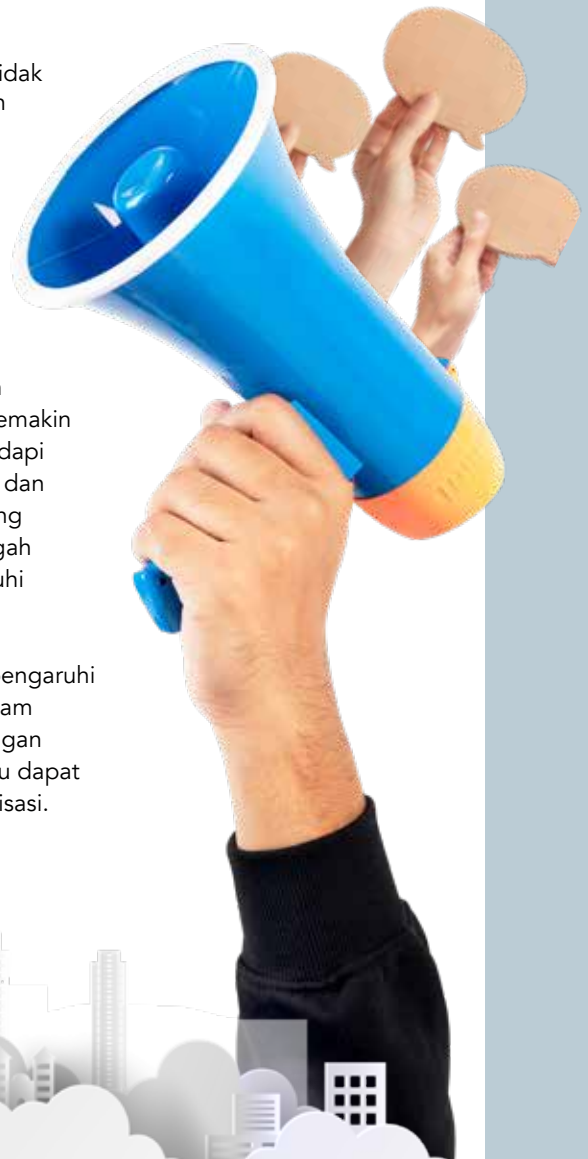
Mengelola dan Memenangkan Opini Publik

Meilawati (Pustakawan Ahli Muda)

Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Setiap orang yang hidup dalam sebuah organisasi tidak akan terhindar dari krisis. Krisis di sini dimaksudkan sebagai masalah, baik yang terjadi di internal maupun eksternal organisasi. Tidak mudah bagi organisasi untuk keluar dari masa krisisnya. Sekalipun krisis tidak bisa dihindari tetapi pada hakikatnya selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Untuk menghadapi krisis dan memahaminya lebih mendalam, Puspitasari dalam bukunya berjudul “Komunikasi Krisis” ini mengulas secara lengkap.

Dinamika yang dihadapi oleh organisasi, seiring dengan perkembangan zaman, mengalami kompleksitas yang semakin tinggi. Dalam menghadapi isu atau pun krisis yang dihadapi organisasi berkelindan dengan perubahan warna politik dan organisasi. Banjir informasi membentuk pemahaman yang terus saja berubah terhadap organisasi yang ada di tengah masyarakat. Informasi yang membanjiri itu mempengaruhi persepsi seseorang tentang organisasi tersebut. Cara organisasi mengatasi krisis yang dihadapi menunjukkan tanggung jawab organisasi pada masyarakat dan mempengaruhi penilaian para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam masyarakat. Sering kali keterlibatan pemangku kepentingan seperti media massa— sebagai pihak yang nantinya justru dapat memperbesar efek krisis pada kerusakan reputasi organisasi.



Krisis dipahami sebagai suatu peristiwa yang merupakan kejutan di mana tidak ada satu pun organisasi berharap hal itu terjadi padanya. Unsur kejutan yang menjadi salah satu karakteristik dari krisis membuat organisasi harus mengantisipasi risiko di luar batas kesanggupannya. Lalu, ancaman bagi organisasi dari adanya krisis membuat organisasi perlu merencanakan keamanan finansial dan kesejahteraan konsumen yang terdampak darinya. Terakhir, waktu respons yang singkat kerap kali membuat organisasi terguncang sehingga perlu adanya perencanaan guna mengantisipasi terjadinya krisis. Krisis tidak dapat muncul begitu saja. Unsur kejutan bukan berarti bahwa krisis akan muncul begitu saja. Krisis dapat dideskripsikan, dikategorikan, dan diprediksi terlebih dahulu. Kurang tanggapnya manajemen organisasi dalam mempersepsikan dan merespons tanda-tanda krisis membuat krisis acap kali terlihat muncul secara begitu saja.

Krisis berawal dari isu. Isu muncul ketika organisasi dikaitkan dengan sesuatu yang dipersepsikan sebagai masalah yang berurusan dengan regulasi atau politik yang berkembang, atau bahkan perubahan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Isu ada pada saat organisasi menyadari bahwa ada masalah yang riil dan memiliki konsekuensi dihadapi oleh organisasi. Ketika isu muncul, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan intervensi dan memainkan peran proaktif untuk mencegah dan mengeksploitasi evolusi dari suatu isu. Kemudian organisasi bisa melakukan pengorganisasian dari current dan crisis issue dengan mengomunikasikan perbedaan guna dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik. Terakhir, upaya penyelesaian konflik dengan melakukan tahap resolusi yang mendorong pihak otoritas untuk bertindak.

Book Review



Komunikasi Krisis

Mengelola dan Memenangkan Opini Publik

Penulis : Puspitasari

Penerbit : Libri

Halaman : 158 Halaman

ISBN: 978-623-321-081-2

Buku ini terbagi menjadi 9 bab, yaitu :

Bab 1 : Di Tengah Ancaman Krisis

Bab 2 : Mengidentifikasi Krisis

Bab 3 : Daur Hidup Isu

Bab 4 : Anatomi Krisis

Bab 5 : Belajar dari Kasus Krisis

Bab 6 : Belajar dari Kasus Krisis: Bencana Alam

Bab 7 : Komunikasi Krisis

Bab 8 : Peran Media Massa dalam Komunikasi Krisis

Bab 9 : Tuntutan Etis dalam Penanganan Krisis

Krisis dalam organisasi kerap kali mengambil sikap untuk menyalahkan pihak lain baik dalam publik internal organisasi maupun eksternal. Krisis kadang menjadi sebuah penyakit di dalam organisasi. Tahapan dalam penyakit juga terjadi di dalam krisis organisasi, yaitu tahap prodromal, akut, kronis, dan resolusi krisis. Krisis, sekalipun merupakan ancaman bagi organisasi, harus dilihat sebagai peluang bagi organisasi untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa kasus pada buku ini. Dalam buku ini diperlihatkan bagaimana krisis dapat dipahami dalam konteks daur hidup isu yang diawali dengan adanya isu, atau masalah, yang dinilai ringan oleh organisasi, dan kemudian meningkat menjadi krisis.

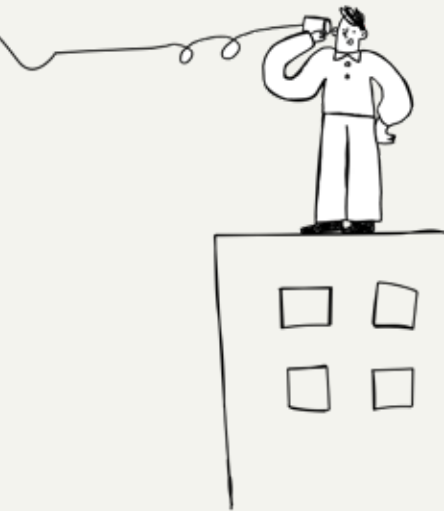
Bab V memuat pemaparan tentang kasus krisis yang dapat menjadi pembelajaran. Kasus krisis ini memiliki tiga elemen utama yang penting dalam dinamika krisis. Elemen tersebut adalah ketidakpastian, komunikasi krisis, dan kepemimpinan. Elemen ini menjadi pijakan bagi organisasi dalam mencari peluang untuk mengurangi ketidakpastian melalui mekanisme komunikasi krisis sebagai cara mengatasi krisis. Kasus yang dibahas adalah kasus Tanker Minyak Exxon-Valdez, Kebakaran Pabrik Malden Mills, dan Kebakaran di Cole Hardwoods. Tidak hanya krisis yang disebabkan karena keteledoran manusia, namun krisis dapat terjadi karena adanya pengaruh dari alam. Bab VI akan membahas tentang krisis yang disebabkan oleh alam. Kasus ini adalah kasus Tsunami 26 Desember 2004 dan Banjir di Red River Valley.

Kemudian masuk kepada komunikasi krisis. Dalam pemberitaan, media massa dirasa memiliki kekuatan dalam membentuk opini di ruang publik dengan beragam informasi yang disajikan. Menyadari kekuatan media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat membuat ahli dalam bidang komunikasi senantiasa mengingatkan akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan media massa. Sangat penting bagi organisasi mengetahui pentingnya mengomunikasikan krisis secara jujur. Komunikator harus memiliki akses langsung terhadap otoritas utama dalam organisasi dan juga pada arus informasi organisasi. Pertanyaan seputar kapan memulai komunikasi krisis, bagaimana cara mengontrol dan mengelola pesan dalam komunikasi, siapa stakeholder yang perlu dilibatkan dalam mengelola krisis, siapa yang sebaiknya mengomunikasikan krisis kepada stakeholder, dan apa saluran yang dapat digunakan dalam mengomunikasikan krisis akan dibahas di bab ini.



Media massa memaparkan beraneka kasus yang semakin menunjukkan krisis dalam organisasi. Krisis yang biasa diberitakan oleh media massa adalah krisis dalam isu korupsi. Paparan media massa terbukti ampuh dalam membentuk opini publik. Menyadari adanya kekuatan peran pada media massa dalam memengaruhi pandangan masyarakat, public relation senantiasa meningkatkan pentingnya menjalin hubungan baik dengan media massa. Proses investigasi mendalam yang dilakukan oleh media massa dalam berhadapan dengan krisis dalam suatu organisasi didasari pada prinsip bahwa berita yang memiliki nilai berita adalah berita yang mampu menyedot perhatian masyarakat luas atau newsworthiness. Banyak organisasi menyadari bahwa bagi media "bad news is a good news", sehingga mengakibatkan media kerap kali diposisikan sebagai lawan oleh organisasi, bahkan dihindari.





Proses komunikasi krisis memerlukan persiapan yang didesain dalam skema Perencanaan Komunikasi Krisis. Penyusunan ini membutuhkan susunan data yang komprehensif dan menyangkut kemungkinan-kemungkinan krisis yang terjadi, serta faktual tentang apa yang pernah dihadapi oleh organisasi dan cara penanganannya. Dalam komunikasi krisis melalui media, salah satu yang terpenting adalah memperhatikan tentang apa yang perlu dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya.

Kerap kali ditemukan fakta sosial bahwa pelanggaran etika dalam penyelenggaraan dan tata kelola organisasi menjadi penyebab dari terjadinya krisis. Dalam beberapa kasus, sekalipun terjadinya krisis bukan disebabkan oleh masalah pelanggaran etika, krisis dapat memunculkan implikasi secara etis. Secara etis, publik menuntut adanya kejujuran dari organisasi sebagai landasan dan kredibilitas. Organisasi yang memiliki reputasi baik sangat mungkin mendapatkan dukungan dari masyarakat dan stakeholder dibandingkan dengan organisasi yang dinilai tidak memiliki etika atau memiliki reputasi yang buruk.

Keunggulan

Buku yang mengupas kaitan isu krisis dan bagaimana mengubahnya dengan menampilkan studi kasus dan panduan dalam menangani krisis. Buku ini tidak hanya merunut sebuah krisis yang terjadi dalam organisasi dari A sampai Z, tetapi berusaha untuk menelaah peristiwa yang konkrit dan nyata yang terjadi di dunia, yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran bagi pembaca.

Buku ini memuat contoh dari krisis yang dialami oleh organisasi. Hal ini memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa saja krisis yang dapat terjadi di organisasi. Di dalam contoh itu juga diberikan gambaran tentang kritik terhadap komunikasi krisis yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian, dipaparkan pula tentang pelajaran yang dapat diambil atau dipetik dari kasus yang ada, dan perencanaan dan persiapan apa yang bisa dilakukan. Buku ini dikemas dengan bahasa formal sehingga cocok dipergunakan untuk buku pegangan atau referensi dalam melakukan penelitian. Meskipun menggunakan bahasa formal, kalimat yang disajikan menggunakan kalimat sederhana sehingga tetap bisa diterima dan dicermati dengan mudah.

Kelemahan

Pengulangan kalimat dan istilah banyak terjadi di dalam buku ini. Hal ini mungkin lebih memudahkan pembaca dalam mengingat apa yang sedang dibahas, namun menjadi salah satu pemborosan kalimat apabila dilihat secara keseluruhan.

Tentang Penulis

Puspitasari memperoleh Pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Indonesia, pada bidang Sosiologi (S1) dan Komunikasi (S2 dan S3). Ia menulis disertasi berjudul "Kontestasi Pemaknaan Pluralisme dalam Arena Media Sosial" (2012).

Kini ia mengajar di Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional dan Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, STIK-PTIK. Untuk semester tertentu, ia juga mengajar di Universitas Multimedia Nusantara dan Universitas Pertahanan Indonesia. Ia juga mendapatkan pengalaman berharga selama mengajar di STIKOM London School of Public Relation yang banyak memberikan pemahaman mengenai dinamika krisis dalam kaitannya dengan bidang Public Relation maupun di Pascasarjana Sosiologi, Kriminologi, serta Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.



Presiden Jokowi:
**Lompatan
Transformasi
Ekonomi
Indonesia
Dimulai Dari
Sini**

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya pada groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 21 Desember 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

GROUND BREAKING KAWASAN INDUSTRI HIJAU INDONESIA OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BULUNGAN, 21 DESEMBER 2021

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia menjadi awal dimulainya transformasi ekonomi di Tanah Air.

Indonesia akan memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia menjadi awal dimulainya transformasi ekonomi di Tanah Air.

"Ini betul-betul suatu lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir," ucap Presiden Jokowi saat melakukan *groundbreaking* Kawasan Industri Hijau Indonesia, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 21 Desember 2021.

Presiden menuturkan bahwa keberadaan kawasan industri tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru yang juga dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara.

"Pendapatan kepada negara dalam bentuk baik pajak ataupun nonpajak sehingga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, memperbaiki nanti kalau ekspor neraca perdagangan kita yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa menyelesaikan, dan tentu saja devisa akan masuk banyak kepada negara kita," tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa manfaat dari kawasan industri tersebut akan dirasakan secara riil pada 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sumber daya manusia dengan kualifikasi yang baik perlu dipersiapkan guna mendukung kawasan industri tersebut secara optimal.

"Dalam masa konstruksi tadi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan, pada saat operasi hanya di sini saja belum anak-cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan itu 60 ribu (tenaga kerja). Perkiraan saya lebih dari 200 ribu (tenaga kerja) plus anak cucu keturunan dari produk-produk yang dihasilkan," tuturnya.



Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kawasan industri yang akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir dalam operasionalnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama Indonesia dengan sejumlah investor dalam negeri dan luar negeri, seperti Cina dan Uni Emirat Arab.

“Ini kerja sama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari Cina, investor dari Uni Emirat Arab semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri terbesar di dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektare dan targetnya adalah 30 ribu hektare,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun berpesan kepada jajaran terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor. Sedangkan terkait perizinan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan sekecil apapun.

“Kalau ada hal yang sangat penting yang ingin kita selesaikan dan tidak selesai, sampaikan pada saya,” tandasnya.

Menko Luhut dalam laporannya menyebut bahwa seluruh perizinan telah dikoordinasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Luhut turut mengapresiasi peran pemerintah daerah dan Forkopimda Kalimantan Utara yang telah mendukung pengembangan kawasan industri tersebut.

“Dukungan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Bulungan ini sangat-sangat signifikan serta segenap jajaran Forkopimda sangat juga luar biasa dalam mendukung pengembangan kawasan ini. Seluruh perizinan kami dapat laporkan Bapak Presiden dapat cepat kita koordinasikan dan mengikuti aturan yang ada,” ucap Luhut.

Turut hadir dalam kegiatan groundbreaking tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Konsorsium Indonesia Garibaldi Thohir, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Bulungan Syarwani

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-lompatan-transformasi-ekonomi-indonesia-dimulai-dari-sini/>



Presiden Tegaskan Komitmen Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah di 2024

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 yang digelar di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Dipublikasikan pada Jumat, 10 Desember 2021 19:14 WIB

Ekonomi syariah Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat di dunia, meningkat dari posisi ke-9 pada tahun 2014 lalu.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024. Hal tersebut mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya.

"Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu," ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 yang digelar di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Presiden, pemerintah akan berupaya keras untuk terus mengembangkan sejumlah sektor, yaitu industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah.

"Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," jelasnya.

Ekonomi syariah Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat keempat di dunia, meningkat dari posisi ke-9 pada tahun 2014 lalu. Jika pertumbuhannya bisa seperti yang saat ini terjadi, Presiden memperkirakan bahwa dalam tiga hingga empat tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar.

Kepala Negara menambahkan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia telah memegang keketuaan atau presidensi G20. Artinya, Indonesia memimpin kelompok negara-negara maju dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masuk dalam 20 besar dunia. Saat ini, PDB Indonesia sendiri berada pada posisi 16 di dunia. Namun sejumlah lembaga seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF memprediksi Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045.

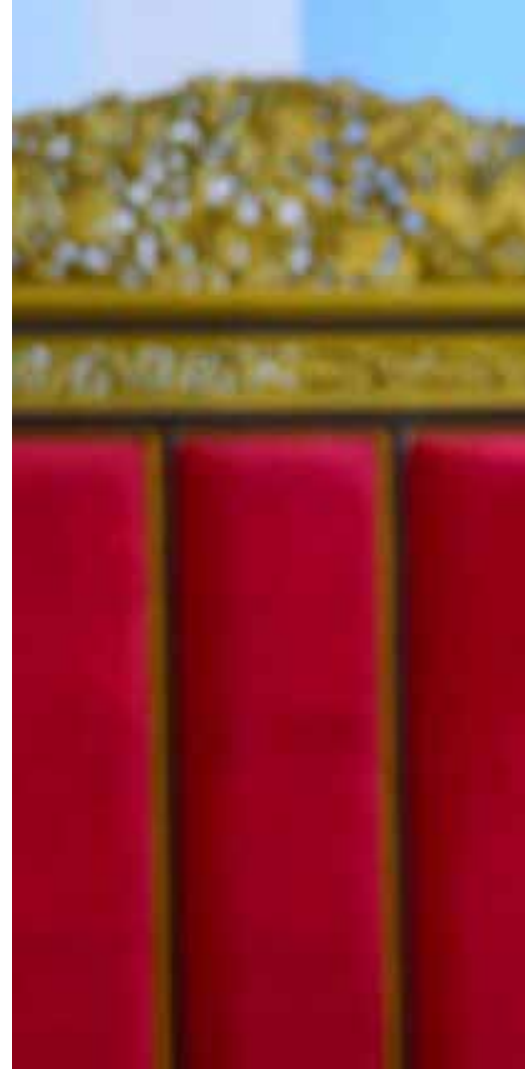
"Tapi itu halangannya juga tidak kecil. Tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana sehingga perkiraan PDB kita saat itu 2040-2045 kurang lebih 23.000 sampai 27.000 income per kapita masyarakat kita. Sebuah angka yang sangat besar sekali tentu saja tapi itu butuh kerja keras kita semuanya," tandasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya selepas acara, menyambut baik dan mendukung prediksi McKinsey tersebut. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.

"Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia," tutur Anwar Abbas. Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-tegaskan-komitmen-indonesia-jadi-pusat-ekonomi-syariah-di-2024/>

Presiden Jokowi: Terus Upayakan Pemenuhan HAM di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya



Menurut Presiden, kemiskinan ekstrem harus dientaskan hingga nol persen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan kesempatan kerja dibuka seluas-luasnya.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021.
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang sosial, ekonomi, dan budaya harus diupayakan secara terus-menerus. Menurut Presiden, kemiskinan ekstrem harus dientaskan hingga nol persen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan kesempatan kerja dibuka seluas-luasnya.

"Kita harus menjamin akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan merata, dan kita harus menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya," ujar Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021.

Untuk meningkatkan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, pemerintah terus bekerja keras untuk

membangun dari pinggiran, desa, dan perbatasan, sehingga hak-hak mereka akan pembangunan juga bisa terpenuhi. Pemerintah juga membangun infrastruktur yang merata ke seluruh penjuru Tanah Air, membuka investasi untuk hilirisasi yang membuka banyak lapangan kerja.

"Gol dari investasi, hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kita tahu untuk tahun ini investasi di luar Jawa ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa, dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung," imbuhnya.

Pemerintah juga terus bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri, menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, memperbaiki ekosistem investasi, termasuk perbaikan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pada pertengahan tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 53 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun



Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10 Desember 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

2021–2025. Rencana aksi ini dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sasaran utamanya adalah kelompok perempuan, anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Perpres Nomor 53 ini juga menegaskan bahwa penegakkan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik saja. Penegakkan HAM juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya, terutama menasar pada kelompok-kelompok rentan, yang bukan hanya perlu kita lindungi, tapi juga kita penuhi hak-haknya,” tegasnya.

Pada 1 Desember 2021, Presiden Joko Widodo juga telah melantik untuk pertama kalinya Komite Disabilitas Nasional. Pembentukan komite ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan merupakan wujud dari implementasi dan pemantauan terhadap Convention of The Right of Person With Disabilities.

“Sekali lagi, agar setiap warga negara mendapatkan hak-hak yang sama, tanpa merasa diabaikan dan dibedakan,” tambahnya.

Selain pemenuhan HAM di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, jaminan hak-hak sipil, politik, dan hukum juga harus tetap menjadi perhatian semua pihak. Presiden menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara, tanpa membedakan suku, agama, gender ataupun ras.

“Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidenter-us-upayakan-pemenuhan-ham-di-bidang-sosial-ekonomi-dan-budaya/>

Presiden Jokowi: Salah Satu Pilar Utama Menjaga Kedaulatan Adalah **Memenangkan Kompetisi**

Kepala Negara juga berpandangan bahwa kedaulatan harus diperjuangkan dengan keberanian untuk menemukan cara-cara baru.

Di tengah dunia yang makin terbuka dengan interaksi dan disrupsi yang makin tinggi, nasionalisme dan kedaulatan bangsa menghadapi tantangan-tantangan baru. Gelombang globalisasi tidak terhindarkan lagi, bukan hanya mobilitas fisik antarnegara yang makin tinggi dan mobilitas barang dan uang yang makin mudah, tetapi mobilitas gagasan, mobilitas pengetahuan juga makin tinggi melalui ranah-ranah digital.

Saat membuka secara resmi Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 6 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi.

“Kita harus memenangkan kompetisi di dalam negeri, kita harus memenangkan kompetisi di pasar global, di pasar luar negeri. Kita harus lebih unggul dari negara lain dan kita harus mampu mendahului negara lain dalam dunia yang makin kompetitif sekarang ini,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga berpandangan bahwa kedaulatan harus diperjuangkan dengan keberanian untuk menemukan cara-cara baru. Menurutnya, untuk mendahului negara lain yang sudah lebih maju, Indonesia tidak boleh melalui “anak tangga” yang sama yang ditempuh oleh negara-negara maju sebelumnya, tetapi harus melompat dan memiliki watak sebagai pencipta tren.

“Kita harus melakukan lompatan kemajuan, kita harus berwatak trendsetter, bukan watak follower. Oleh karena itu, kedaulatan harus diperjuangkan dengan inovasi, harus diperjuangkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengharapkan kontribusi PA GMNI dalam berbagai arena kepemimpinan Indonesia, misalnya dalam presidensi G20 yang baru diemban Indonesia per 1 Desember 2021.

“Saya mengharapkan kontribusi Persatuan Alumni GMNI dalam berbagai arena kepemimpinan Indonesia, melahirkan pemikiran-pemikiran yang progresif, melahirkan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan bangsa,

menguatkan ikatan dan melahirkan gagasan-gagasan untuk menghadapi tantangan global, dan merumuskan strategi besar dalam membangun negara yang berkarakter Pancasila,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa presidensi Indonesia di G20 harus dimanfaatkan juga sebagai momentum untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, kepemimpinan Indonesia untuk mewarnai arah dunia, dan kepemimpinan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Menurutnya, perjuangan ini adalah seperti perjuangan Bung Karno ketika mendukung perjuangan negara-negara jajahan untuk memperoleh kemerdekaan.

“Perjuangan ini seperti perjuangan Bung Karno dalam memimpin negara-negara Asia Afrika. Sekarang ini, kita memimpin negara-negara terkaya dunia untuk membangun dunia yang lebih baik, yang lebih berkeadilan bagi kita semua, bagi masa depan dunia,” imbuhnya.

Sebagai rumah besar kaum nasionalis dan kaum marhaenis, Presiden juga memandang bahwa Persatuan Alumni GMNI harus menjadi yang terdepan dalam merawat nasionalisme yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang selalu memperkuat persatuan dan kesatuan, dan memperkokoh kedaulatan bangsa. Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut secara virtual yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-salah-satu-pilar-utama-menjaga-kedaulatan-adalah-memenangkan-kompetisi/>



Jejak Setahun

JGP di 2021

Januari

- 04** Menkominfo Menyapa - rapat virtual dengan seluruh Sivitas Kementerian Kominfo
- 12** Uji coba Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

- 29** Tanda tangani Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G

Maret

- 10** Seleksi Penyelenggara Multiplexing untuk Migrasi TV Digital

Februari

- 02** Penyusunan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024
- 09** 1st Digital Economy Task Force Meeting G20 Italy
- 22** Bentuk Tim Kajian Teknis UU ITE
- 26** Peluncuran Konektivitas Digital Indonesia di Istana Negara

April

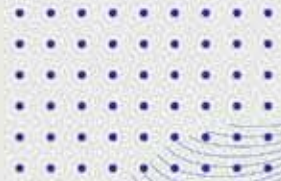
- 01** Hadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Surakarta
- 16** Grand Launching 4 Pilar Kurikulum dan Modul Literasi Digital
- 23** Meninjau lokasi Pusat Data Nasional di Balerang, Kepulauan Riau

Mei

- 03** Penganangan Program Hari Bangsa Buatan Indonesia 2021
- 19** Peluncuran Program Literasi Digital Nasional "Makin Cakap Digital"
- 20** Tandatangani Nota Kesepakatan Implementasi Smart City pada Ibukota-Negara Baru

Juni

- 09** Gelar Dialog Produktif Tahap Pertama ASO untuk Warga Aceh
- 18** Gerakan BBI Kilau Digital Permata Flobamora, NTT
- 23** Terbitnya SKB Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu UU ITE



Juli

- 01** Update perkembangan Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi
- 14** Penataan ulang Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di 9 klaster
- 30** Peluncuran platform digital Rumah Digital Indonesia

Oktober

- 06** Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS 4G
- 15** Moratorium Penerbitan PSE untuk Pinjaman Online

Agustus

- 05** Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital Tahun 2021
- 18** Groundbreaking Stasiun Bumi Satelit Multifungsi SATRIA 1
- 20** Penandatanganan Pernyataan Bersama Pemberantasan Pinjaman Online

November

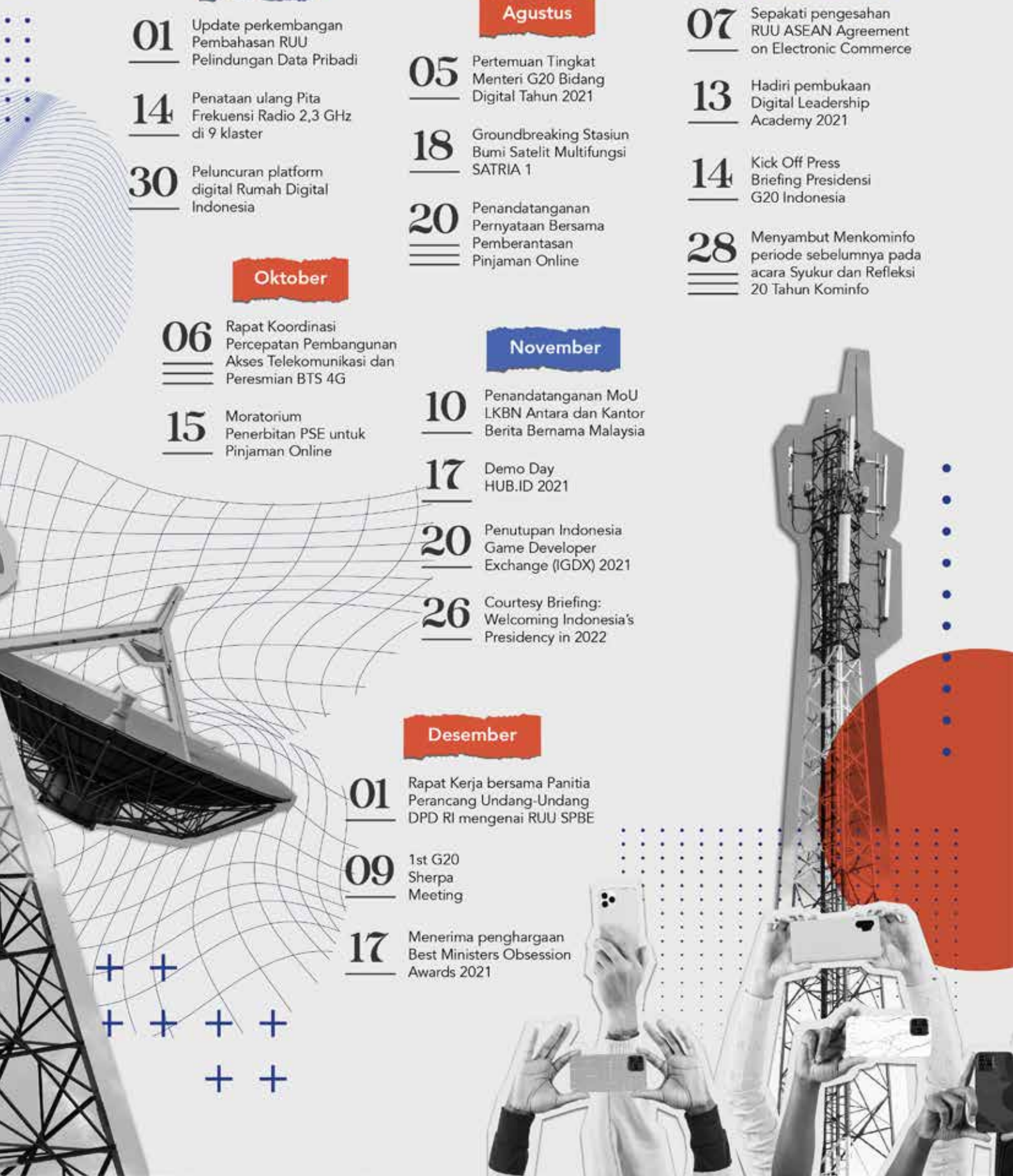
- 10** Penandatanganan MoU LKBN Antara dan Kantor Berita Bernama Malaysia
- 17** Demo Day HUB.ID 2021
- 20** Penutupan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2021
- 26** Courtesy Briefing: Welcoming Indonesia's Presidency in 2022

Desember

- 01** Rapat Kerja bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengenai RUU SPBE
- 09** 1st G20 Sherpa Meeting
- 17** Menerima penghargaan Best Ministers Obsession Awards 2021

September

- 07** Sepakati pengesahan RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce
- 13** Hadiri pembukaan Digital Leadership Academy 2021
- 14** Kick Off Press Briefing Presidensi G20 Indonesia
- 28** Menyambut Menkominfo periode sebelumnya pada acara Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo



Capaian Program Kominfo

Periode Awal Tahun 2021

Upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital perlu melakukan transformasi di berbagai lini kehidupan masyarakat dengan membangun kolaborasi bersama ekosistem pentahelix. Sedari awal, pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengakui membangun Indonesia sebagai negara yang besar dan majemuk tidaklah mudah, karena diperlukan kerjasama antar elemen masyarakat untuk menggapai cita-cita besar bangsa.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Kepala Negara memperhatikan dengan serius berbagai sektor, terutama sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor telekomunikasi atau ekosistem digital menjadi salah penopang penting. Oleh karena itu, pada 3 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan terkait agenda akselerasi percepatan transformasi digital nasional, yakni

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan pelayanan internet,
2. Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis
3. Percepat integrasi pusat data nasional
4. Siapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan;
5. Hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan.

Kata kunci dari arahan tersebut ialah “transformasi”, yang berarti membuat perubahan secara besar-besaran, membangun lebih cepat dari target sebelumnya dan harus akseleratif. Lantas, bagaimana memulai dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis itu?

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kemudian membuat gebrakan dengan menyusun peta jalan atau roadmap transformasi digital di empat sektor, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Secara umum, empat sektor strategis inilah yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital baik dari aspek ekonomi hingga pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air.





Terobosan Awal Tahun

Awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Kominfo melakukan Penandatanganan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk pembangunan tahun 2021 bersama konsorsium atau penyelenggara telekomunikasi yang dibagi dalam lima paket.

Selain menjawab sektor infrastruktur digital, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa lima paket pembangunan BTS 4G itu juga memacu kebangkitan ekonomi dengan menghadirkan konektivitas telekomunikasi. "Menerjemahkan secara langsung agar melakukan akselerasi daya serap belanja negara untuk mendorong agar segera mengalir ke masyarakat dan korporasi. Tim kerja BAKTI mengambil inisiatif lebih awal pada kuartal keempat tahun 2020 untuk memulai proses pengadaan pembangunan BTS 4G," kata Menteri Johnny.

Sebagai informasi, lima paket tersebut masing-masing mencakup paket 1 dan paket 2 bersama mitra Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data yang ditandatangani pada 29 Januari 2021. Kemudian, pada 27 Februari 2021 di hadapan Presiden Jokowi di Istana Negara, Menkominfo Johnny G. Plate menyelesaikan penandatanganan tiga paket lainnya yang meliputi paket 3 bersama konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI, serta paket 4 dan paket 5 bersama IBS dan ZTE.

Dari total target pembangunan BTS 4G 2021 untuk masing-masing paket 1 sampai paket 5, sebanyak 1025 desa/kelurahan telah diinstalasi, dengan rincian paket 1 dan paket 2 sebanyak 120 desa/kelurahan, paket 3 sebanyak 560 desa/kelurahan, serta paket 4 dan paket 5 sebanyak 162 desa/kelurahan.

Selain infrastruktur BTS 4G, Kementerian Kominfo bersama mitra-mitra terkait, terus melakukan terobosan dalam menuntaskan target pembangunan pada sektor lainnya seperti farming dan refarming pita frekuensi dengan target 90 Mhz penambahan spektrum frekuensi radio, sebanyak 3.831 lokasi baru penyediaan akses internet di tempat pelayanan publik yang sudah on air, termasuk di dalamnya 206 lokasi baru di Provinsi Papua Barat dan 305 lokasi baru di Provinsi Papua.

Prioritas pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sendiri termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres tersebut juga berlaku dalam pembangunan pada sektor lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa program strategis lainnya yang mendorong terwujudnya transformasi digital nasional yakni upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP), digitalisasi penyiaran



atau Analog Switch Off (ASO) yang ditargetkan pada 2 November 2022, SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital melalui pelatihan-pelatihan dari tingkat basic hingga advance.

Sepanjang tahun 2021 juga, Kementerian Kominfo telah menyiapkan dengan sungguh-sungguh program pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang penyediaan kapasitas satelit sebesar 30 Gbps yang meliputi kapasitas eksisting sebesar 21 Gbps dan kapasitas baru sebesar 9 Gbps. Kemudian program pembangunan Satelit Multifungsi (SATRIA), pemanfaatan capaian Palapa Ring hingga penyelenggaraan infrastruktur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan startup digital dan peta jalan implementasi 5G.



Diseminasi Informasi

Sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen menjaga ruang digital tetap aman dan produktif, Kementerian Kominfo menghadirkan berbagai program dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengambil sisi manfaat dari ekosistem ruang digital dan menghindari hal-hal atau konten-konten negatif.

Pada awal tahun 2021 Kementerian Kominfo menargetkan 72% nilai kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Dari target tersebut, Kementerian Kominfo berhasil menjangkau 74.216.182 masyarakat yang turut memperhatikan dan mendukung program dan kebijakan pemerintah.

Adapun dari total keseluruhan capaian diseminasi informasi tersebut dengan rincian 20.118.934 orang di bidang politik, hukum dan HAM, 23.200.540 orang di bidang perekonomian dan maritim, dan diseminasi informasi yang menjangkau 30.874.007 orang di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan pada data di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan dan produktivitas masyarakat terhadap industri teknologi semakin pesat. Artinya masyarakat semakin memahami betapa pentingnya penggunaan ruang digital yang baik dan benar. Terlebih, pentingnya diseminasi informasi tersebut terus disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate.

Selama masa pandemi Covid-19 salah satu tantangan yang dihadapi adalah penyebaran informasi hoaks yang terus bertebaran di ruang digital, baik hoaks terkait Covid-19 itu sendiri, program vaksinasi hingga pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Kominfo mencatat, tentang Covid-19 telah ditemukan sebanyak 1.999 isu hoaks pada 5.162 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4.463 unggahan. Namun hingga saat ini, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.031 unggahan hoaks Covid-19 dan

131 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut.

Sedangkan mengenai vaksinasi Covid-19 ditemukan sebanyak 395 isu hoaks vaksinasi Covid-19 pada 2.449 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 2.257 unggahan. Sama seperti hoaks Covid-19, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2.449 unggahan hoaks vaksinasi.

Contoh lainnya pada hoaks tentang PPKM sebanyak 48 isu pada 1.194 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 1.176 unggahan. Pemutusan akses pada hoaks PPKM dilakukan terhadap 1.038 unggahan dan 156 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.

Kolaborasi Lintas Global

Dalam pertemuan 1st ASEAN Digital Minister's Meeting (ADGMIN) yang berlangsung secara virtual pada hari Kamis 21 Februari 2021, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal guna menangani dampak pandemi Covid-19. Upaya tersebut tentunya selain untuk mendukung pemulihan sektor kesehatan dan vaksinasi di Indonesia, TIK juga digunakan untuk memulihkan ekonomi nasional dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengembangan startup digital.

"Proses transformasi digital juga terlihat dalam penanganan pandemi bangsa, karena Indonesia secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi. Karenanya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform *tracking-tracing-fencing* PeduliLindungi dan mendukung pengembangan platform informasi satu atap "Bersatu Lawan Covid-19" atau "United Against Covid-19". Upaya tersebut berkontribusi pada sosialisasi program pemerintah untuk mengajak masyarakat mengikuti aturan wajib kesehatan," kata Menteri Johnny.

Dari sisi program pengembangan kecakapan digital, Kementerian Kominfo juga meningkatkan kolaborasi global yang bekerjasama dengan University of Singapore (NUS), Tsinghua University, Harvard Kennedy School, dan University of Oxford untuk menyukseskan program pelatihan Digital Leadership Academy (DLA). Menkominfo sendiri menaruh perhatian serius pada program DLA yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin digital baik di sektor publik maupun privat.

"Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni

Proses transformasi digital juga terlihat dalam penanganan pandemi bangsa, karena Indonesia secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi. Karenanya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform *tracking-tracing-fencing* PeduliLindungi dan mendukung pengembangan platform informasi satu atap "Bersatu Lawan Covid-19" atau "United Against Covid-19". Upaya tersebut berkontribusi pada sosialisasi program pemerintah untuk mengajak masyarakat mengikuti aturan wajib kesehatan

kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta). Agar *ecosystem exposure* ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” kata Menteri Johnny saat pembukaan program DLA 2021.

Upaya bersama mengajak kolaborasi lintas global diperkuat oleh Menkominfo Johnny G. Plate dengan menerima kunjungan kerja kedutaan dari berbagai negara-negara sahabat sepanjang tahun 2021. Beberapa pertemuan dengan sejumlah negara yang diwakili oleh Duta Besar di Indonesia antara lain Perancis, Denmark, Jepang, Portugal, Arab Saudi, dan sejumlah Duta Besar dari negara-negara sahabat lainnya. Kunjungan kehormatan dari berbagai negara bersama dengan Menkominfo Johnny G. Plate tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.



Capaian Pembangunan Internet *Onboard*

Hingga 30 November 2021
oleh Kementerian Kominfo

Tak dimungkiri bahwa disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang inovatif di berbagai bidang. Beragam kemudahan digital telah menjadi penanda bahwa dunia sedang bergerak maju secara akseleratif. Sebagai salah satu negara besar, baik secara populasi maupun potensi ekonomi, Indonesia seyogyanya memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dan proporsional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan.

Menyongsong awal tahun 2020 baratkan blessing in disguise, kemunculan pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu trigger yang mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. Bahkan, para ahli memprediksikan secara reliabilitas bahwa industri telekomunikasi akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021, karena adanya peningkatan kebutuhan akses data internet.

Untuk itu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan mandat terkait percepatan transformasi digital nasional pada tanggal 3 Agustus 2020. Menindaklanjuti mandat tersebut, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate saat ini telah membuat agenda yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara massif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pelatihan digital untuk sumber daya manusia.

Artikel ini akan membahas secara khusus capaian Kementerian Kominfo selama tahun 2021 pada sektor infrastruktur digital, khususnya Base Transceiver Station (BTS).



Akses Layanan Bergerak Seluler BTS 4G/ Broadband di Wilayah 3T dan Non 3T

Dalam grand design ini, Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi ditargetkan oleh Menteri Kominfo, Johnny G. Plate untuk menyelesaikan pembangunan BTS di 5.623 Desa/Kelurahan, hingga akhir tahun 2021. Target tersebut meliputi:

1

Wilayah 3T:

4.200 desa/kelurahan (lokasi baru), termasuk target Papua dan Papua Barat

2

Wilayah Non 3T Fasilitas Operator Seluler:

1.423 desa/kelurahan (lokasi baru)

1. Berkaca pada target tersebut, hingga November 2021, Kementerian Kominfo, melalui BLU BAKTI telah membangun BTS di 382 desa/kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Instalasi BTS

Total site yang sudah selesai instalasi BTS sebanyak 765 desa/ kelurahan terdiri dari:

- **Paket 1:** 85 desa/kelurahan
- **Paket 2:** 92 desa/kelurahan
- **Paket 3:** 486 desa/kelurahan
- **Paket 4:** 47 desa/kelurahan
- **Paket 5:** 55 desa/kelurahan



b. Site Survey

Pekerjaan survey sudah dilakukan sebanyak 4.197 desa/kelurahan atau 99,93% dari total 4.200 desa. Masih dalam proses survey sebanyak 3 desa/kelurahan.

c. Pra Design Review Meeting

Total site yang sudah selesai pra DRM sebanyak 4065 desa/kelurahan, atau 96.79% dari total 4.200 desa/kelurahan.

d. Ready for Construction (RFC)

Total site yang berstatus RFC atau siap bangun sebanyak 3.737 desa/ kelurahan atau 88,98% dari total 4.200 desa/ kelurahan.

e. Pengiriman

Total site yang sudah selesai pengiriman tower sebanyak 1747 desa/kelurahan atau 41.60% dari total 4.200 desa/kelurahan.

f. Pekerjaan Tower dan Power

Total site yang sudah selesai pekerjaan tower dan power sebanyak 923 desa/ kelurahan atau 21.98% dari total 4.200 desa/kelurahan.

g. Design Review Meeting (DRM)

Total site yang sudah selesai DRM sebanyak 0 desa/kelurahan, atau 0% dari total 4.200 desa/kelurahan. Proses DRM akan dilakukan setelah penetapan operator seluler.

2. Untuk wilayah Non 3T, akses Mobile Broadband (4G) telah On Air di total 379 desa/kelurahan (wilayah Non 3T/Komersial), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Operator	Target IPFR s.d 2022	Jumlah Desa/Kel Yang Diajukan	Klaim On Air
H3I	378	70	76
Smartfren/Smart Telecom	50	18	16
Indosat	645	50	78
XL	861	88	94
Telkomsel	1.501	1.197	1.115
TOTAL	3.435	1.423	379

3. Terkait Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, berikut rinciannya:

Provinsi Papua Barat:

- a. Site Survey: 579 Desa/Kelurahan
- b. Pra Desain Review Meeting (DRM): 579 Desa/Kelurahan
- c. Ready for Construction (RFC): 539 Desa/Kelurahan
- d. Instalasi: 459 Desa/Kelurahan
- e. On Air: 3

Provinsi Papua:

- a. Site Survey: 2.217 Desa/Kelurahan
- b. Pra Desain Review Meeting (DRM): 2.205 Desa/Kelurahan
- c. Ready for Construction (RFC): 1.957 Desa/Kelurahan
- d. Instalasi: 129 Desa/Kelurahan
- e. On Air: 0

Ada begitu banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, khususnya untuk wilayah Papua dan Papua Barat, mulai dari akses jalan, hingga ketersediaan rasio elektrifikasi yang cukup.

Guna menyikapi kendala lapangan, Kominfo berusaha mengadakan pendekatan dengan Pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

Di Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, pembangunan infrastruktur BTS harus menghadapi kelebatan hutan Papua, logistik yang kerap dihadang gelombang besar. Sebaliknya, angka permintaan pun masih cukup minim. Inilah yang membuat pemerintah sulit mendapatkan mitra dari pihak swasta dan pemain bisnis teknologi informasi yang rela mengoperatori layanan digital di sana.



Roadmap Indonesia Terkoneksi

Perkuat Indonesia di Era Digital



Upaya menciptakan infrastruktur digital untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Upaya tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah di bidang teknologi digital agar bisa mewujudkan Indonesia terkoneksi dari Sabang sampai Merauke.

Pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 di 4 sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas untuk menjembatani kesenjangan digital.

Hal itu diungkapkan Menteri Johnny dalam Forum Asia Tech x Singapore 2021 – AtxSummit, Future Role of Connectivity: Bridging the Digital Divide yang berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa 13 Juli 2021 lalu.



Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia Terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera



Infrastruktur Digital

Pembangunan infrastruktur digital merupakan opsi fundamental dalam mewujudkan digital nation. Tanpa infrastruktur digital, cita-cita pemerintah untuk menciptakan Indonesia terkoneksi tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan infrastruktur digital agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah dan sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur digital seperti, pembangunan BTS di seluruh wilayah, terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Untuk memenuhi upaya tersebut, pada Senin, 27 September 2021, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Selular terpilih menjadi operator seluler mitra untuk 9 paket area KSO yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan terpilihnya mitra KSO BLU BAKTI Kominfo di 9 area paket kerja sama, maka proses persiapan integrasi BTS secara bertahap dapat dilakukan, dan BTS yang sudah dibangun dapat segera beroperasi memberikan layanan seluler 4G kepada masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Selular sebagai Mitra Kerja Sama Operasional (KSO) Layanan Seluler 4G di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

Dilansir Kominfo.go.id, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan keduanya akan mengelola penyediaan layanan seluler Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dibangun oleh BAKTI Kominfo di 7.904 desa/kelurahan di wilayah 3T.

“Operator terpilih akan mengelola jaringan yang BAKTI bangun di 7.904. Kami hanya menyiapkan infrastrukturnya, karena urusan frekuensi tentunya yang sudah menjadi milik operator. Jadi itulah kerja sama kami dengan operator,” ujarnya.

Menurut Dirut Anang Latief, total infrastruktur BTS 4G yang akan dibangun sejumlah 7.904 BTS 4G. Dari jumlah tersebut, diproyeksikan akan selesai dibangun secara bertahap hingga akhir tahun 2022.

“Pembangunan 7.904 BTS 4G ini terbagi dalam 9 area paket kerja sama. Jadi, jumlah ini tentunya menggenapi sebanyak 9.113 desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T yang belum terjangkau memiliki atau mendapatkan sinyal 4G,” ujarnya.





DLA
Digital Leadership Academy

Pemerintahan Digital

TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta)," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan Program DLA merupakan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi pengambil kebijakan atau pimpinan institusi pemerintah maupun swasta bidang teknologi digital.

"Program ini untuk pemimpin baik di sektor publik untuk eselon I dan II dan di sektor privat mencakup C-level, praktisi dan akademisi. Kami menargetkan ada 300 orang peserta, jadi ini diikuti oleh para pimpinan dari ASN maupun dari swasta serta Anggota DPR," paparnya.

publik dan privat, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.

"Agar *ecosystem exposure* ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia," ujarnya.

Menurut Menkominfo, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama *triplehelix* antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

"Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian,

Pemerintah juga terus berupaya melakukan akselerasi transformasi digital di bidang Pemerintahan melalui penyiapan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keterampilan digital. Melalui keterampilan di bidang digital, pemerintah mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan dunia digital saat ini.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi Program Digital Leadership Academy (DLA) untuk mempercepat hilirisasi ekonomi digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, program DLA yang diperuntukkan bagi para pemimpin di sektor

Ekonomi Digital



ASEAN Development Bank Tahun 2021 melaporkan, percepatan transformasi digital memiliki pengaruh sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi negara dan pemulihan aktivitas akibat dampak pandemi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 21 September 2021 mengatakan, Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi produktivitas ekonomi digital agar di tahun 2025 bisa tumbuh menjadi USD124 Miliar.

"Melalui optimalisasi produktivitas yang didorong oleh transformasi digital, PDB nasional diperkirakan dapat meningkat sebesar 1% pada tahun 2024. Sedangkan nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 juga diprediksi akan tumbuh hingga 23%, yakni sekitar USD124 Miliar atau setara dengan Rp1.781 Triliun," jelasnya.

Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

"Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional," jelasnya.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pelatihan untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menargetkan pendampingan dan fasilitasi itu akan mempercepat 26 ribu pelaku UMKM masuk tahapan Active Selling di platform digital.

Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna menyatakan pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM akan dilakukan oleh 90 orang fasilitator

yang berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP).

Secara rinci mencakup Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), serta dua Provinsi di Jawa (Jawa Barat dan Yogyakarta).

"Kominfo menyediakan *basecamp* atau pusat pelatihan di daerah-daerah tersebut. Untuk tahap I telah berlangsung pada 3-4 Juli 2021 lalu. Tahap dua akan dimulai 1 s.d. 2 Agustus. Sedangkan tahap 3, pelatihan akan berlangsung di bulan Agustus hingga November 2021. Kemudian, di tahap akhir, pelaksanaan kegiatan mulai dari November sampai Desember tahun ini," jelasnya di Jakarta, Selasa (20/07/2021).



Masyarakat Digital

Perkembangan ekonomi digital tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang digital. Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri. Menteri Johnny mengatakan keberhasilan transformasi digital bergantung pada kesiapan masyarakat untuk go digital.

Oleh karena itu, Kominfo telah menyiapkan beberapa program guna memungkinkan masyarakat Indonesia memasuki ruang digital dengan beragam cara, antara lain melalui Gerakan Literasi Digital yang ditargetkan setidaknya 12,4 juta orang Indonesia setiap tahun, untuk memberikan mereka akses

ke pelatihan virtual tentang digital dasar, kurikulum seperti etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan keterampilan digital dasar.

“Potensinya besar dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk *global technology companies*, e-Commerce kita atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar,” paparnya.

Kominfo menyiapkan program Digital talent Scholarship yang dirancang khusus bagi Generasi Milenial Indonesia untuk diikuti setidaknya 100.000 peserta setiap tahun. “Program ini cocok untuk mereka yang memiliki keterampilan menengah dan berfokus pada komputasi awan, AI, IoT, Big Data Analytics, dll. Kami juga mengundang perusahaan teknologi

global untuk bergabung dengan kami dalam model pelatihan digital ini,” kata Menteri Johnny.

Selain itu, ada pula program Digital Leadership Academy (DLA) untuk mendukung pengembangan kota cerdas dan pembuat kebijakan digital, serta pendiri startup digital. Program talenta digital secara masif ini disiapkan untuk mendukung masyarakat Indonesia go digital dan ambil bagian dalam Percepatan Transformasi Digital Indonesia.

“Kami telah menyiapkan 100 inisiatif utama 2021-2024 yaitu, infrastruktur ICT, e-Government, Legislasi Utama untuk mendukung Ruang Digital, adopsi teknologi baru di sektor industri, termasuk Kesehatan Digital, Pendidikan Digital, Media Digital, Penyiaran Digital, e-Commerce, Digital Fintech, Digital Banking, Pariwisata, dan Logistik,” paparnya.



Pandemi dan Geliat
Perkembangan

Transformasi Digital di Indonesia

Hampir dua tahun, Indonesia dan juga dunia berada dalam situasi yang mencekam akibat pandemi Covid-19. Sejak munculnya penyakit berbahaya tersebut di awal 2020 lalu, dunia berada dalam situasi yang menakutkan. Keganasan Covid-19 mengharuskan manusia di seluruh dunia menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik. Dalam kondisi seperti ini, relasi sosial antar sesama warga pun diharamkan demi meminimalisir penularan Covid-19.


Untuk menghindari kontak fisik, pekerjaan pun dilakukan secara virtual hingga kebutuhan untuk beradaptasi dengan dunia digital menjadi suatu pilihan yang wajib dan harus dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat transformasi digital agar mempermudah masyarakat melakukan aktivitas.

Presiden Joko Widodo pun telah memberikan amanat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mempercepat transformasi digital di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun roadmap transformasi digital di Indonesia melalui empat sektor strategis yakni, Infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pesatnya perkembangan infrastruktur dan layanan digital dalam waktu dua tahun terakhir telah membantu mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19.

"COVID-19 adalah hal yang baru, tapi dengan tersedianya infrastruktur digital dan layanan digital yang kita siapkan, kita semakin mampu untuk menangani pandemi COVID-19," ujarnya.

Infrastruktur digital menjadi salah satu sektor strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah melakukan pembangunan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS), Farming dan Refarming Spektrum Frekuensi Radio, Akses Internet Broadband, Analog Switch Off (ASO).



Infrastruktur digital menjadi salah satu sektor strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital.

Pembangunan BTS

Pembangunan infrastruktur digital yang sudah dilakukan dalam hal ini yakni; akses layanan bergerak Seluler Base Transceiver Station (BTS) 4G/Broadband di Wilayah 3T dan Non 3T.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah menargetkan pembangunan BTS di 5.623 Desa/Kelurahan, yang terdiri dari Wilayah 3T yakni 4.200 desa/kelurahan (lokasi baru) termasuk target Papua dan Papua Barat. Sementara wilayah non-3T yang merupakan bagian dari tanggung jawab operator seluler meliputi 1.423 desa/kelurahan (lokasi baru).

Hingga 27 Desember 2021 ada beberapa capaian di bidang infrastruktur digital yang secara keseluruhan 1.025 desa/kelurahan di wilayah 3T dan 7 sudah *on-air*. Sedangkan progres pembangunan BTS 4G untuk lokasi baru di 4.200 desa/kelurahan di wilayah 3T yakni sebagai berikut:

Telah dilakukan pekerjaan site survey di 4.197 desa/kelurahan atau 99,93% dari total 4.200 desa. Sedangkan yang masih dalam proses survey sebanyak 3 desa/kelurahan.

Pra Design Review Meeting, sebanyak 4.085 desa/kelurahan, atau 97.26% dari total 4.200 desa/kelurahan.

Ready for Construction (RFC) atau siap bangun sebanyak 4.027 desa/kelurahan atau 95.58% dari total 4.200 desa/kelurahan.

Pengiriman, di mana total site yang sudah selesai pengiriman tower sebanyak 1.911 desa/kelurahan atau 58.76% dari total 4.200 desa/kelurahan.

Pekerjaan Tower dan Power yang sudah selesai sebanyak 1.179 desa/kelurahan atau 36.25% dari total 4.200 desa/kelurahan.

Design Review Meeting (DRM). Dalam hal ini proses DRM akan dilakukan setelah penetapan operator seluler.

Klaim On Air s.d tahun 2021

Nama Operator	Target IPFR s.d 2022	Jumlah Desa/Kel Yang Dijajah	Klaim On Air s.d tahun 2021
H3I	378	70	76
Smartfren/ Smart Telecom	50	18	17
Indosat	645	50	78
XL	861	88	94
Telkomsel	1501	115	115
Total	3.435	341	380



Tingkatkan Kapabilitas ASN Lewat GTA

Menjadi aparatur sipil negara dituntut untuk bisa berinovasi khususnya dalam mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi informasi.

Presiden Joko Widodo pun ingin mempercepat rencana pembangunan *digital government* alias pemerintahan digital. Keinginan ini disampaikan Jokowi yang melihat pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi digital dunia saat ini. Pasar digital Indonesia diprediksi tumbuh dari US\$ 40 miliar pada 2019 menjadi US\$ 146 miliar pada 2025.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan akselerasi pemerintahan digital dengan menyiapkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki keterampilan di bidang digital.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan dalam pelaksanaan Program Government Transformation Academy (GTA), Kementerian Kominfo bekerja sama dengan empat pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Hary usai membuka Pelatihan GTA Blended di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin (25/10/2021).

"Pada hari ini kita melaksanakan empat pelatihan Government Transformation Academy (GTA) bagi ASN di empat wilayah secara bersamaan, yaitu ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mamuju Prov. Sulawesi Barat, Kabupaten Jember Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Tengah," ujarnya.

Kabaltibang SDM Hary Budiarto menyatakan pelatihan itu ditujukan untuk membekali ASN agar memiliki kecakapan digital dalam melakukan pelayanan publik dengan baik di masa pandemi sekaligus akselerasi pemerintahan digital.

"Pelatihan itu ditujukan agar ASN meningkatkan kompetensi dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi pemerintahan atau di unit kerja mereka masing-masing. Apalagi dalam masa pandemi ini, di mana yang tadinya kita tidak bisa ketemu, tetapi dengan menggunakan teknologi digital bisa menambah kegiatan sehingga lebih efisien dan efektif," jelasnya.

Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Digital

Kementerian Kominfo juga mendukung perkembangan sektor ekonomi nasional melalui adopsi teknologi digital demi pemberdayaan

ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Pengembangan sektor ekonomi digital juga meliputi gerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/ Ultra Mikro (UMKM/UMi) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi bangsa.

Pada tahun 2021 ini, hingga 27 Desember 2021,, Kementerian Kominfo telah mendorong tercapainya 22.080 UMKM Active Selling yang melakukan upload foto produk dan deskripsi produk, 1.520 UMKM berinteraksi dengan pelanggan, serta 1.380 UMKM melakukan transaksi dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari 356 juta rupiah.

Program UMKM Digital Onboarding dilakukan salah satunya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di mana saat ini telah terdapat 16,4 juta UMKM yang telah *digitally onboard*.

Selain UMKM digital, Kementerian Kominfo juga mendorong tumbuh kembang inovasi kewirausahaan digital melalui penguatan ekosistem startup nasional melalui pelaksanaan program *flagship* untuk pengembangan startup digital di Indonesia yang meliputi Sekolah Beta, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Startup Studio ID, Hub.id dan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) khusus pengembangan industri gim lokal.

Salah satu capaian dari program-program tersebut yakni program Startup Studio ID yang telah memfasilitasi 50 startup tingkat *early-stage* untuk mencapai *product-market fit* dan eskalasi melalui *business matchmaking*. Total pendanaan yang masuk telah lebih dari 5,7 juta Dolar Amerika Serikat.

Kementerian Kominfo juga memfasilitasi pelatihan kewirausahaan digital melalui Digital Entrepreneurship Academy (DEA), yang pada tahun ini menargetkan kepesertaan dari 22.000 wirausahawan. Hingga 27 Desember 2021, tercatat ada 45.404 peserta yang diterima, dan 31.750 di antaranya telah tersertifikasi.

Menuju Masyarakat Digital

Untuk menciptakan masyarakat yang cakap digital, pemerintah juga telah mencanangkan program literasi digital yang menasar masyarakat umum. Di tahun 2021, program literasi digital menargetkan 12.448.750 masyarakat, termasuk Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya terkait dengan Inpres no. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat sebanyak 2.448.750 jumlah masyarakat yang ditargetkan mendapatkan literasi di bidang digital.

Dari target yang menjadi sasaran pemerintah hingga 27 Desember 2021, jumlah capaian sebesar 12.307.498 (98,87%) masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.

Sedangkan terkait Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, capaian berdasarkan angka unik adalah sebagai berikut:

- 127.934 jumlah masyarakat Papua yang mendapatkan literasi di bidang digital.
- 42.236 jumlah masyarakat Papua Barat yang mendapatkan literasi di bidang digital.

Beragam program yang dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Kominfo merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat Indonesia agar mampu bersaing dengan masyarakat global. Demikian Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdikari di bidang teknologi digital baik di Asia maupun dunia.





dos kop
nfo tahun 2021

JANUARI



Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (12/01/2021).



Pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas perkembangan infrastruktur telekomunikasi dan Informatika (TIK) di Indonesia khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Senin (18/01/2021).

FEBRUARI



Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat disuntik Vaksin CoronaVac dosis kedua oleh Tim Medis RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (01/02/2021).



Rapat Kerja pembahasan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (01/02/2021).



Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba melakukan pertemuan virtual "1st Asean Digital Senior Official Meeting (ADGSOM) and Related Meetings 2021", Selasa (19/01/2021).



Pertemuan virtual bilateral dengan Menteri Kominfo Singapura, S. Iswaran, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (21/01/2021), di sela-sela gelaran ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) yang berlangsung secara virtual pada 21-22 Januari 2021.



Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 bagi awak media sebanyak 5.500 orang, di Hall A Basket GBK Senayan, Jakarta, Kamis (25/02/2021)

M A R E T



Pertemuan virtual 15th ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (12/03/2021).



Menteri Kominfo menerima cinderamata dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) Mangkunegara IX (kanan) pada acara Royal Dinner di Puro Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021), dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-88.

M E I



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate meninjau rencana lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), di kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/04/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate memberikan sambutan pada peluncuran Program Literasi Digital Nasional (LDN) "Indonesia Makin Cakap Digital", di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021) yang dihadiri lebih dari 500.000 peserta secara daring.

A P R I L



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate didampingi Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo berkeliling mengunjungi Monumen Pers Nasional, di Surakarta Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate (kanan) memerankan tokoh kharismatik Eyang Semar dalam pentas seni wayang orang bertema Desa Gareng yang diserang pagebluk Covid-19, pada Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-88 di Auditorium Sarsito Mangunkusumo, LPP Radio Republik Indonesia (RRI), Kamis (1/4/2021).

J U N I



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate melakukan Konferensi Pers usai melakukan pertemuan dengan Perwakilan Maxar, membahas tiga satelit untuk keperluan satelit Indonesia, diantaranya satelit BRI, satelit Merah Putih dan satelit Nusantara di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate (kedua kiri), didampingi Komisaris PT. Telkomsel Wishnutama (kiri), Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), dan Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam berfoto bersama usai peresmian 5G Telkomsel, di Kantor Walikota Surakarta, Kamis (03/06/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi untuk 10.000 Pekerja Media, di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat (25/06/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate memberikan sambutan pada acara Puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang bertemakan "Digital Permata Flobamora, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/06/2021).



Menteri Kominfo bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kominfo mengikuti rangkaian Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Dalam Rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76 secara virtual dari Press Room Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Selasa (17/08/2021).



Peletakan batu pertama (groundbreaking) Stasiun Bumi Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-I, di kawasan perkantoran PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/08/2021).

JULI



Menteri Kominfo bersama para aparat penegak hukum dari kepolisian RI mengikuti rangkaian Upacara Peringatan Ke-75 Hari Bhayangkara Tahun 2021, dari Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (07/01/2021)

AGUSTUS



Menghadiri gelaran Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital dari Jakarta, Kamis (05/08/2021) yang untuk pertama kalinya diadakan dalam format hybrid, secara virtual dan secara fisik di di Trieste, Italia.

SEPTEMBER



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate (kiri) saat menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H. E. Sri. Manoj Kumar Bharti (kanan), di Rumah Dinas Menkominfo, Jakarta, Kamis 16/09/2021.



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate mengenakan topi mahkota adat khas Papua saat Konferensi Pers bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayapura dari Media Center PON XX Papua, Grand Allison Hotel Sentani, Kamis (23/09/2021) usai melakukan peninjauan kesiapan Media Center PON XX Papua Klaster Kabupaten Jayapura.

O K T O B E R



Prosesi penyematan dan penyerahan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia kepada 9 penerima penghargaan dalam Upacara Hari Bhakti Postel ke-76, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/09/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate disambut oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021). Kedatangan Menteri Kominfo ke Papua Barat dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan meresmikan BTS 4G di tiga Distrik di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

N O V E M B E R



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menerima Kunjungan Dubes Portugal H.E Maria João Falcão Poppe Lopes Cardoso, di Rumah Dinas Menkominfo Widya Chandra, Jakarta, Rabu (03/11/2021), untuk membahas kerja sama untuk mendukung industri dan bisnis antarnegara serta mendukung upaya menjembatani kesenjangan digital.



Penandatanganan MoU Kantor Berita Indonesia dan Malaysia Perkuat Hubungan Bidang Media, di The Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate didampingi Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail melakukan pengecekan Armada Sistem Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2021 di Halaman Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers mengenai The 20th ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting: Interface Between the AEC Council and the ASEAN Digital Ministers yang berlangsung virtual dari Jakarta, Senin (18/10/2021).

D E S E M B E R



Menteri Kominfo Johnny G. Plate memimpin langsung Rapat Koordinasi Media dan Komunikasi G20 yang dihadiri Kepala Kantor Staf (KSP) Presiden, Moeldoko; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; dan Wakil II Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate (keempat dari kiri) dalam acara G20 Indonesia Presidency 2022 Opening Ceremony - Recover Together, Recover Stronger, yang berlangsung hybrid dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (01/12/2021).



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang terpilih dalam Award Smart City Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibukota Baru dan Award Smart City, di ICE BSD Tangerang, Selasa (14/12/2021)



Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menerima penghargaan kategori Best Ministers pada Obsession Award 2021 yang dilaksanakan di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (17/12/2021), atas prestasinya dalam mengembangkan layanan publik di tengah pandemi Covid-19.



A 3D rendering of a spiral-bound notebook with a teal '2021' overlay. The notebook is shown from a three-quarter perspective, with the top page slightly curled. The spiral binding is visible at the top. The background is a solid, light purple color. The text '2021' is written in a large, bold, teal font across the middle of the notebook's pages.

2021

Perjalanan 2021 dan Akselerasi Transformasi Digital

Oleh: JH Phillip Gobang
(Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik)

“ *Technology is so much fun but we can drown in our technology. The fog of information can drive out knowledge.* ”

Pernyataan Boorstin di atas menggambarkan sebuah digital paradoks, dimana perkembangan teknologi, pada satu sisi memudahkan kehidupan manusia, tapi di sisi lain justru bisa menenggelamkan eksistensi manusia. Lebih dari itu, arus informasi yang kian membesar, alih-alih menciptakan keterbukaan informasi publik, justru membuat kebenaran informasi menjadi kabur.

Satu-satunya cara untuk menaklukkan teknologi yang terus berkembang adalah dengan mempelajari dan menguasainya.

Menjawab tantangan zaman tersebut, Kementerian Kominfo sebagai lembaga yang membidangi sektor TIK dan transformasi digital, di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate telah merancang Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Peta tersebut meliputi pembangunan di 4 sektor transformasi digital, yakni: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital, serta satu sektor strategis yaitu komunikasi publik yang efektif.



Infrastruktur Digital

Tak dimungkiri bahwa Kementerian Kominfo terus berupaya menuntaskan permasalahan seputar disparitas aksesibilitas internet di Indonesia. Fokus utama Kominfo pada sektor ini adalah penyediaan akses layanan internet cepat dan berkualitas sampai ke pelosok, khususnya wilayah 3T.

Tentunya hal ini juga merupakan respon cepat tanggap terhadap Pandemi Covid-19 yang mengharuskan *social* dan *physical distancing*, serta *Work from Home* dan *Study from Home*, dimana kebutuhan akan aksesibilitas internet meningkatkan begitu pesat.

Saat ini, pemerintah dalam kolaborasi dan sinergitas dengan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 9 satelit telekomunikasi, *microwave link*, dan jaringan *fiber-link* yang digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, Kominfo terus melakukan ekspansi jangkauan sinyal 4G, yang merupakan tulang punggung infrastruktur digital, demi mewujudkan percepatan Transformasi Digital.

Untuk wilayah Non 3T, dari Januari - Desember 2021, Kementerian Kominfo bersama operator seluler telah melakukan *On Air Akses Mobile Broadband* (4G) di 380 desa/kelurahan. Sementara itu untuk wilayah 3T, ada 7 desa yang sudah *On Air* yang dilaksanakan oleh BAKTI-Kominfo.

Semua perangkat digital tersebut akan didukung oleh *High Throughput Multifunction Satelit* SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps, untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah ada, dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023.

Sampai Desember 2021, Kominfo telah berhasil menyediakan 27,58 Gbps (Kapasitas Eksisting: 21 Gbps, Kapasitas Baru: 6,58 Gbps) dengan rincian:

- Performa SLA Layanan Satelit Komunikasi *Leased Capacity Satellite* Tahap 1 untuk bulan Desember rata-rata sebesar 99,93%, dengan kapasitas satelit yang didapatkan sebesar 21 Gbps,
- Performa SLA Layanan Satelit *Leased Capacity Satellite* Tahap II pada bulan Desember 2021 adalah 99,14%, dengan maksimum kapasitas satelit dari *Leased Capacity Satellite* Tahap 2 yang sudah beroperasi s.d 30 November 2021 adalah 6,58 Gbps.

Sementara itu untuk konstruksi SATRIA, Kominfo telah memulai langkah awal dengan penandatanganan *Preliminary Working Agreement* (PWA) dengan Badan Usaha Pelaksana, PT Satelit Nusantara Tiga, dan Pabrik Satelit Thales Alenia Space. Berikut detail kemajuan konstruksi SATRIA pada bulan Desember 2021:

- Telah dilaksanakan HUB *Critical Design Review*,
- Telah dilaksanakan HUB *Rack/Equipment Integration* untuk

RF Gateway, selanjutnya akan dilakukan *Factory Acceptance Test*,

- Telah dilaksanakan *dry run test* utk *Monitoring system* di 11 Gateways SATRIA;
- Dari 11 stasiun bumi yang akan dibangun, 6 lokasi masih dalam proses pemagaran dan perataan tanah yaitu Manokwari, Timika, Jayapura, Kupang, Ambon dan Tarakan. 3 lokasi berikutnya yaitu Manado, Batam dan Pontianak telah selesai untuk pengetesan tanah dan selanjutnya akan dilakukan proses pemagaran. 2 lokasi sisanya yaitu Cikarang dan Banjarmasin dalam proses pengerjaan pondasi antena.

Optimalisasi Palapa Ring

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan serat optik nasional yang terbagi menjadi tiga yaitu: Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur. Saat ini total panjang kabel laut Palapa Ring mencapai 12.148 kilometer, dengan 7.862 kilometer dibangun di laut.

Rencananya jaringan Palapa Ring akan diperpanjang hingga 12.803 kilometer pada 2022. Jaringan tersebut nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu sepanjang 8.203 kilometer digelar di darat dan 3.880 kilometer digelar di laut atau berbasis sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL).

Terkait progres pembangunan Palapa Ring, per Desember 2021, capaian SLA Palapa Ring Barat mencapai 100%,

Palapa Ring Tengah mencapai 94,12%, dan Palapa Ring Timur mencapai 100%. Hal ini membuat capaian rata-rata SLA Palapa Ring secara keseluruhan mencapai 98,04%.

Dari sisi pemanfaatan, Palapa Ring Barat mencapai 40% (*Fiber Optic*) dengan total pemakaian sebesar 123 Gbps (43%) dari total Kapasitas *Fiber Optic* sebesar 300 Gbps. Kemudian Palapa Ring Tengah mencapai 30% (*Fiber Optic*) dengan total pemakaian sebesar 144 Gbps (24%) dari total Kapasitas *Fiber Optic* sebesar 600 Gbps. Sementara itu Palapa Ring Timur mencapai 30% (*Fiber Optic dan Microwave*), dengan total pemakaian *Fiber Optic* adalah 172 Gbps (215) dari total Kapasitas sebesar 800 Gbps dan *Microwave* adalah 3700 Mbps (67,27%) dari total kapasitas sebesar 5500 Mbps.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan, Kominfo saat ini tengah melakukan penataan ulang (*farming dan refarming*) spektrum frekuensi. Terkait hal ini, Kominfo telah menghasilkan kajian mengenai opsi perencanaan alokasi pita frekuensi 700 MHz (kajian ITB) yang membahas tentang waktu rilis frekuensi dan objek seleksinya.

Opsi-opsi tersebut berdasarkan hasil FGD dengan *stakeholders* terkait. Kemudian Kominfo juga telah mendapatkan hasil kajian dari Universitas Indonesia terkait *reserved price* untuk pita frekuensi 700 MHz namun masih perlu dilakukan konsultasi dengan BPKP, yang mana proses pengimplementasian kajian tersebut akan mulai dilakukan pada tahun 2022.

Implementasi Jaringan 5G: Selangkah Menuju Indonesia Digital

Pengimplementasian jaringan 5G merupakan salah satu indikator percepatan transformasi digital. Jaringan 5G di Indonesia memang belum terimplementasi pada awal tahun 2021. Namun pemerintah sudah mulai melakukan manuver, salah satunya dengan melakukan *farming* spektrum frekuensi sebesar 1.880 Mhz.

Menteri Kominfo, Johnny Plate sendiri menyatakan bahwa 5G hadir untuk mendukung lima prioritas kerja pemerintah yang sudah dicanangkan sejak pembentukan Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2025. Kedua, jaringan 5G diharapkan akan mendorong program Making Indonesia 4.0, sebuah peta jalan (*roadmap*) untuk mengimplementasikan strategi memasuki era industri 4.0. Ketiga, 5G nantinya akan menjadi semacam *boost* untuk

mendorong pertumbuhan lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia yang mana saat ini sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Kelima destinasi wisata yang dimaksud antara lain: Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

Untuk target 5G di tahun 2023, saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga layer spektrum, yakni *Super Data Layer (high band)* di spektrum 26/28 GHz, *Capacity Layer (middle band)* di frekuensi 2.3/2.6/3.3/3.5 GHz, dan *coverage layer (low band)* di 700 MHz.

Implementasi Analog Switch Off (ASO)

Lebih dari satu dekade, Pemerintah Indonesia berupaya mengalihkan siaran analog ke digital sebagai jawaban terhadap disrupsi di dunia penyiaran televisi global. Upaya tersebut beberapa kali mencapai titik nadir, karena belum adanya regulasi di tingkat UU yang bisa dijadikan preferensi.

Gagasan ASO, yang merupakan pengalihan siaran TV analog ke TV digital, sejatinya sudah ada sejak tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2007, pemerintah pun menetapkan standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T)*. Saat itu pemerintah melakukan uji coba DVBT untuk format siaran digital.



Kemudian pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Roadmap infrastruktur TV digital disusun sebagai peta jalan bagi implementasi migrasi dari sistem penyiaran televisi analog ke digital di Indonesia. Peta jalan ini dimulai sejak awal 2009 sampai dengan akhir 2018.

Sebagai dukungan regulasi terhadap implementasi penyiaran TV digital, pada 2009 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).

Pada November 2011, akhirnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) sebagai pengganti Permen Kominfo No. 39/2009.

Pada tahun 2012, atau satu tahun setelahnya, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, yang mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial *Digital Video Broadcasting - Terrestrial second generation* (DVB-T2). Hal ini merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada 2007. Peraturan tersebut dibuat demi mewujudkan *grand design* ASO dan pengimplementasiannya di Indonesia.

Akhirnya, keresahan dunia penyiaran terjawab oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai bisa mendorong migrasi ke TV digital dengan mematikan TV analog secara keseluruhan atau *analog switch off/ ASO*.

Menkominfo Johnny Plate dalam Konferensi Pers tentang Kesiapan Infrastruktur Multipleksing di 22 Provinsi untuk Mendukung Target ASO 2 November 2022, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/3/2021) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis Kementerian Kominfo, tampaknya 22 daerah atau provinsi di Indonesia sangat memerlukan tambahan penyelenggaraan multipleksing oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Untuk itu, Kementerian Kominfo akan membuka seleksi bagi penyelenggara multipleksing dalam waktu dekat.

Adapun 22 Provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Siaran TV analog pada tahap pertama akan dimatikan paling lambat pada 30 April 2022, sedangkan tahap akhir akan dilakukan selambat-lambatnya pada 2 November 2022.

Revisinya diatur di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Ada tiga tahap ASO yang dipisahkan berdasarkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Tahap Pertama (Paling lambat 30 April 2022). Berlangsung di 56 wilayah siaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara 1 dan Papua, hingga 30 April 2022 waktu setempat.

2. Tahap Kedua (Paling Lambat 25 Agustus 2022). Berlangsung di 31 wilayah siaran, termasuk di antaranya Sulawesi Selatan 5, Kalimantan Tengah 6, Nusa Tenggara Timur 2, DI Yogyakarta, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan DKI Jakarta.

3. Tahap Ketiga (Paling Lambat 2 November 2022). Akan mengatur ASO di 25 wilayah siaran antara lain di Jawa Tengah 5, Kalimantan Barat 6, Nusa Tenggara Barat 5, Maluku 2, Sulawesi Tengah 3 dan Papua 9.

Sepanjang tahun 2021, pengimplementasian *Analog Switch Off* (ASO) bisa dikatakan progresif. Hal ini tampak dari 185 multipleksing yang sudah *on air* bersiaran secara *simulcast* dan *digital* untuk ASO tahap 1. Di samping itu, sebanyak 281 Lembaga Penyiaran pun telah melakukan siaran secara *simulcast* dan digital dari total 697 Lembaga Penyiaran yang sebelumnya bersiaran secara analog.

Dalam rangka mengamplifikasi ASO kepada publik, tim Komunikasi dan Edukasi Publik telah melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Pada tanggal 2 November Kominfo bekerjasama dengan KPID Jawa Barat, melaksanakan peringatan 1 tahun menjelang ASO,
2. Kominfo juga telah melakukan *placement* artikel di *media-media online*, baik itu *Tier 1*, *Tier 2*, maupun *media-media lokal*,
3. Kominfo dalam kerjasama dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) yang berlokasi di Jawa Barat, telah melakukan promosi ASO pada acara "*Netizen Fair*."

Selanjutnya dalam rangka mendukung Ekosistem Penyiaran Digital, Kominfo telah melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Pemetaan data alokasi calon penerima bantuan di Kab/Kota, dengan hasil pemetaan secara tabular dan spasial di 341 Kab/Kota,
2. Bimtek input dokumen penawaran produk STB DVB T2 di e-katalog LKPP kepada calon penyedia STB, dan Bimtek verifikasi dokumen teknis kepada verifikator dokumen e-katalog LKPP,
3. Market Sounding kepada Calon Penyedia Jasa Layanan Pos untuk

1. kebutuhan Pendistribusian STB bantuan Pemerintah dan LPS penyelenggara Multiplexing,
2. RFI kepada Sucofindo, Surveyor Indonesia, dan Pakar Teknik Elektro terkait TKDN, spesifikasi teknis, dan komponen penyusun harga STB,
3. Menyusun draft juknis STB untuk bantuan pemerintah maupun LPS penyelenggara multiplexing.

Ekonomi Digital

Pada sektor ekonomi digital, Kementerian Kominfo saat ini tengah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital.

Demi menciptakan ekosistem digital yang inklusif, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM/UMi), untuk turut serta ke dalam pasar ekonomi digital, diantaranya melalui UMKM *Digital On Board* serta dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kementerian Kominfo juga tengah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital. Saat ini sudah ada sekitar 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap *scaling-up* untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Tentunya, infrastruktur digital yang memadai akan membuat para pelaku UMKM Indonesia dapat bermigrasi ke *digital onboard* sehingga progres ekonomi digital bisa mencapai target, yaitu 30 juta UMKM digital di tahun 2024.

Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Kominfo pun telah sedang berupaya mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah

prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Kementerian Kominfo juga menunjukkan aksentuasi pada pengembangan ekonomi digital ketika bersama-sama dengan komunitas penyelenggara e-dagang atau *e-commerce* menyepakati tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia. Disposisi Kominfo adalah berpihak pada tumbuh kembangnya produk dalam negeri.

Menteri Johnny juga menyatakan penetapan HBBI menjadi wujud keberpihakan Pemerintah dan ekosistem digital atas hasil karya kreatif anak bangsa, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain UMKM, Kominfo juga terus mendorong pembentukan Startup digital. Hingga November 2021, telah terbentuk 15 Startup digital aktif dari program Startup Studio Indonesia (SSI).

Menteri Johnny juga menyatakan penetapan HBBI menjadi wujud keberpihakan pemerintah dan ekosistem digital atas hasil karya kreatif anak bangsa, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)



Masyarakat (SDM) Digital

Tentunya penuntasan masalah disparitas infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dan digital terus dilakukan, mulai dari pelatihan yang sifatnya *basic*, *intermedied*, hingga *advance*.

Pelatihan tingkat *basic* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar digital masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif.

Selanjutnya pada tingkat *intermediate*, Kominfo menyiapkan program *Digital Talent Scholarship (DTS)*, yang ditujukan kepada mahasiswa, masyarakat umum, profesional, guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan hingga aparat sipil negara.

Pada tingkat ini, Kominfo menyiapkan sekitar 103 tema. Beberapa di antaranya seperti: *big data analytics*, keamanan siber, kecerdasan buatan alias *artificial intelligence (AI)*, *Augmented Reality (AR)*, dan *Virtual Reality (VR)*.

Kemudian pada tingkat *advance*, Kominfo menyelenggarakan pelatihan *Digital Leadership Academy (DLA)* yang ditujukan pada para pimpinan aparat sipil negara (ASN) dan swasta. Saat ini DLA tengah berlangsung dari Agustus hingga November 2021, dengan kuota terbatas 300 peserta.

Adapun pengajar dalam DLA berasal dari National University of Singapore, Tsinghua University dan Harvard Kennedy School, dan Harvard University.

Berikut rincian pelaksanaan pelatihan SDM Digital:

1

Untuk program *Professional Academy (ProA)*, terdapat 35.140 pendaftar di mana ada sebanyak 26.011 orang yang diterima. Dari jumlah tersebut, terdapat 9.807 yang telah tersertifikasi.

2

Untuk program *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*, terdapat 59.420 orang yang mendaftar dimana 43.993 diterima. Dari jumlah ini, terdapat 28.032 yang sudah tersertifikasi.

3

Untuk program *Vocational School Graduate Academy (VSGA)*, dari 33.890 orang yang mendaftar, ada 13.560 orang yang diterima. Dari jumlah tersebut, ada 5.514 orang yang sudah tersertifikasi.

4

Untuk program *Fresh Graduate Academy (FGA)*, terdapat 16.374 pendaftar dengan 13.757 yang diterima. Dari jumlah ini, terdapat 7.769 orang yang lulus sertifikasi.

5

Untuk program *Thematic Academy (TA)*, terdapat 15.900 orang yang mendaftar dengan 11.813 orang yang diterima. Dari jumlah ini, ada 5.585 orang yang lulus sertifikasi.

6

Untuk program *Government Transformation Academy (GTA)*, ada 9.653 orang yang mendaftar dengan 9.129 yang diterima. Dari jumlah tersebut, ada 3.980 orang yang lulus sertifikasi.

7

Untuk program *Talent Scouting Academy (TSA)*, ada sebanyak 2.626 orang yang mendaftar dengan 332 yang diterima. Untuk program ini, proses sertifikasi masih tengah berjalan.

8

Untuk program *Digital Leadership Academy (DLA)*, ada sebanyak 525 orang yang mendaftar dengan 307 orang yang diterima. Dari jumlah ini, terdapat 30 orang yang lulus sertifikasi.

9

Untuk program Pengenalan TIK ada sebanyak 8.628 orang yang mendaftar dan mengikuti program tersebut dengan rincian 916 orang wanita/IRT, 971 orang anak usia sekolah/mahasiswa, 121 orang penyandang disabilitas, dan 6.620 orang dari kalangan umum.

Dari sekian program literasi digital tersebut, wilayah Papua dan Papua Barat tetap menjadi salah satu sasaran utama. Hingga November 2021, telah ada sebanyak 103.505 masyarakat Papua yang mendapatkan literasi di bidang digital dan 41.698 masyarakat Papua Barat yang mendapatkan literasi di bidang digital.

Pemerintahan Digital

Dari sisi pemerintahan, Kominfo akan mempercepat pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target operasi penuh pada tahun 2023.

Untuk mencapai target ini, Kominfo saat ini tengah membangun sistem Pusat Data Nasional atau *data center* berbasis *cloud* milik negara menuju Satu Data Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Penerapan SPBE memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Serta, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Total kumulatif dari Tahun 2020 hingga 27 Desember 2021 sejumlah 223 K/L/D (35,45%) yang memanfaatkan layanan *cloud* Pemerintah:



1

Tahun 2020 telah terdapat 42 K/L/D yang memanfaatkan layanan *cloud*. Berikut rinciannya:

No	Instansi	Jumlah
1	Kementerian/Lembaga	12
2	Provinsi	4
3	Kabupaten	19
4	Kota	7
	Total	42

2

Tahun 2021 telah tercapai 181 K/L/D yang memanfaatkan layanan *cloud* pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Instansi	Jumlah
1	Kementerian/Lembaga	48
2	Provinsi	11
3	Kabupaten	97
4	Kota	25
	Total	181

Komunikasi Publik

Kementerian Kominfo, yang didaulat sebagai *Government Public Relations*, saat ini terus berjuang untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara holistik, konsisten, dan terarah.

Dalam upaya mengamplifikasi informasi publik pemerintahan secara holistik, Kominfo telah menggandeng awak media, baik itu media-media nasional, maupun media-media lokal untuk memblast setiap informasi publik yang dikeluarkan Kominfo.

Sepanjang tahun 2021, program diseminasi Informasi Kominfo telah menjangkau 74.216.182 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM: 20.118.934 orang,
2. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim: 23.200.540 orang,

3. Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 30.874.007 orang.

Kominfo juga secara sustainable melakukan klarifikasi terhadap narasi-narasi hoaks, mis-informasi, dis-informasi, bahkan mal-informasi yang acapkali membuat gaduh jagad maya dan menyesatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny, terus berjuang menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang baik, progresif, dan berkualitas kepada masyarakat, serta menjadi *agent of change* melalui amplifikasi dan diseminasi informasi-informasi yang bisa menumbuhkan optimisme publik.

Hingga Desember 2021, Kominfo telah melakukan penutupan akses terhadap 252.595 konten internet bermuatan negatif. Dari total jumlah tersebut, ada sebanyak 42.286 konten pornografi, 202.638 perjudian, 2.868 penipuan, 1.268 konten negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor, 3.320 konten pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, 9 konten

Terorisme/radikalisme, 10 konten Separatisme/Organisasi Berbahaya, dan lain sebagainya.

Selain itu, Kominfo juga telah melakukan penutupan akses terhadap 311.690 konten internet bermuatan negatif di media sosial. Ada 16.080 konten Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang ditutup. Ada juga 290.068 konten di Twitter yang ditutup aksesnya. Kemudian ada sebanyak 727 konten di Telegram yang ditutup aksesnya. Untuk *File Sharing*, ada sebanyak 3.064 konten yang ditutup aksesnya. Kemudian 225 konten TikTok, 79 konten MiChat, dan 1 konten Line yang ditutup.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital di Indonesia, Kementerian Kominfo terus berjibaku dan bergerilya sembari bergandengan tangan dengan multipihak, baik itu swasta, akademisi, masyarakat, maupun media. Sinergitas dan kolaborasi inilah yang menurut Menteri Johnny G. Plate merupakan kunci kesuksesan akselerasi transformasi digital, menuju Indonesia Terkoneksi: Makin Digital Makin Maju.



Capaian Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Desember 2021

Oleh: Dedy Permadi

Staf Khusus Menteri Bidang Digital & SDM / Juru Bicara Kementerian Kominfo

Disrupsi akibat pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi resiliensi seluruh bangsa di dunia, mendorong beragam upaya sebagai bentuk adaptasi di era *new normal*. Melalui momentum inilah, tren adopsi dan inovasi teknologi digital makin menemukan signifikansinya. Sektor-sektor seperti *education technology*, *financial technology*, dan *health technology* makin bermunculan dan menawarkan solusi bagi masyarakat di tengah restriksi mobilitas luar ruang yang harus diterapkan. Maka dari itu, sektor digital perlu untuk terus diperkuat, termasuk di Indonesia.

Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor akibat disrupsi pandemi COVID-19, sektor informatika dan komunikasi (infokom) di Indonesia masih menyimpan peluang yang besar. Sektor ini menjadi satu-satunya sektor yang memiliki

pertumbuhan *double digit* dalam tiga kuartal berturut-turut di tahun 2020 dan mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 10,58 persen c-to-c (BPS, 2021). Hal tersebut menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui sektor infokom, yakni melalui berbagai terobosan untuk mempercepat transformasi digital di berbagai lini.

Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* transformasi digital terus memegang “spirit akselerasi”, demi mewujudkan Indonesia sebagai digital nation yang tangguh dan resilien. Sesuai dengan moto “Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju”, Kementerian Kominfo terus mendorong akselerasi transformasi digital nasional melalui pemanfaatan teknologi sebagai medium untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan memberdayakan.

Peta Jalan Indonesia 2021-2014

Kementerian Kominfo selama ini terus berupaya untuk mengoptimalkan penyediaan infrastruktur teknologi, pengelolaan pos dan Informatika, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Di tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo telah merumuskan berbagai kebijakan/program untuk dilaksanakan dalam empat tahun, di mana program yang diciptakan ini juga sekaligus memacu agenda akselerasi transformasi digital di Indonesia. Program-program ini dirangkum dalam satu landasan komprehensif yakni Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, dan berfokus pada empat sektor strategis, yakni: (1) Infrastruktur Digital (*Digital Infrastructure*); (2) Pemerintahan Digital (*Digital Government*); (3) Ekonomi Digital (*Digital Economy*); serta (4) Masyarakat Digital (*Digital Society*).

Infrastruktur Digital

Salah satu pekerjaan yang sangat lekat dengan Kementerian Kominfo adalah peningkatan konektivitas telekomunikasi dan mengentaskan kesenjangan digital. Kolaborasi bersama di antara berbagai pihak telah dijalin dalam membangun infrastruktur TIK yang kuat dan inklusif. Sampai saat ini, bersama para operator seluler, Indonesia telah terkoneksi melalui jaringan kabel serat optik yang telah terbentang sepanjang 459.111 kilometer, baik di daratan ataupun dasar laut. Konektivitas *backbone* serat optik terus diperkuat dengan pengembangan Palapa Ring Integrasi, dengan target pembangunan jaringan sepanjang 5.226 kilometer pada tahun 2022 dan 6.857 kilometer pada tahun 2023-2024, menghubungkan Palapa Ring Timur, Tengah, dan Barat.

Konektivitas ini juga dioptimalisasi melalui transmisi gelombang mikro (*microwave link*) dengan teknologi Satelit di mana sampai saat ini, Indonesia telah memanfaatkan sebanyak 9 satelit. Kementerian Kominfo terus berinovasi dan pada tanggal 18 Agustus 2021, telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan stasiun bumi SATRIA-1, satelit multifungsi dengan kapasitas transmisi hingga 150 Gigabits per detik.

Jaringan pun terus diperkuat melalui pembangunan stasiun pemancar sinyal atau *Base Transceiver Station* yang telah memfasilitasi sebanyak 70.670

desa/kelurahan untuk terkoneksi dengan jaringan internet 4G. Per kuartal II tahun 2021, Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI juga telah menyediakan akses internet untuk menunjang sektor pendidikan, layanan kesehatan dan pemerintah di 11.589 titik di seluruh Indonesia.

Selain jaringan 4G, perkembangan teknologi 5G di Indonesia pun juga menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari kerja sama sejumlah industri vertikal seperti industri elektronik, pertambangan dan otomotif, dengan operator seluler yang mengkaji potensi implementasi *use case* 5G. Saat ini, terdapat tiga operator seluler yang telah mengantongi Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) 5G dan sudah terdapat beberapa area residensial dan *hotspot* di 13 kota di Indonesia yang mampu mendapatkan layanan

5G. Mengingat sumber daya frekuensi adalah terbatas, maka pengembangan jaringan 5G juga diiringi dengan penataan atau *farming/refarming* frekuensi.

Salah satu upaya *refarming* dilakukan melalui pelaksanaan amanat Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Kementerian Kominfo harus memigrasikan siaran Analog ke Digital secara nasional paling lambat pada bulan November 2022. Kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Kominfo adalah *Analog Switch Off* secara bertahap di mana nantinya pita frekuensi analog yang sudah berhasil dikosongkan dapat menjadi digital *dividend*, di antaranya untuk perbaikan kualitas layanan 4G dan pengembangan teknologi 5G.



Pemerintahan Digital

Sektor Pemerintah pun juga didorong oleh Kementerian Kominfo agar dapat semakin baik dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di masa kini, Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan cepat diharapkan oleh masyarakat luas. Kementerian Kominfo memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kinerja Pemerintahan sekaligus sebagai tindak lanjut amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian Kominfo diberikan amanat untuk menyiapkan arsitektur SPBE Nasional yakni Pusat Data Nasional (PDN) yang akan mengintegrasikan data dari ribuan pusat data milik pemerintah pusat dan daerah sehingga data yang dihimpun dapat digunakan secara bagi pakai. Sebanyak 4 PDN direncanakan akan dibangun di seluruh Indonesia yang berlokasi di area Jabodetabek, Ibukota Negara Baru, Batam dan Labuan Bajo.

Melalui digitalisasi sektor Pemerintahan, Kementerian Kominfo juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kotanya menjadi kota pintar/*smart city*. Kementerian Kominfo melalui Gerakan Menuju Smart City memfasilitasi proses pembimbingan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten terpilih dalam membuat rencana induk atau masterplan pembangunan *smart city*.

Gerakan Menuju *Smart City* telah dimulai sejak tahun 2017, dengan 98 kota/kabupaten di Indonesia yang telah mengikuti rangkaian program dari perencanaan hingga tahap evaluasi terhadap 6 (enam) dimensi pengembangan *smart city*, yakni: (i) *smart governance*; (ii) *smart branding*; (iii) *smart economy*; (iv) *smart living*; (v) *smart society*; dan (vi) *smart environment*.

Pada tahun 2021 ini, Gerakan Menuju Smart City dikembangkan untuk menjangkau Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Ibu Kota Negara Baru, dengan total 70 kota/kabupaten yang terlibat dan 48 kota/kabupaten menjalani proses bimbingan insentif selama lebih dari 4 (empat) bulan.

Sebagai salah satu pengembangan aplikasi informatika pemerintahan di masa pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) dalam mengembangkan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), serta diseminasi informasi mengenai COVID-19. Saat ini, penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan PT Telkom dan keamanan sistem elektroniknya diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kementerian Kominfo sendiri saat ini fokus pada penyediaan layanan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara untuk mendukung kebutuhan PeduliLindungi. Hingga 22 Desember 2021, aplikasi PeduliLindungi telah digunakan oleh 81.153.276 pengguna dan dimanfaatkan dalam berbagai aspek kegiatan sehari-hari melalui fiturnya yang beragam.

Ekonomi Digital

Kementerian Kominfo juga mendukung perkembangan sektor ekonomi nasional melalui adopsi teknologi digital demi pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Pengembangan sektor ekonomi digital juga meliputi gerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Ultra Mikro (UMKM/UMi) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi bangsa.

Pada tahun 2021 ini, hingga pertengahan November 2021, Kementerian Kominfo telah memetakan level digitalisasi dari 37.370 UMKM, memberi pendampingan bagi 26.237 UMKM, dan mendorong *active selling* dari 15.306 UMKM di platform digital. Program UMKM Digital *Onboarding* dilakukan salah satunya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di mana saat ini telah terdapat 16,4 juta UMKM yang telah *digitally onboard*.

Selain UMKM digital, Kementerian Kominfo juga mendorong tumbuh kembang inovasi kewirausahaan digital melalui penguatan ekosistem *startup* nasional melalui pelaksanaan program *flagship* untuk pengembangan *startup* digital di Indonesia yang meliputi Sekolah Beta, Gerakan Nasional 1000 *Startup* Digital, *Startup* Studio ID, Hub.id dan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) khusus pengembangan industri gim lokal. Salah satu capaian dari program-program tersebut yakni seperti program *Startup* Studio ID yang telah memfasilitasi 50 *startup* tingkat *early-stage* untuk mencapai *product-market fit* dan eskalasi melalui *business matchmaking* dengan total pendanaan yang masuk telah lebih dari 5,7 juta Dolar Amerika Serikat.

Kementerian Kominfo juga memfasilitasi pelatihan kewirausahaan digital melalui Digital Entrepreneurship Academy (DEA), yang pada tahun ini menargetkan kepesertaan dari 22.000 wirausahawan dengan tema-tema pelatihan seperti: pemasaran digital, pengelolaan keuangan digital, dan *women in entrepreneurship*. Hingga Oktober 2021, telah terdapat 38.236 peserta DEA di mana 90 persen di antaranya sudah memulai kegiatan berwirausaha. Kementerian Kominfo juga menginisiasi Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) yang ditujukan untuk menjadi platform pembahasan isu-isu ekonomi digital bersama pelaku industri di berbagai sektor. Grand outcome dari seluruh pelaksanaan FEDK adalah dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia.

Ekonomi Digital



Masyarakat Digital

Kementerian Kominfo terus mengembangkan sumber daya manusia atau talenta digital nasional demi mendorong resiliensi dan daya adaptif bangsa dalam menghadapi tren adopsi digital yang terjadi baik secara nasional maupun global. Pada pendidikan non-formal, Kementerian Kominfo menyelenggarakan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi di tingkat dasar, dengan target 12.448.750 peserta pada tahun 2021; program *Digital Talent Scholarship* (DTS) di tingkat menengah, dengan target 100.000 target peserta pada tahun 2021; dan program *Digital Leadership Academy* (DLA) dengan target 300 peserta pada tahun 2021.

Tahun ini, program literasi digital Kementerian Kominfo telah menjangkau sekitar 11.462.310 juta peserta terlatih (hingga 17 Desember 2021), DTS telah menjangkau 116.181 peserta (hingga 17 Desember 2021), dan DLA menjangkau 306 pemimpin digital melalui kerja sama pendidikan dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University, Harvard Kennedy School, dan Oxford University.

Adapun untuk pendidikan formal, Kementerian Kominfo memberikan beasiswa pascasarjana bidang TIK, di mana pada tahun 2021 ini terdapat 184 penerima beasiswa yang melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Tsinghua University, University of Twente, dan Erasmus University Rotterdam.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melanjutkan inisiatif transformasi STMM Yogyakarta menjadi Institut Digital Nasional-University (IDN-U) yang direncanakan mencakup 5 (lima) sekolah/fakultas, yaitu: (1) Sekolah Teknologi Digital; (2) Sekolah Komunikasi Digital; (3) Sekolah Bisnis dan Platform Digital; (4) Sekolah Kebijakan dan Regulasi Digital; serta (5) Sekolah Pascasarjana Komunikasi dan Informatika. Program SDM Digital Kementerian Kominfo akan terus kita kembangkan pada tahun depan, termasuk untuk menjangkau lebih banyak peserta dan bekerja sama dengan lebih banyak mitra.

Digital Economy Working Group G20 2022

Dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu substansi dan penyelenggaraan *Digital Economy Working Group* (DEWG). Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status *task force* pada presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo menyambut baik amanat ini dan

mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh *working groups* dan *engagement groups*, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20.

Dalam DEWG, Kominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19 (*connectivity and post-COVID-19 recovery*) untuk mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.

Kedua, isu literasi digital dan keterampilan digital (*digital skills and digital literacy*). Fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat untuk menyongsong transformasi digital dan memanfaatkan potensi ekonomi digital. Ketiga, isu prioritas arus data lintas batas negara (*cross border data flow and data free flow with trust*) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas dengan tetap mengedepankan kedaulatan data.

Penutup

Layaknya sebuah pertandingan olahraga, pandemi COVID-19 adalah momentum yang tepat untuk *kick-off* bagi langkah akselerasi transformasi digital. Mengutip perkataan Charles Darwin,

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change",

barang siapa yang bisa beradaptasi maka merekalah yang dapat bertahan. Disrupsi pandemi COVID-19 telah mendorong seluruh negara dan entitas di dunia untuk makin mengintensifkan utilisasi dan inovasi teknologi digital. Indonesia juga harus memiliki spirit transformatif yang sama. Kita harus menjadi bangsa yang cepat, tangkas, dan adaptif dalam menghadapi beragam perubahan ini. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui beragam program serta kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, terus mendorong upaya transformasi digital nasional.

Menyongsong tahun 2022, mari kita terus konsisten dan tingkatkan upaya transformatif kita, demi mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju!



Kata Civitas



Tahun 2021 kita lalui dengan penuh tantangan. Merebaknya virus Covid-19 varian Delta ternyata semakin membuka mata kita akan pentingnya TIK. Sebagai contoh, pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi yang terintegrasi dengan berbagai layanan memaksa kita untuk bertransformasi secara digital. Namun di satu sisi, kita semakin sadar akan perlu segeranya pemerataan infrastruktur pos, telekomunikasi, dan penyiaran agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, baik belajar maupun bekerja dengan nyaman. Oleh karena itu salah satunya, layanan 5G kita coba kembangkan dan 4G diratakan meski di tengah PPKM yang diterapkan.

Tiga pilar utama yaitu pos dan logistik, telekomunikasi, dan penyiaran menjadi penyokong utama dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Oleh karena itu, mudah-mudahan di tahun 2022, seluruh desa sudah bersinyal 4G sesuai target kita semua, migrasi TV Analog ke TV Digital lancar sesuai jadwal, serta sektor pos dan logistik semakin bisa diandalkan menjadi tumpuan. Dan pastinya, semoga Covid-19 sudah berakhir dan Indonesia semua semakin kuat menghadapi tantangan ke depan.



Wayan Toni Supriyanto
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika





Tahun 2021 ini mengajarkan saya banyak hal yang tentunya membantu saya dalam proses pendewasaan diri. Susah dan senang tidak pernah benar-benar bertahan lama, layaknya sebuah roda kita akan merasakan keduanya bahkan kadang di waktu yang bersamaan. Covid-19 yang muncul tanpa permisi dalam tubuh saya pun pada akhirnya menyadarkan saya bahwa target pekerjaan tidak akan ada habisnya, disposisi pimpinan belum tentu ada ujungnya, namun kehadiran keluarga dan sahabat terdekat adalah harta berharga yang saya punya.

Untuk tahun 2022, jangan lupa bahagia pada hal sederhana yang hadir dalam hidup seluruh Civitas Kominfo. Tetap pupuk semangat dalam mengabdikan pada negeri, dan teruslah berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain tanpa tapi.

Saya berharap pengalaman pada tahun-tahun lalu dapat menjadi bahan bakar untuk semakin melaju di tahun 2022 dengan beragam inovasi kebijakan baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Kebijakan penerapan FWS serta absensi melalui Poortal Kominfo semoga tetap bisa dilanjutkan karena nyatanya pekerjaan kami tetap bisa produktif walaupun kehadiran ke kantor dibatasi. Saya juga berharap ke depannya Kominfo memiliki co-working space kekinian yang dapat digunakan oleh seluruh Civitas Kominfo untuk bersosialisasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan formal dan non-formal.



Cut Medika Zellatifanny

Peneliti, Puslitbang Aptika dan
IKP, Badan Litbang SDM





Tahun 2021 merupakan tahun yang paling berat selama saya bekerja di Kominfo. Mulai dari suasana kerja dengan atasan baru yang lebih jauh lebih teliti, cermat, dan tegas, sehingga dibutuhkan waktu untuk beradaptasi lebih lanjut. Dan di tahun 2021 ini merupakan tahun yang paling berduka buat saya, karena di tahun ini saya kehilangan orang yang saya sayangi yaitu ayah mertua, nenek, om, dan belum lagi teman-teman dan pasien di kantor yang meninggal, akibat dari penyakit yang diderita atau dari Covid-19.

Pesan untuk di 2002 yaitu: protokol kesehatan tetap nomor satu. Masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak terbukti ampuh untuk menghindari diri dari Covid-19. Meskipun sudah vaksin dan ada yang sudah mendapat booster, tidak menjamin diri kita kebal 100% dari Covid-19. Virusnya terlalu cepat bermutasi sehingga pencegahan yang paling efektif yaitu hanya dari diri kita sendiri.

Harapan saya di 2022 yaitu tidak muluk-muluk, cukup diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, keluarga semua juga tetap sehat semua, dan juga teman-teman di Kominfo diberikan kesehatan semua agar bisa lebih produktif dalam membangun Indonesia yang lebih digital.



Dr Lutfi Oscar Bayuni

Dokter Madya, Penanggung Jawab
Klinik Pratama Kominfo



Bicara Baik untuk Membangun Optimisme 2022

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu namo buddhaya. Syalom. Salam sejahtera dan Salam Sehat bagi kita semua.

Tidak terasa kita berada di penghujung tahun 2021, banyak suka duka yang telah kita lalui di tahun 2021. Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME karena mampu melewati seluruh tantangan dengan sangat baik dan tetap diberikan kesehatan terutama di masa pandemi yang tidak mudah ini. Sekretariat Komisi Informasi Pusat patut mengapresiasi seluruh usaha dan kerja keras kita selama 1 tahun ini untuk tetap memberikan upaya terbaik dengan segala keterbatasan yang ada demi kemajuan Lembaga Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Di tahun 2022, optimisme ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI harus dibangun dengan memberikan aura positif melalui "bicara baik" dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari untuk mengukir lembaran baru, lebih menghidupkan harapan baru serta semangat baru untuk saling bahu membahu, berpegangan tangan membawa Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi sebagai dampak dari pandemi.

Selamat Menyongsong Tahun Baru! Harapan Baru!
Semangat Baru!
Salam Keterbukaan Informasi.



Munzaer

Sekretaris Komisi Informasi Pusat





2021 menjadi tahun validasi terkait pola dan cara kerja kita yang ternyata benar-benar bisa berubah drastis menjadi lebih efektif dan efisien. New Normal memaksa semua pihak untuk menerima teknologi sebagai satu solusi.

Kemanfaatan adalah kunci keberhasilan program, tentunya juga harus didukung dengan perencanaan yang matang serta kolaborasi yang solid lintas pemangku kepentingan.

Harapan saya di 2022, semoga kita semua mampu hadir secara konsisten memberi manfaat khususnya kepada masyarakat melalui program-program terkait peran kita sebagai fasilitator atau akselerator dalam proses transformasi digital.



Aris Kurniawan

Koordinator Pemberdayaan Kapasitas Teknologi Digital
Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika





Tahun 2021 bagi saya adalah tahun perubahan, karena saya meninggalkan jabatan fungsional lama saya (Perencana) ke jabatan fungsional yang lebih sesuai dengan passion saya yaitu Pranata Humas. Bersama tim yang sangat solid di Museum Penerangan, saya bekerja dengan lebih yakin dan fokus. Kebijakan tutup museum karena kondisi pandemi Covid-19 membuat kami berinovasi di dunia daring. Saya jadi sering ditunjuk sebagai MC atau moderator di depan anak-anak, pejabat hingga komunitas - suatu hal yang selalu saya hindari selama ini. Tahun yang penuh pembelajaran karena menjadi pegawai lama tapi dengan pola pikir yang baru!

Selain itu, saya merasa awal tahun ini berjalan begitu lambat, namun diakhiri dengan begitu cepat. Hari-hari yang berat karena kekhawatiran terjangkit Covid-19 berangsur menjadi lebih ringan seiring program vaksinasi yang berjalan baik, dan kesadaran prokes yang mulai merata. Puji Tuhan, saya dan keluarga bisa sampai di bulan Desember 2021 ini dengan sehat walafiat. Tetap semangat menjadi agen perubahan di sekitar kita, terutama mempromosikan protokol kesehatan dan hidup sehat Bahagia.

Saya berharap saya, keluarga, rekan kerja dan keluarganya, semua sehat-sehat dan bebas dari Covid-19 dan berbagai virus turunannya. Khusus untuk satker di mana saya ditempatkan, saya berharap Museum Penerangan menjadi museum komunikasi terbaik di Indonesia yang menjadi andalannya Kominfo, dengan memberikan pelayanan berkelas dunia. Harapan saya tentang Kominfo: menjadi kementerian yang paling komunikatif dan tak lelah memperlengkapi anak-anak bangsa untuk menang bertarung melawan berita hoaks.



Fransisca Melinda Rosaria
Pranata Humas Ahli Pertama
Museum Penerangan



”

Satu dasawarsa di Kemkominfo telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi saya. Merasakan era kepemimpinan tiga Menteri, saya bisa melihat bahwa Kemkominfo telah banyak berkontribusi dalam memberikan warna dan dampak bagi bangsa. Mulai dari pembangunan secara fisik yang menghubungkan ujung barat hingga timur Indonesia, penyediaan konektivitas, hingga pengembangan kapasitas masyarakat lewat berbagai program literasi di berbagai sektor, semuanya mampu menampilkan peran Kemkominfo di era yang serba digital ini. Jadi, selamat untuk Kemkominfo, untuk kita semua yang telah berkontribusi, dan untuk semua capaian yang telah diraih di 2021 ini!

Tentu masih banyak ruang bagi Kemkominfo untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanannya. Perkembangan TIK begitu cepat dan kita tidak bisa tertinggal di belakangnya. Semoga di tahun 2022, Kemkominfo dapat membuat lompatan besar sebagai pembuat regulasi sekaligus penyedia layanan publik. Saya optimis Kemkominfo akan semakin gemilang di tahun-tahun mendatang.



Meylani

Pranata Humas Ahli Muda Direktorat
Tata Kelola dan Kemitraan Kompub Ditjen IKP





Lebih dari 10 tahun sebagai sivitas Kominfo, perkembangan Kominfo sebagai institusi yang terdepan dalam urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi terasa semakin dibutuhkan untuk cepat tanggap terhadap dinamika yang ada. Pengelolaan program serta Komunikasi baik internal dan eksternal juga semakin baik dan transparan. Semoga Kominfo terus bertumbuh menjadi institusi yang memadahi peningkatan kapabilitas sivitasnya maupun untuk seluruh stakeholder terutama masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang maju dan memiliki literasi digital yang memadai.



Kautsarina
Puslitbang SDPPI
Balitbang SDM Kominfo



Sejujurnya saya belum pernah membaca majalah Kominfo Next di tahun 2021, juga tahun 2020, apalagi 2019.

Semoga dengan terbitnya majalah Kominfo Next, saya bisa membacanya karena jika tidak, maka tahun depan saya juga tidak baca dong.



Donum Theo
Dsn. Bojong Nangka, Legok, Tangerang, Banten
Direktorat IK Polhukam Ditjen IKP

Presidensi G20, Torehan Sejarah Baru dan Momentum Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia Maju

Indonesia secara resmi memegang keketuaan atau presidensi Group of Twenty (G20) sejak 1 Desember 2021. Hal ini menjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia karena ini untuk pertama kalinya menerima tampuk Presidensi G20 yang sebelumnya dipegang Italia. Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia Maju.

Presidensi G20 ini dikatakan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. "Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, membangun tata Kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ujar Presiden pada pembukaan Presidensi G20 melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (1/12/2021).

Momentum ini juga harus dapat dimanfaatkan bagi pemulihan ekonomi dengan memainkan peranan strategis Indonesia dalam mendorong upaya Bersama untuk pemulihan ekonomi dunia agar tercipta pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menginginkan agar Presidensi G20 Indonesia tidak sebatas seremonial belaka. "Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan besar. Indonesia siap berkolaborasi dan menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini dan bisa menghasilkan terobosan besar dari forum G20," lanjutnya.

Forum G20 sendiri menjadi forum yang sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global seperti masalah ekonomi, krisis keuangan di dunia. G20 berkontribusi besar dalam menangani masalah ekonomi dan memberikan solusi nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan.





G20 INDONESIA
2022





Recover Together, Recover Stronger

Recover Together, Recover Stronger atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa menjadi tema yang diusung pada Presidensi G20 Indonesia. Tema ini diharapkan mampu memberikan semangat baru dalam mewujudkan tatanan dunia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengamplifikasi pesan kunci tema Presidensi G20 tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyediakan portal informasi g20.org yang bisa

digunakan sebagai referensi keketuaan Indonesia dan juga seluruh rangkaian aktivitas kegiatan G20.

"Kita berharap pesan kunci dari Presidensi G20 yaitu *Recover Together, Recover Stronger* dapat diamplifikasi dengan baik agar bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dunia," ujar Menteri Johnny.

Presidensi G20 Indonesia juga diharapkan menjadi momentum dalam meningkatkan diplomasi ekonomi melalui upaya menciptakan arsitektur ekonomi dan



Pulih Bersama, Bangkit Perkasa

kehatan global pasca krisis. Selain itu, Presidensi ini juga akan memfokuskan pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif.

Rangkaian Presidensi G20 Indonesia meliputi 150 kegiatan yang akan terbagi dalam 2 kelompok kegiatan yaitu Sherpa Track dan Finance Track. Dimulai dari *ministerial meeting, engagement group meeting* hingga rapat setingkat eselon I hingga sampai pada

puncak event yaitu Presidensi G20 Leader Summit pada akhir Oktober tahun 2022 mendatang. Rangkaian kegiatan Panjang ini diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi, jasa, perhotelan, transportasi, UMKM dan sektor lainnya.



Tentang G20

Group of Twenty atau biasa disebut G20 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang dibentuk pada tahun 1999 dan beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar dunia yang terdiri atas 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahun dan memulai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tahunan pertamanya pada 2008 dengan dihadiri masing-masing Kepala Negara dan pemerintahan.

Forum G20 membahas dua arus isu, pertama isu Finance Track yaitu ekonomi dan keuangan seperti

kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional yang dilakukan oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota. Sedangkan isu kedua adalah Sherpa Track yang mencakup geopolitik, perdagangan, energi, pembangunan, perubahan iklim, antikorupsi dan kesetaraan gender yang dibahas oleh kementerian terkait pada tingkat Menteri masing-masing negara anggota.

Namun sebelum dibahas di tingkat Menteri, isu-isu tersebut dibahas melalui Working Group (WG) untuk membahas secara detail dan teknis untuk isu-isu tersebut agar optimal dan komprehensif.



Tiga Agenda Utama Presidensi G20

Presidensi G20 Indonesia akan membawa tiga agenda utama besar yaitu pertama penanganan kesehatan yang inklusif, agar mampu mendorong peningkatan kapasitas negara berkembang dalam upaya memproduksi vaksin COVID-19 secara mandiri. Kedua, transformasi ekonomi berbasis digital, di mana teknologi menjadi enabler khususnya bagi penguatan kapasitas UMKM agar mampu bertahan dari krisis. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan yang menekankan pada isu pembangunan ekonomi rendah karbon.

Tiga agenda penting ini menjadi harapan agar Indonesia bisa menjadi jembatan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di negara-negara berkembang untuk dibicarakan Bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan G20.

Berkaitan dengan agenda transformasi digital, Kementerian Kominfo telah menyiapkan tiga agenda dalam Digital Economy Working Group (DEWG) yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca COVID-19; literasi digital; dan *cross-border data flows with trust*.

Kementerian Kominfo juga mengupayakan dukungan 5G *experience* dan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G yang kuat dalam penyelenggaraan rapat penting G20. "Kita berharap untuk pelaksanaan G20 ini bisa berlangsung lancar dan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang memadai," harap Menteri Johnny.

Kita berharap pesan kunci dari Presidensi G20 yaitu *Recover Together, Recover Stronger* dapat diamplifikasi dengan baik agar bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia dan dunia.



Manfaat Presidensi G20



Sumber

<https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/>
<https://g20.org/media/#gallery>

Pemerintah menyampaikan manfaat dari Presidensi G20 di antaranya pertama, momentum untuk meningkatkan ekonomi diplomasi melalui penciptaan arsitektur ekonomi dan kesehatan global pasca pandemi Covid-19. Kedua, Indonesia mendapatkan keistimewaan untuk menentukan *agenda setting*. Ketiga, menyeimbangkan kepentingan dan prioritas antara negara maju dan negara berkembang. Keempat untuk memperkuat sektor kunci ekonomi melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.

Rangkaian Panjang kegiatan Presidensi G20 dengan kehadiran para delegasi negara anggota akan berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian

Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita juga bisa menjadikan ini sebagai sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia.

Selain itu Presidensi G20 bisa menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia di tengah pandemi tetap memiliki persepsi baik atas resiliensi ekonomi terhadap krisis di mata dunia. Presidensi G20 ini juga bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia. Sehingga kita harus memaksimalkan momentum ini untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi ekonomi juga kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.



PRESIDENSI G20 INDONESIA 2022

RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER



Lebih lengkap
tentang G20



<https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/>

Menuju Presidensi

G20

Indonesia

2022

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (tengah) memimpin langsung jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Media dan Komunikasi G20 yang dihadiri Kepala Kantor Staf (KSP) Presiden, Moeldoko; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II, Kartika Wirjoatmodjo, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021)





Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan komunikasi publik dan fasilitas konektivitas untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Selama Presidensi G20 dipimpin Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah fasilitas dari 118 pertemuan di 21 lokasi. Termasuk diantaranya 100 akun Webex yang digunakan dalam Presidensi G20 untuk pertemuan daring, server email G20 Indonesia.id untuk kepentingan semua rapat-rapat termasuk di working group. Selain itu, Menkominfo juga menyiapkan pembukaan terbatas untuk jaringan telekomunikasi seluler dan IMEI (International Mobile Equipment Identity) bagi delegasi dan tamu negara.





Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate didampingi pejabat eselon 1 dan 2 Kemkominfo memimpin langsung pertemuan Virtual Streamlining Isu Digital Forum G20 bersama pelaku industri nasional yang berlangsung secara hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021)



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan selama menjabat Presidensi, Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan internasional lain. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam isu digital, Menteri Johnny mengajak pelaku industri memberikan masukan. Kita akan melakukan serangkaian pertemuan, ada Ministerial Declaration, Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting, Digital Economy Ministers Meeting (DEMM)



Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG). Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh *working groups* dan *engagement groups*, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat memberikan sambutan pada acara Forum Tematik Menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 yang berlangsung secara Hibrida, di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021). Ia menyatakan kekuatan Indonesia dalam G20 Summit tahun depan terutama berkaitan dengan materi yang dibahas harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Tidak saja inward di dalam negeri, tetapi juga ke ranah internasional baik yang terkait dengan substansi Sherpa Track maupun Finance Track, Working Group hingga Engagement Group.



Sebagai *golden bridge* untuk *emerging nations*, Forum G20 akan menjadi tugas besar bagi Indonesia untuk menjembatani harapan seluruh rakyat negara *emerging*. "Keketuaan untuk pertama kali kepada *emerging countries* yang diwakili oleh Indonesia menjadi tugas besar bagi kita dan jembatan bagi harapan seluruh rakyat dari negara-negara *emerging*, tetapi tentu juga bersama-sama dengan negara besar dan negara industri, untuk memajukan kesejahteraan dunia secara menyeluruh," kata Menkominfo.



Sebagai penyelenggara G20, Indonesia harus mengedepankan prinsip inklusif dan kolaborasi, khususnya dalam menyampaikan pesan komunikasi publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan G20. Menkominfo mengatakan sukses komunikasi dapat memberikan kesan yang baik bagi peserta G20 dan masyarakat luas serta harus memberikan kesan yang indah dan optimisme bagi masyarakat dunia. Salah satu poin krusial adalah menyamakan persepsi lintas humas di pusat maupun di daerah, untuk membawa gaung presidensi G20 sampai ke masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional.

Kominfo Berbagi Buku: Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo

September 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) genap memasuki usia 20 tahun. Kiprah dan perjalanan panjang dalam membangun Indonesia dari perspektif komunikasi dan informatika tidak lepas dari karya nyata putra-putri terbaik bangsa yang diamankan menjadi bagian dari keluarga besar sejak kementerian ini lahir.

Menyambut 20 Tahun Kominfo saat Indonesia dan dunia dilanda pandemi Covid-19, Kementerian Kominfo hadir sebagai leading sektor yang memiliki peran penting dalam upaya memutus

mata rantai wabah Covid-19. Dari upaya menghadirkan ekosistem teknologi untuk memperkuat sektor kesehatan dan ekonomi hingga diseminasi informasi guna pencegahan berbagai disinformasi, malinformasi maupun hoaks. Kerja bersama dan bekerja bersama-sama adalah manifestasi yang terus digelorkan hingga memastikan wabah Covid-19 berakhir di bumi pertiwi.

Sekilas tentang peringatan 20 Tahun Kominfo, salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah Kominfo Berbagi Buku (KBB). Melalui Perpustakaan Kemkominfo, momentum dua

dekade itu segenap civitas berhasil menyumbang ribuan buku yang kemudian diberikan kepada masyarakat atau komunitas taman baca yang bergerak di bidang literasi di daerah pelosok atau wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Alasan memilih wilayah 3T sebagai tempat distribusi penyaluran buku karena alasan jangkauan dan akses informasi yang sulit.

Selama proses donasi buku, seluruh sivitas di lingkungan Kementerian Kominfo cukup memasukkan buku-buku yang ingin disumbangkan ke dalam DropBox yang sudah disediakan di ruang Biro Humas yang berlokasi





di gedung belakang A lantai 1 dengan batas waktu pengumpulan tanggal 21 September 2021. Atas inisiatif dan antusias bersama, terkumpul sebanyak 2.500 buku.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba saat puncak acara bertajuk "Syukur dan Refleksi 20 Tahun Kominfo" secara simbolis menyerahkan donasi buku kepada perwakilan dari dua lokasi yang terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku. Untuk Provinsi NTT disalurkan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Warbadi di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Sedangkan di Maluku disalurkan untuk Taman

Baca Nuhu Evav di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual (Kepulauan Kei), Provinsi Maluku. Selain di Provinsi NTT dan Maluku, donasi buku juga diberikan kepada Rumah Baca Bintang di Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) "Rumah Gunung" di Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban kepada para donatur buku, maka dikirimkan perwakilan yang akan menyerahkan donasi tersebut ke tempat-tempat yang dituju.

SDN Warbadi - Alor NTT

Berlokasi di Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor Provinsi NTT, akses menuju SDN Warbadi Desa Kaleb tidaklah mudah. Letaknya yang jauh di pelosok pulau Pantar yang dikategorikan sebagai bagian dari daerah 3T, menjadikan sekolah ini terpilih untuk mendapatkan donasi buku dalam peringatan 20 Tahun Kominfo. Penyerahan bantuan sebanyak 601 buku diberikan secara langsung oleh perwakilan panitia kepada Kepala SDN Warbadi Naema Salomi Lapenangga.

Kondisi sekolah dengan tenda darurat yang dipakai sebagai proses kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mengenyam pendidikan di daerah pelosok. Para murid terpaksa harus bertahan dengan fasilitas yang seadanya itu disebabkan sering diguyur hujan deras. Namun, pihak sekolah tetap optimis melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pahlawan tanpa tanda jasa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. SDN Warbadi sendiri didirikan pada tanggal 2 Mei 2012 dengan bangunan sekolah yang utuh. Namun beberapa waktu lalu, tepatnya 4 April 2021, seluruh bangunan nyaris dihantam badai dan tertutup oleh reruntuhan bebatuan.

SDN Warbadi kemudian menerima bantuan oleh Unicef melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa sumbangan tiga tenda. Sekolah ini memiliki 6 rombongan belajar dengan membagi setiap tenda menjadi dua rombongan belajar dengan jumlah 76 siswa disertai 8 pengajar, tiga diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan lima lainnya pegawai kontrak.



Bantuan lainnya diterima dari berbagai uluran tangan seperti dari Dinas Kesehatan daerah setempat, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk dari Kementerian Kominfo dan berbagai organisasi lainnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Kominfo, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi sumber belajar bagi siswa-siswi SDN Warbadi. Karena pada saat badai sebelumnya semua buku-buku pelajaran telah tertimbun oleh tanah maupun tertimbun oleh banjir, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Kominfo yang sudah sangat membantu siswa-siswi untuk memperoleh buku-buku bacaan dan buku pelajaran dan dapat memperoleh pengetahuan dari buku-buku tersebut," kata Kepala SDN Warbadi, Naema Salomi Lapenangga kepada perwakilan panitia Kominfo Berbagi Buku.

Naema Salomi mengatakan bahwa pihaknya juga menerima bantuan lain dari Kementerian Kominfo, baik berupa penyediaan jaringan dan akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

"Mudah-mudahan hubungan kedepannya antara SDN Warbadi dan Kominfo terjalin dengan baik, sehingga kedepannya bisa ada bantuan lain dan bisa memperhatikan walaupun kali ini dengan buku, mungkin di kesempatan lain bisa mendapatkan fasilitas lain juga yang diharapkan dan sangat berterima kasih kepada Kominfo yang telah menjalin hubungan baik," harapnya.



TBNE Kepulauan Kei - Maluku

Memegang amanat konstitusi negara bahwa pendidikan adalah hak bagi warga negara membuat beberapa pemuda asal Kepulauan Kei di dua pemerintah daerah yakni, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara merasa terpanggil melihat kondisi pendidikan di daerahnya. Mereka adalah para mahasiswa/l yang mengenyam pendidikan di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa khususnya di wilayah 3T, maka dibentuklah sebuah "Pusat Literatur" rakyat yang kemudian dinamakan Taman Bacaan Nuhu Evav atau yang disingkat TBNE pada 7 September 2012.

"Masyarakat di sini (Kepulauan Kei) nampaknya sangat kekurangan sumber-sumber ilmu pengetahuan seperti buku pelajaran, dongeng, cerita pendek dan semacamnya, hingga buku-buku yang menunjang proses pembelajaran mereka di institusi pemerintah (sekolah). ini terbukti dengan antusiasme mereka untuk membaca di tenda-tenda perpustakaan keliling yang kami adakan setiap hari di Kepulauan Kei (Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara) Provinsi Maluku," kata Susan Renel, salah satu inisiator TBNE.

Para pendiri pusat literatur itu memiliki tekad dan harapan yang sama, yakni generasi penerus daerahnya yang berada di pelosok negeri dapat merasakan fasilitas pendidikan layaknya yang anak-anak yang tinggal di kota-kota besar seperti fasilitas perpustakaan, museum, dan taman-taman bermain yang bertepatan sains.

"Dari keresahan inilah kami bertekad untuk membesarkan Taman Bacaan Nuhu Evav ini dengan melengkapi koleksi keputastakaannya dengan

buku-buku, gambar, video serta wahana-wahana pendukung dalam proses pembelajaran," harapnya.

Memiliki jumlah koleksi keputastakaan dan fasilitas yang masih sangat minim ketika pelaksanaan perpustakaan keliling di Kepulauan Kei, TBNE berharap hadirnya uluran tangan dari pihak-pihak yang dapat membantu dalam melakukan kegiatan literasi.

"Agar Taman Bacaan Nuhu Evav memberikan manfaat bagi masyarakat di Kepulauan Kei dengan menyumbangkan buku-buku atau sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya dan alat-alat pendukung untuk perpustakaan keliling yang menjadi fokus kami," ujarnya.

Mewakili pendiri TBNE, masyarakat dan pegiat literasi di Kepulauan Kei, Susan Renel menyambut baik dan berterima kasih kepada civitas Kementerian Kominfo yang telah mengumpulkan berbagai jenis buku bacaan yang kemudian disumbangkan kepada TBNE.

"September lalu, Taman Bacaan Nuhu Evav secara virtual menerima sumbangan buku dari Sekjen (Sekretaris Jenderal) Kominfo pada ulang tahun Kementerian Kominfo yang ke-20. Setelah melalui perjalanan panjang Jakarta-Tual, hari ini kami terima secara langsung sumbangan buku-bukunya," kata Susan Renel.

TBNE yang telah berkiprah selama 9 tahun itu telah banyak mendukung kegiatan literasi pada beberapa rumah baca atau taman bacaan di wilayah Kepulauan Kei dan Tanimbar melalui sumbangan buku dan pendampingan relawan. Sehingga dengan adanya bantuan buku dari Kementerian Kominfo turut menambah semangat para pendiri dan relawan untuk terus mengabdikan dirinya kepada daerah mereka.

"Buku-buku yang keluar dari TBNE kembali dengan cara yang berbeda, dan semesta selalu punya cara menjamin keberlangsungan niat baik bagi negeri. Terima kasih tak terhingga untuk Kementerian Kominfo RI," tuturnya.





Rumah Baca Bintang - Grobogan Jawa Tengah

Berawal dari seorang seniman dengan segudang prestasi baik lokal hingga nasional yang kerap menjadi story teller. Mas Yulianto, Demikian sapaan akrabnya di wilayah Grobogan Provinsi Jawa Tengah mendirikan pusat literasi yang diberi nama Rumah Baca Bintang. Mas Yulianto yang hobi mendongeng itu menjadi salah satu tokoh sekaligus pegiat literasi di daerahnya. Antusias masyarakat sekitar pun tak sedikit jumlahnya, ini artinya kesadaran akan pentingnya meningkatkan literasi sangat penting di tengah ancaman arus informasi yang kian berkembang.

Dengan segala tekad dan kreativitasnya, Mas Yulianto punya cara tersendiri menarik perhatian masyarakat khususnya anak-anak untuk mengunjungi Rumah Baca Bintang, sebut saja dengan cara menyiapkan beberapa masker lucu bagi anak yang sudah membaca buku di RBB. Mendapat dukungan dari keluarga, Yulianto semakin yakin meneruskan niat baik dan kontribusinya untuk menggiatkan literasi masyarakat Grobogan. Bahkan, tidak keberatan ketika kediamannya dijadikan rumah baca karena bersyukur banyak anak-anak yang kemudian berkunjung.

Sebagai putra daerah yang peduli terhadap lingkungannya, Yulianto telah menginisiasi berdirinya lima taman baca di Grobogan. Sehingga, sebanyak 577 buku dari Kementerian Kominfo yang didonasikan kepada RBB kemudian didistribusikan ke lima taman baca tersebut.

Sejumlah taman baca yang didirikannya itu memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda-beda, ada yang bernuansa islami, budaya dan lain-lain.

Lewat kegigihannya, sejak tahun 2015 aktivitas dan pergerakan Yulianto kemudian menjadi perhatian media sekitar.

“Kominfo sudah sangat luar biasa karena akses buku itu kan tidak semua orang bisa dapat, apalagi di daerah-daerah yang 3T. Jangankan daerah 3T, di Grobogan saja yang masih wilayah Pulau Jawa untuk dapat buku harus ke Semarang atau Solo. Harganya juga mahal, sedangkan pekerjaan orang tua di Grobogan kebanyakan adalah petani. Sehingga, jangankan untuk membeli buku, untuk kebutuhan sehari-hari pun terbatas. Tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dipungkiri, dengan adanya sumbangan buku dari Kemenkominfo ini sangat terbantu,” kata Yulianto.

Sebagai pendiri dan pemerhati minat baca, Yulianto berharap Kementerian Kominfo kedepannya kembali mengadakan kegiatan serupa yakni donasi buku bagi taman baca atau komunitas literasi yang membutuhkan.

“Di sini (Rumah Baca Bintang) masih pakai buku rak-nya dari kotak bekas telur yang ditata. Saya tidak berharap yang muluk-muluk, yang penting apabila dapat dukungan apapun akan kita terima dan syukuri,” ucapnya.





TBM “Rumah Gunung” - Purworejo Jawa Tengah

Taman baca atau institusi pendidikan lainnya yang mendapatkan donasi buku dalam merayakan 20 Tahun Kominfo lewat Kominfo Berbagi Buku adalah Taman Baca Masyarakat (TBM) “Rumah Gunung” yang berlokasi di Desa Pacekelan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah 567 dari berbagai jenis koleksi seperti fiksi, filsafat, pengetahuan umum, agama, novel, buku untuk anak-anak dan buku-buku di luar buku pelajaran serta jenis buku lainnya diterima secara simbolis oleh pengelola TBM dan dihadiri siswa/i dan para guru dari SDN 2 Pacekelan serta siswa/i dan guru dari SMK Batik Purworejo.

TBM Rumah Gunung merupakan perpustakaan umum yang juga berfungsi sebagai sumber penelitian, tempat diskusi dan wahana rekreasi. Dalam penyerahan donasi buku, Perpustakaan Kominfo mendorong tumbuhnya TBM Rumah Gunung agar menjadi sumber informasi bagi masyarakat setempat guna menunjang budaya kegemaran atau minat baca.

Mewakili pendiri TBM Rumah Gunung dan masyarakat setempat, Kepala Desa Pacekelan Mulyanto menyatakan, penambahan koleksi dari Kementerian Kominfo dapat meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak dan mampu bersaing dengan maraknya game online.

“Karena donasi buku dari Kementerian Kominfo ini dapat meningkatkan minat baca dan juga dipengaruhi pola pikir dan pengetahuan ilmu dari buku-buku yang dibacanya,” ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, Pengelola TBM Rumah Gunung Zhukhikmah Asobari menjelaskan terkait mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai petani, sehingga juga sangat membutuhkan buku-buku tentang informasi pertanian.

“Warga disini memanfaatkan dan sangat antusias membaca buku-buku yang ada di TBM ini, perpustakaan 24 Jam kapan pun warga membutuhkan, mau membaca di tempat atau membawa pulang sesuai misi menggiatkan budaya gemar membaca di Desa Pacekelan,” katanya.

Tim Penulis:
Ahmad Irso Kubangun
Meilawati





Sebagai salah satu pelaksana teknis Kementerian Kominfo di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Surabaya terus mendorong peningkatan skill dan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama di wilayah kerja yang meliputi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Salah satu upaya mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) tersebut dilakukan lewat Rumah Inovatif, sebuah bangunan 2 lantai milik BPSDMP Surabaya yang semula adalah guest house, yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat pelatihan dengan program unggulan "Maju Bersama di Rumah Inovatif" (MAMA RINA). Merupakan integrasi dari galeri Internet dan perpustakaan, Rumah Inovatif menjadi wadah untuk mendorong munculnya para inovator-inovator milenial.

Bersinergi dengan institusi pendidikan dan berbagai komunitas yang ada di Jawa Timur, BPSDMP Surabaya telah melatih lebih dari 10.000 peserta di Rumah Inovatif yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rumah Inovatif, Optimalkan Pengembangan SDM UMKM Surabaya

(UMKM), ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, guru Sekolah Dasar sampai Menengah, dan juga penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Tema pelatihannya pun beragam, mulai dari dasar pemanfaatan aplikasi perkantoran, pengenalan Linux, pemrograman web, animasi, teknik penulisan, microcontroller, sinematografi, desain grafis, pengenalan internet sehat pemanfaatan tools untuk riset pasar, hingga digital marketing untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitasnya di bidang e-commerce.

Animo masyarakat untuk mengikuti peningkatan literasi digital ini sangat tinggi, terlihat dari jumlah pendaftar yang selalu membludak dan tingginya permintaan pelatihan dari berbagai komunitas yang mengirimkan surat permohonan maupun datang langsung ke Balai Surabaya.



Permintaan pelatihan dari komunitas penyandang disabilitas yang menjadi pelaku UMKM juga terus meningkat seiring dengan transformasi digital sebagai dampak pandemi Covid-19. Sejak pertengahan tahun 2018, Balai Surabaya menaruh perhatian khusus pada penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan gratis peningkatan literasi TIK yang bertujuan untuk inklusi ekonomi digital. Tercatat hingga akhir 2021, sebanyak 30% peserta pelatihan berasal dari komunitas disabilitas di wilayah Jawa Timur.

Special

“Startup marketplace disabilitas Indonesia”

Special merupakan startup yang bergerak dibidang pemberdayaan disabilitas yang menyediakan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang berkebutuhan khusus yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Yang dapat di order oleh konsumen hanya melalui aplikasi ini. Juga terdapat informasi event yang bermanfaat untuk pemberdayaan komunitas berkebutuhan khusus.

(BPSDMP Surabaya, Desember 2021)

Siasati Keterbatasan dengan Kolaborasi

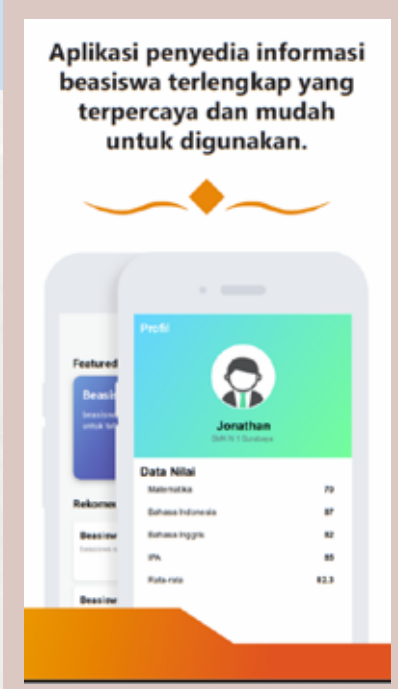
Dalam melaksanakan tugas fungsinya, BPSDMP Kominfo Surabaya seringkali mengalami fenomena tidak berimbangnya dana yang telah dialokasikan dengan tingginya permintaan pelatihan dari masyarakat. Kendala tersebut memicu kreativitas para personil Balai Surabaya untuk tetap memenuhi permintaan masyarakat dengan berbagai upaya, salah satunya dengan memperkuat sinergi antar komunitas masyarakat dan institusi pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang TIK yang diselenggarakan secara luring di Rumah Inovatif maupun secara daring, BPSDMP Kominfo Surabaya bekerja sama dengan para stakeholder yaitu Google Gapura Digital, Women Will, Relawan TIK, akademisi dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi, hingga komunitas TIK. Kolaborasi antar para stakeholder tersebut pun berdampak baik pada jumlah peserta pelatihan yang berhasil jauh melampaui target tiap tahunnya.

Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital Lewat DTS

Peningkatan kompetensi digital SDM di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat juga dilakukan lewat program pelatihan dan sertifikasi Vocational School Graduate Academy (VSGA). Sebagai bagian dari program Digital Talent Scholarship, VSGA menargetkan para lulusan SMK/ sederajat serta Diploma 3 dan 4 yang belum bekerja, serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan skema pelatihan.

Sejak tahun 2019, BPSDMP Kominfo Surabaya telah melaksanakan VSGA yang bertujuan untuk mendorong para peserta siap masuk ke industri dan untuk menciptakan lapangan kerja. Dari alumni VSGA Jawa Timur tahun 2019, telah terbentuk 17 startup yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, makanan, minuman, dan beberapa bidang lainnya.



Raih Penghargaan

Dalam pelaksanaan program DTS tahun 2019, BPSDMP Kominfo Surabaya mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kinerjanya dalam hal publikasi dan kerja sama untuk mensukseskan program DTS di Jawa Timur.

Kemudian di tahun 2020, BPSDMP Surabaya mulai menyelenggarakan Digital Entrepreneurship Academy (DEA), program yang bertujuan untuk mencetak Digital Entrepreneur (Digipreneur) baru. Bekerja sama dengan mitra global tech company, perguruan tinggi, dan startup lokal, DEA berhasil menarik minat masyarakat. Besarnya animo masyarakat akan pelatihan yang ini jauh melampaui target yang ditetapkan. Tercatat di tahun 2021, realisasi jumlah peserta yang telah mengikuti DEA sebanyak 4314, dari target 1550 peserta.



Pelaksanaan program DTS khususnya di wilayah Jawa Timur mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur dan beberapa Walikota dan Bupati di wilayah Jawa Timur, di antaranya Walikota Mojokerto, Bupati Magetan, Bupati Nganjuk, Bupati Bangkalan, Bupati Bondowoso, Bupati Malang, Bupati Jember, Bupati Banyuwangi.

Kolaborasi dengan Pemprov JATIM lewat program Millennial Job Center (MJC), program yang membentuk ekosistem baru dalam mempersiapkan dan mempertemukan talenta, mentor dan klien dalam rangka terciptanya peluang project/pekerjaan bagi para gig worker (freelancer) di Jawa Timur.



Dukung Program 10.000 Talenta Digital



BPSDMP Kominfo Surabaya turut mendukung pelaksanaan program 10.000 Talenta Digital, sebagai bagian dari upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan talenta digital Indonesia.

Tahun 2021 ini, BPSDMP Kominfo Surabaya telah bekerja sama dengan 3 kabupaten di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk program 10.000 Talenta Digital, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Lombok Tengah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika antara Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dengan Bupati Pamekasan, Bupati Magetan dan Bupati Lombok Tengah. Melalui Nota Kesepakatan ini diharapkan akan muncul para talenta digital yang bisa membantu daerah untuk pengembangan potensi daerah yang dikelola secara digital.



Tentang **BPSDMP**

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Komunikasi dan Informatika Surabaya merupakan unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dengan cakupan wilayah kerja Jawa Timur dan NTB. Tugas pokok BPSDMP Surabaya adalah melaksanakan pengembangan SDM dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 30 orang, BPSDMP Kominfo Surabaya dipimpin oleh Ibu Eka Handayani, SE., MM yang sangat berkomitmen pada pengembangan SDM dan

pemberdayaan ekonomi digital masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia, Balai Surabaya melaksanakan program literasi digital untuk masyarakat, dan sejak tahun 2018 turut andil dalam pelaksanaan Vocational School Graduate Academy (VSGA) untuk angkatan kerja muda yang merupakan bagian dari program Digital Talent Scholarship (DTS) Balitbang SDM Kementerian Kominfo.



Sekilas BBPPT 2021

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI Kemenkominfo yang melakukan pengujian perangkat telekomunikasi. Berlokasi di Bekasi, BBPPT telah terakreditasi dan mempunyai sekitar 50 ruang lingkup pengujian dan berperan sebagai laboratorium rujukan nasional.

Tidak berhenti sampai di situ, demi komitmen BBPPT dalam menjamin keselamatan kesehatan masyarakat, kualitas perangkat TIK lokal di tingkat internasional, serta harmonisasi antar perangkat TIK untuk meningkatkan user experience, pada tahun ini BBPPT telah siap melaksanakan menguji perangkat 5G.

Melalui acara Peresmian Pengujian Perangkat 5G Perdana di Indonesia yang digelar pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu, BBPPT menyatakan siap menguji perangkat 5G baik Base Station maupun Subscriber Station. Kesiapan pengujian tentu saja didukung oleh alat ukur

yang mumpuni, kompetensi SDM yang disiapkan dengan pengetahuan dan skill untuk, pengujian 5G,

sertifikat dan tarif sementara. BBPPT pada tahun ini berhasil membangun Lab SAR yang rencananya dapat digunakan di tahun 2022. Alih-alih sebagai sarana pendukung pengujian, pembangunan Lab SAR tersebut menjadi bukti nyata BBPPT dalam memenuhi komitmen menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.



Kehadiran teknologi baru seperti 5G menuntut BBPPT untuk terus berkembang dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan PT. Ericsson Indonesia. Dalam kesempatan Penutupan Pelaksanaan Uji Banding Pengujian Perangkat 5G tanggal 6 Desember 2021 lalu, BBPPT juga menyampaikan rencana serta permohonan dukungan perihal pembangunan laboratorium pusat pengujian TIK di Tapos.

Rencana tersebut disambut baik oleh PT. Ericsson Indonesia. Menurut President Director PT. Ericsson Indonesia, Mr. Jerry Soper, Indonesia merupakan pasar potensial di sektor telekomunikasi, oleh karena itu PT. Ericsson Indonesia sangat senang dan bangga untuk mendukung BBPPT karena kemampuan BBPPT sangat diperlukan dalam pengembangan teknologi di masa datang.



Setelah tahun 2020 lalu BBPPT berhasil mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di tahun 2021 ini BBPPT mengajukan diri untuk menjadi Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Dalam prosesnya, telah dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB sebagai TPN (Tim Penilai Nasional) namun sebelum itu dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Itjen selaku TPI (Tim Penilai Internal) dengan hasil akhir 89.11.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 24 November 2021 BBPPT telah resmi memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku dari tahun 2021-2024, dengan audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 November 2021.



Berbicara perihal akreditasi, BBPPT merupakan instansi yang memiliki akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi Bidang Telekomunikasi pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sejak tahun 2019 hingga saat ini BBPPT telah melakukan 3 kali kegiatan Uji Profisiensi. Pada tahun 2021 dilakukan Uji Profisiensi dengan ruang lingkup WCDMA 900 MHz dan diikuti oleh 6 laboratorium dari seluruh Indonesia.

Dalam rangka menciptakan budaya semangat bekerja, melayani dan mendukung pelanggan sehingga tercipta pelayanan prima, BBPPT juga senantiasa meningkatkan kompetensi para personelnnya dengan diadakannya Training Customer Service Excellence pada tanggal 6 – 8 Desember 2021. Program tersebut diharapkan dapat menunjang program BBPPT seperti WBK, WBBM dan Zona Integritas.

Prestasi lain yang tak kalah membanggakan yang diraih BBPPT dari sisi tata usaha dan keuangan adalah dengan meraih penghargaan Peringkat II terbaik dalam Penyusunan Laporan Keuangan sebagai UAPPA-W Tahun 2020 Kementerian Negara/ Lembaga pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.



Tak lama berselang, BBPPT kembali meraih penghargaan dari Menteri Kominfo sebagai peringkat I Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik pada tahun 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya personel ketatausahaan BBPPT dalam pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian proses pembukuan atas dokumen sumber untuk menghasilkan data transaksi BMN, laporan BMN, laporan manajerial lainnya. Penyampaian dokumen sumber dan pendukung secara lengkap ke petugas BMN akan menghasilkan data transaksi BMN yang akurat dan benar.

Langkah-langkah lainnya adalah berkoordinasi internal maupun sinergi dengan instansi lain seperti Setditjen SDPPI, Biro Keuangan Kominfo dan KPKNL Bekasi. Ketiga instansi tersebut aktif melakukan pembinaan dan pelatihan melalui undangan seperti workshop dan sebaliknya BBPPT juga secara intens melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan petugas yang menangani pengelolaan BMN.



Dengan pencapaian yang telah diraih BBPPT dari tahun ke tahun diharapkan dapat memotivasi BBPPT khususnya dan Kemkominfo pada umumnya untuk tetap bersinergi membangun Indonesia semakin maju, melesat dan semakin digital.



Varian Omicron Teridentifikasi di Indonesia, Menkominfo: Masyarakat Perlu Tingkatkan Kewaspadaan dan Jangan ke Luar Negeri saat Nataru

"Tujuannya adalah untuk mengendalikan Covid-19 saat nataru. Syarat-syaratnya akan diatur secara detil melalui Instruksi Mendagri. Saat ini disampaikan kepada masyarakat lebih awal adalah bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga dalam situasi pengendalian kita bagus, tetapi tujuannya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga agar tidak euphoria dan tidak membuka ruang baru terjadinya penularan," tegasnya.

M

enteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus varian Omicron yang telah teridentifikasi di Indonesia.

"Hari ini kita ketahui pemerintah rilis temuan omicron yang punya kemampuan penyebaran tinggi. Karenanya, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk jangan dulu bepergian ke luar negeri selama liburan natal dan tahun baru (nataru)," imbaunya dalam webinar HUT KE-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan tujuan dari aturan yang dibuat Pemerintah bukan untuk melarang masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru, melainkan untuk mengendalikan Covid-19.

Menurut Menkominfo, langkah tersebut dilakukan guna mengurangi penyebaran varian Omicron yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, dia juga mengingatkan seluruh warga untuk tidak boleh lengah dan senantiasa menjaga kedisiplinan diri dalam menaati protokol kesehatan

"Saya tidak bosan-bosannya ingin menyampaikan bahwa masyarakat kita bersama Pemerintah di bawah *leadership* Presiden Joko Widodo, cukup sukses untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Tentu, termasuk peran rakyat dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi, inilah pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan). Kita, pada posisi yang sudah sangat landai dan ini harus yang menjadi tugas kita bersama tidak boleh lengah dan menjaga agar kita bisa memasuki tahapan endemi dari pandemi Covid-19," ajaknya.

Dengan adanya imbauan itu, Menteri Johnny meminta masyarakat untuk menaati aturan pengetatan yang telah dibuat Pemerintah.

"Supaya jangan juga dilakukan sebelum atau setelahnya. Karena tujuannya bukan melarang merayakan, jadi kita tentu berharap dengan ini disampaikan lebih awal agar masyarakat mulai bersiap-siap mengisi perayaan Natal dan Tahun Baru secara tertib agar perayaan itu nanti tidak menjadi cluster baru," ungkapnya.

Lebih dari itu, kesadaran seluruh pihak

untuk mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang lebih tinggi dan gelombang tiga Covid-19 saat Nataru.

“Jangan mengulangi kesalahan yang sama, agar aman Covid-19. Lebih baik di rumah saja. Namun seandainya memang harus bepergian, pastikan kita sehat, taati seluruh aturan pengetatan Nataru, pergunakan PeduliLindungi dengan baik, dan jangan lupa perketat proses,” tutur Menteri Johnny.

Fokus Pemerintah untuk Akselerasi Vaksinasi

Pemerintah, lanjut Menkominfo, berkomitmen tetap berfokus menjaga situasi penanganan pandemi secara berkelanjutan. Hal ini guna memastikan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada tahun depan dapat berjalan lancar.

“Dua situasi ini yang akan menjadi titik krusial kita ke depan. Karenanya, harus kita kendalikan betul-betul agar tidak menjadi cluster baru gelombang berikutnya. Di saat yang bersamaan, dalam rangka pencegahan Covid-19 ini, harus kita ikuti protokol kesehatannya secara tertib dan disiplin, akselerasi serta percepatan vaksinasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah karena ada target yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

Bahkan, Menkominfo mendorong masyarakat segera melengkapi akselerasi vaksinasi, karena vaksin menjadi benteng kekebalan kelompok yang harus segera dikuatkan. Terbaru, Pemerintah melakukan otorisasi penggunaan vaksin Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun.

“Vaksinnya cukup, saat ini Pemerintah sudah melakukan otorisasi untuk pemanfaatan penggunaan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun dan telah mengambil keputusan juga untuk mengimpor, khususnya vaksin Sinovac yang sudah memenuhi syarat di Indonesia untuk diberikan vaksinasinya bagi para anak-anak kita. Untuk secara disiplin kita lakukan secara akseleratif karena begitu pentingnya,” ujarnya.

Pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat Nataru diharapkan dapat menjaga momentum penanganan pandemi di Indonesia yang berjalan dengan cukup baik.

“Caranya, bukan dengan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada Imendagri yang secara khusus disiapkan bagi aktivitas masyarakat dengan tetap mengendalikan atau mewaspadai Covid-19. Apalagi, di tahun depan Indonesia akan melaksanakan G20. Kita tidak berharap sama sekali terjadi cluster baru, tidak berharap terjadi gelombang baru, kita harus mengendalikan dengan benar karena itu momentum besar dan opportunity yang luar biasa untuk Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun 2022,” ungkapnya.

Menteri Johnny menilai, kondisi di berbagai negara yang kembali mengalami lonjakan kasus seperti di negara-negara di Eropa dan Amerika harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan.

“Di tingkat dunia kita saksikan sama-sama, Eropa, Amerika, saat ini terjadi gelombang baru di mana penularan itu begitu besar walaupun mereka sudah melakukan vaksinasi secara massal dengan besar-besaran, namun penularan itu ada. Pemerintah menyampaikan lebih awal imbauan ini, tetapi jangan disiasati untuk melakukan liburan sebelum tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari,” paparnya.

Menkominfo juga mengingatkan, pada saat penularan itu ada, untuk Indonesia sendiri tentunya akan menyita banyak perhatian seluruh elemen. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengimbau masyarakat untuk tidak perlu terjebak dalam euforia dan harus tetap berhati-hati.

“Secara khusus akan menyita APBN yang luar biasa besar. Presiden juga terus mengingatkan, kita perlu membangun optimisme namun dengan tingkat kehati-hatian,” ujarnya.



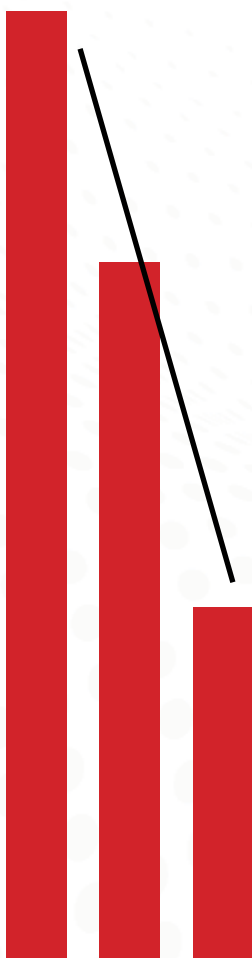
Aturan Perjalanan

Berkaitan dengan pertanyaan masyarakat menyoal apakah nantinya mereka bisa melaksanakan ibadah dan merayakan malam pergantian tahun, hal itu dapat diketahui melalui penjelasan Menkominfo dalam dialog Primetime News Metro TV, di Jakarta Barat, Jumat (19/11/2021) malam.

Dalam penjelasannya, Menkominfo menyatakan masyarakat tetap boleh beribadah dan merayakannya, tetapi ada syarat yang harus dipatuhi.

“Salah satu di dalamnya, misalnya nanti perlu beribadah enggak? Tetap boleh beribadah, tetapi ada syaratnya. Perlu melakukan kegiatan Natal dan Tahun Baru? Boleh itu dilakukan, tetapi ada syaratnya. Syarat-syaratnya diatur sedemikian detil sehingga untuk yang beribadah tetap bisa dilakukan, tetapi pengendalian Covid-19 tetap kita lakukan,” jelasnya menjawab pertanyaan dari *newsanchor* dalam acara yang bertepatan “Antisipasi Lonjakan Covid-19 Libur Nataru.

PENGENDALIAN



Atas nama Pemerintah, Menkominfo menyampaikan apresiasi kepada kegotongroyongan masyarakat yang telah membantu upaya Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

“Kerja kolaborasi, kerja gotong royong pemerintah dan masyarakat bersama-sama, sehingga kita bisa sampai pada kondisi sekarang cukup berhasil di dalam pengendalian pandemi Covid-19. Keberhasilan ini harus kita pertahankan karena pengendalian Covid-19 ini akan menentukan keberhasilan kita di sektor yang lain, termasuk di sektor pemulihan ekonomi,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Johnny menjelaskan bahwa dari hasil telaah dan informasi yang diperoleh, gejala yang ditimbulkan varian Omicron terpantau relatif lebih ringan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kita tidak boleh lengah.

Terlebih, varian tersebut dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja. Oleh karena itu, dia meminta para remaja harus berhati-hati, jangan sampai menjadi

orang tanpa gejala yang justru menyebarkan virus Omicron.

Di sisi lain, Menteri Johnny mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini, lanjutnya sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang meminta seluruh instrumen pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi WHO yang mendorong percepatan vaksinasi.

“Saat ini, cakupan vaksinasi di Indonesia adalah 68,90% untuk dosis pertama dan 48% untuk dosis kedua, dari seluruh target sasaran vaksinasi nasional. Karenanya, saya terus mengajak masyarakat segera mengambil bagian aktif dalam upaya percepatan vaksinasi,” ajaknya.

Aturan Perjalanan

Dalam protokol Nataru tersebut terdapat sejumlah aturan pengetatan, tetapi tidak akan ada kebijakan penyekatan. Adapun, pengetatan tersebut akan melingkupi tiga regulasi utama yang akan diatur dalam Inmendagri.

Pertama, perjalanan hanya boleh

dilakukan oleh warga yang sudah divaksin lengkap. Johnny mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi atau melengkapi vaksinnya hingga dua kali, karena warga yang belum lengkap vaksinnya dilarang bepergian. Demikian juga mereka yang sedang sakit, diharapkan tidak bepergian.

Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak diperbolehkan. Namun, ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas yang diatur, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Ia juga menyebutkan bahwa pemanfaatan ibadah secara digital juga dapat dilangsungkan.

Ketiga, olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan restoran dan mall tetap buka dengan kapasitas 75%. Pemerintah juga tetap melakukan pengetatan di pintu masuk negara, untuk mencegah pelaku perjalanan luar negeri masuk bersama virus Omicron. Bagi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan karantina selama 10 hari.

"Ini tentu dengan maksud agar kita bisa mengendalikan agar jangan sampai Omicron masuk ke Indonesia," tutur Menteri Johnny.

Diakui Negara Lain

Menyambung pernyataan Menkominfo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan secara umum kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia telah ditangani dengan baik, bahkan mendapat apresiasi dari negara luar. Meski begitu, supaya tidak adanya lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19, Pemerintah menyeregamkan keputusan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku pada PPKM level 3 sebelumnya di seluruh Indonesia.

"Hal itu sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Kami (pemerintah) terapkan kembali berdasarkan pengalaman yang diadopsi dan diyakini sebelumnya bahwa setiap ada pergerakan orang di saat libur panjang, maka itu pasti

COVID-19

diikuti dengan kenaikan kasus, bahkan sangat ekstrim," paparnya dalam acara yang sama.

Bahkan, kata Menteri Muhadjir Effendy, negara-negara lain mengakui kondisi Indonesia sangat bagus terhadap penanganan pandemi.

"Jadi sebetulnya kondisi kita saat ini sudah cukup baik dalam penanganan dan pemulihan kondisi pandemi, tetapi dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus saat libur nataru, kita perlu menerapkan aturan pengetatan dan diambil dari aturan yang sudah ada sebelumnya yaitu PPKM Level 3," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam membuat relugasi libur nataru, Pemerintah telah mempertimbangkan untuk tidak membuat aturan baru.

"Misalnya karena penyusunan dan sosialisasi yang butuh waktu, tentu ini merepotkan. Jadi, kita ambil saja apa yang sudah diberlakukan sebelumnya di seluruh Indonesia. Gambaran besar dari aturan pengetatan itu seperti apa? Secara regulasi itu akan di-update periodik oleh Pemerintah, kemudian diteruskan lewat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri," tutur Menteri Muhadjir Effendy.

Menko PMK Muhadjir menambahkan, pengumuman berkala akan disampaikan melalui SE Mendagri karena masalah penanganan Covid-19 ini merupakan urusan konkuren, sehingga bukan hanya Pemerintah Pusat tetapi justru Pemerintah Daerah yang harus banyak mengambil inisiatif.

"Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, di-update setiap 2 minggu sekali dan dari edaran Mendagri itulah kemudian ada produk turunan aturan yang lebih teknis di masing-masing kementerian dan lembaga yang sifatnya sangat dinamis tergantung kepada kondisi level dari masing-masing daerah. Jadi karena nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerumunan besar, maka pemerintah juga akan melarang masyarakat, memperkecil peluang liburan nataru dan pawai atau sejenisnya, serta membatasi tempat ibadah," imbuh Menko PMK. (hm.ys)

Tahun 2021 Menjadi Pembelajaran Penting Hadapi Pandemi COVID-19

S

Sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Diawali dengan lonjakan pertama pada Januari, yang diikuti lonjakan kedua pada Juli lalu, hingga Desember saat ini kasus terkendali. Patut disayangkan, akibat lonjakan tidak sedikit masyarakat harus kehilangan kerabat, keluarga hingga sanak saudara.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, mengajak masyarakat melihat kilas balik penanganan pandemi di Indonesia di tahun 2021 agar dapat menjadi pembelajaran dan korban tidak terus bertambahnya di hari depan. Sehingga Indonesia terbebas dari pandemi dan mencapai Endemi COVID-19 di tahun 2022.

"Sudah sepantasnya kita bersama-sama memetik pelajaran penanganan pandemi satu tahun ini, terutama sebagai pondasi dalam memantapkan langkah bersama menuju 2022 yang produktif aman COVID-19," ujarnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/12/2021).

Jika melihat kembali kasus positif, tahun ini terjadi 2 kali lonjakan. Yang pertama dimulai pada akhir 2020, dan terus meningkat mencapai puncaknya pada 25 Januari 2021. Lonjakan ini berhasil diturunkan selama 15 minggu berturut-turut.

**“
jika kita bisa mencapai 100% penurunan dari puncak kasus tertinggi tersebut atau 0,4% lagi, maka tidak ada lagi penambahan kasus positif dan kita dapat bebas dari COVID-19**



Saat itu, lonjakan diatasi berbarengan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Posko pada tiap desa/kelurahan. Dampak kebijakan ini, kasus menurun hingga 70,5% dari puncak kasus pertama, dan mencapai titik kasus terendah pada pertengahan Mei.

Selanjutnya, lonjakan kedua puncaknya pada bulan Juli. Penyebabnya varian Delta yang diberi peluang menular akibat

tingginya mobilitas selama periode Idul Fitri 2021. Kasus melonjak signifikan hingga mencapai puncaknya sebesar 1200% dari titik terendah pada bulan Mei, hanya dalam waktu 9 minggu. "Kebijakan peniadaan mudik saat itu, nyatanya tidak cukup menurunkan mobilitas penduduk," lanjutnya.

Kendati demikian, berkat usaha keras seluruh pihak khususnya peran aktif masyarakat, lonjakan kedua berhasil



Photo by Mufid Majnun on Unsplash

ditangani dan hingga saat ini telah turun selama 23 minggu berturut-turut. Terlebih lagi, kasus diturunkan hampir 100% yaitu 99,6% atau angka ini jauh lebih rendah dibanding penambahan kasus positif pada Januari lalu, bahkan lebih rendah dibanding periode sebelum lonjakan pertama.

"Artinya, jika kita bisa mencapai 100% penurunan dari puncak kasus tertinggi tersebut atau 0,4% lagi, maka tidak ada lagi penambahan kasus positif dan kita dapat bebas dari COVID-19," tegas Wiku.

Selaras dengan itu, perkembangan baik juga pada persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, dan jumlah kematian. Pada persentase kasus aktif sempat mencapai puncaknya pada lonjakan kedua hingga sebesar 18,84%. Dibandingkan saat ini, persentasenya 0,11%. Sementara

persentase kesembuhan, sempat menyentuh angka terendah yaitu 79,28%. Tetapi kini berhasil ditingkatkan kembali hingga sebesar 96,51%.

Tak kalah penting ialah angka kematian. Sejak awal pandemi hingga kini ada 144.063 kasus meninggal akibat COVID-19. Tahun ini, angka kematian harian sempat mencapai titik tertinggi saat lonjakan kasus kedua, yaitu merenggut 2.048 jiwa per hari. "Ini adalah angka yang sangat besar. Di dalamnya mungkin saja terdapat sanak saudara dan orang-orang tercinta kita yang turut berpulang akibat virus ini," imbuh Wiku.

Namun kini, angka kematian harian sudah ditekan hingga sekecil mungkin. Data per 27 Desember, kasus harian telah turun drastis menjadi 8 orang per hari. Bahkan, angka harian ini pernah mencapai

angka terendah yaitu 1 kematian dalam sehari per 28 November lalu. "Meskipun angka kematian sudah berhasil ditekan, nyawa tetaplah nyawa yang tidak tergantikan meskipun hanya satu saja orang meninggal," lanjutnya.

Perkembangan baik selanjutnya angka positivity rate, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya orang yang terdeteksi positif dari keseluruhan orang yang dites. Kondisinya saat ini cukup baik di angka 0,07%. Meski sebelumnya pada puncak kedua angka ini sempat mencapai 33,25%.

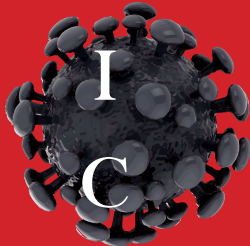
Lalu, angka testing. Pada akhir tahun ini, jumlah angka testing didominasi masyarakat yang berkepentingan skrining seperti untuk syarat perjalanan. Hal ini menunjukkan kebijakan testing sebagai syarat perjalanan efektif mendukung aktivitas masyarakat



ANTARA FOTO/M Ibu Chazar/aww.

O

M



R

O

N



yang produktif aman COVID. Sehingga dapat menghindarkan penularan antar wilayah. Meskipun demikian, di tahun depan, angka testing patut ditingkatkan dengan cakupan orang yang dites untuk tracing kontak erat dan testing pada orang bergejala.

Untuk itu, adanya pencapaian baik tersebut tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Apalagi, karakteristik Indonesia yang merupakan negara luas dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Namun dengan upaya keras yang dilakukan bersama akhirnya penanganan berangsur membaik.

Beberapa upaya yang dilakukan pada tahun ini seperti peningkatan jumlah tempat tidur RS rujukan, laboratorium rujukan, fasilitas isolasi terpusat, serta posko tingkat desa/kelurahan. Rinciannya, upaya pertama, pada tempat tidur ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan. Awal tahun 2021, total ada 45 ribu



tempat tidur, saat ini meningkat 2 kali lipat hingga 81 ribu. Jika dilihat angka keterisian tempat tidur (BOR), BOR isolasi keterisiannya 2,24% dan BOR ICU 3,88%.

Kedua, jumlah laboratorium rujukan COVID-19. Pada Januari 2021, jumlahnya ada 510 laboratorium. Dibandingkan saat ini jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat atau 902 laboratorium. Terlebih, persentase testing dari laboratorium ini sudah jauh melebihi target testing WHO yaitu sebesar 503% dibandingkan awal tahun lalu sebesar 85%. "Bahkan, saat ini kita memiliki lebih dari 23 ribu fasilitas pemeriksa antigen yang tersebar di seluruh Indonesia," tambah Wiku.

Ketiga, tempat tidur isolasi terpusat. Per Juli 2021, ada 20 ribu tempat tidur isolasi terpusat yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas ini siap dan fleksibel diaktifkan kembali sewaktu-waktu dibutuhkan.

Keempat, jumlah posko desa/kelurahan. Posko ini alat pengawasan hingga di tingkat terendah di seluruh wilayah di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, pembentukannya mencapai 29 ribu posko. Artinya, 35,81% dari total desa/kelurahan di Indonesia telah memiliki posko. Angka ini tentunya masih harus terus ditingkatkan, mengingat posko merupakan garda terdepan penanganan di tingkat mikro.


Dengan daya dan upaya yang dimiliki Indonesia, menunjukkan kemampuan adaptasi, kesigapan dan resiliensi seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan pandemi. Ini menjadi modal penting Indonesia untuk terus bertahan melawan tantangan pandemi yang dinamis, termasuk varian Omicron saat ini, bahkan membawa Indonesia keluar dari pandemi di masa yang akan datang.

Karenanya, dengan memahami kilas balik dapat menjadi pengingat bahwa lonjakan kasus adalah hal yang mudah terjadi apabila lengah. Terlebih pula terdapat faktor-faktor lain yang lebih sulit kita kendalikan, seperti munculnya varian baru. Yang perlu diperhatikan, ketika sudah terjadi lonjakan kasus membutuhkan waktu lebih lama menurunkannya. Kilas balik ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa betapa besar dampak lonjakan kasus, terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Mempertahankan kasus agar tetap rendah dan mengendalikan kenaikan kasus sedini mungkin masih harus menjadi fokus utama kita di tahun yang akan datang," pungkas Wiku.

Sumber: Dikutip sepenuhnya dari situs covid19.go.id

<https://covid19.go.id/p/berita/tahun-2021-menjadi-pembelajaran-penting-menghadapi-pandemi-covid-19>



Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun peta jalan atau Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Text: Indra Kusuma

Foto: Indra Kusuma & BAKTI





Memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, Pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet. pembangunan infrastruktur digital yang massif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.









Disektor ekonomi digital, pemerintah memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa *onboard go digital*, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangsa Buatan Indonesia.



Terima Penghargaan Best Ministers, Menteri Johnny Apresiasi Kerja Sama Tekan Penyebaran Covid-19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima penghargaan kategori *Best Ministers* dalam *Obsession Awards* Tahun 2021. Penghargaan itu diberikan atas prestasi dalam mengembangkan layanan publik di tengah pandemi Covid-19. Menkominfo mengapresiasi kerja sama seluruh pihak dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Malam ini kita menyaksikan Penganugerahan *Obsession Awards* tahun 2021 yang diberikan kepada *achievers* pria maupun wanita, korporasi maupun institusi publik yang telah berhasil mengukir prestasi-prestasi luar biasa di tengah pandemi Covid-19," ujarnya dalam *Obsession Awards* 2021, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (17/12/2021) malam.

Lestarkan Budaya, Kominfo Dukung Kolaborasi Digitalisasi Tiga Aksara Nusantara

Tiga aksara Nusantara Sunda, Jawa, dan Bali mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar itu diberikan untuk pembakuan papan tombol (*keyboard*), font dalam perangkat digital serta transliterasi dengan NSG.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung kolaborasi digitalisasi aksara nusantara sebagai upaya pelestarian budaya. Inisiatif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang dimulai Januari Tahun 2021 itu juga mendapatkan dukungan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan bahasa, universitas serta komunitas penggiat aksara.

"Digitalisasi telah menjadi jembatan untuk menyaksikan konvergensi budaya yang dibawa oleh masing-masing penggunaannya dengan tingkat penggunaan ruang digital yang semakin tinggi. Setiap penggunaan ruang digital di Indonesia memiliki peranan dalam melestarikan budaya nusantara," tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Slamet Santoso dalam Selebrasi Digitalisasi Aksara Nusantara di Kuningan, Jakarta Selatan Selasa (14/12/2021).



Apresiasi Inisiatif DPD RI, Menkominfo: Perkuat SPBE Perlu Payung Regulasi

Pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Salah satu langkah yang diambil dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini penyelenggaraan SPBE atau e-government sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, namun masih terkendala dengan penerapan yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Daerah RI merumuskan payung hukum dalam penerapan *e-government* di Indonesia.

"Gagasan untuk meningkatkannya di level Undang-Undang sebagai payung hukum ketentuan *e-government*, tentu disambut dengan baik. Rumusan payung hukum yang lebih *affirmative* atau lebih tinggi akan menjadikan tata kelola *e-government* lebih baik," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengenai RUU SPBE, yang berlangsung secara hibrida dari Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (01/12/2021).



Pemerataan Akses Infrastruktur Digital, Pemerintah Targetkan Satu Desa Satu BTS di Papua

Pemerataan akses infrastruktur digital di Papua menjadi perhatian Pemerintah untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan satu unit *Base Transceiver Station* (BTS) di setiap desa di Papua.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif menegaskan Pemerintah memberikan perhatian khusus dengan membangun infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi agar mempermudah akses masyarakat.

"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada 3 Agustus 2020 lalu, salah satunya terkait dengan penyelesaian persoalan infrastruktur dengan percepatan transformasi digital," ujarnya dalam Peresmian BTS 4G BAKTI Desa Sawyatami, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua yang berlangsung secara hibrida dari Jakarta Selatan, Selasa (07/12/2021).

Cetak Talenta Digital, Menteri Johnny: Jadikan STMM Center of Digital Excellent

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta perlu menghadirkan lebih banyak lagi program studi yang dapat melahirkan talenta digital nasional.

"Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo STMM perlu hadir dengan program-program studi yang berorientasi terpenuhinya kebutuhan talenta digital. (Menjadi) sebuah institusi perguruan tinggi yang berperan sebagai *center of digital excellent*," ujarnya dalam Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana dan Sarjana Terapan STMM Periode I Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, dari Jakarta, Rabu (08/12/2021).



Perkuat Pesan Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny: Kominfo Sediakan Portal g20.org

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Momentum itu ditargetkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Melalui tema *Recover Together, Recover Stronger*, Presiden mengharapkan Presidensi G20 Indonesia memberikan semangat baru untuk mewujudkan tatanan dunia. Kementerian Kominfo juga menyediakan portal informasi yang bisa digunakan sebagai referensi Keketuaan Indonesia dalam Forum G20.

"Malam ini Indonesia mencatat sejarah baru, di mana Bapak Presiden mengawali keketuaan dalam G20. Persiapan hari ini saya kira cukup bagus, dihadiri oleh banyak media-media asing dan nasional. Kita harapkan betul pesan kunci dari Presidensi Indonesia, yaitu *Recover Together, Recover Stronger*, itu bisa diamplifikasi dengan baik, agar dipahami oleh masyarakat Indonesia serta dunia," ungkapnya usai gelaran G20 Indonesia Presidency 2022 *Opening Ceremony - Recover Together, Recover Stronger*, yang berlangsung hibrida dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (01/12/2021).



Konektivitas, SDM, dan Arus Data Menjadi Isu Utama Indonesia Dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20

Kemajuan teknologi digital telah banyak mendorong pertumbuhan dan perkembangan aktivitas masyarakat di berbagai sektor, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa disrupsi teknologi digital juga semakin memperlihatkan kesenjangan digital/digital *divide*, terutama dari segi akses konektivitas, kecakapan digital masyarakat, maupun utilisasi data lintas batas.

Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia juga mendapatkan kepercayaan sekaligus tanggung jawab lebih sebagai pengampu *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang pertama, pasca-elevasi dari *Digital Economy Task Force* di masa Presidensi sebelumnya yang dipimpin oleh Italia.

"Elevasi *Digital Economy Task Force* menjadi *Digital Economy Working Group* telah menjadikan DEWG sebagai platform yang membahas isu-isu ekonomi digital dengan amanat yang lebih besar sekaligus memungkinkan diskusi yang lebih komprehensif tentang isu-isu digital lintas sektoral di bawah G20," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Mira Tayyiba, selaku Chair/Ketua G20 DEWG dalam Pertemuan Pertama Sherpa G20 pada 7 Desember 2021 lalu di Jakarta.



Gandeng Manggarai Barat, Kominfo Targetkan 20.000 Warga NTT Jadi Talenta Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan talenta digital. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menjelaskan kerja sama penyelenggaraan Program *Digital Talent Scholarship* itu menargetkan 20.000 warga NTT bisa lebih cakap digital hingga tahun 2024.

"Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diminta Menkominfo Johnny G. Plate agar bisa meningkatkan talenta digital warga NTT terkait literasi digital, talenta digital, dan digital *leadership*. Total keseluruhan ditargetkan sebanyak 20.000 orang di NTT. Khusus tahun 2022, untuk Manggarai Barat ditargetkan 5.000 orang," tuturnya usai Penandatanganan MoU Kerja Sama Balitbang SDM Kementerian Kominfo dengan Pemkab Manggarai Barat untuk Pelaksanaan Program DTS Tahun 2022, di Ayana Hotel, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/12/2021).

Percepat Bangun BTS 7.904 Lokasi, Kominfo Terapkan Terobosan Pinjam Pakai Lahan

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T. "Target kita ke depan membangun (BTS di) 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi," ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus mendorong penerapan dan pengembangan kota cerdas melalui Gerakan Menuju Smart City. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, keberadaan smart city di Indonesia akan menjawab tantangan kependudukan yang diproyeksikan pada tahun 2045 sebanyak 82,37% populasi akan hidup di pusat perkotaan. Tahun 2021, Kementerian Kominfo juga mengembangkan smart city menjangkau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

“Ini terjadi urbanisasi, untuk itulah diperlukan strategi pengembangan kota yang akomodatif terhadap perkembangan zaman, dan pengembangan kota cerdas atau smart city melalui Gerakan Menuju Smart City menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kita bersama, yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo,” ujarnya dalam Indonesia Smart City Conference, Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pameran Smart City, di ICE BSD Tangerang, Selasa (14/12/2021).

Jawab Tantangan Kependudukan, Menkominfo: Pengembangan Smart City Jangkau DPSP



Menteri Johnny Dorong Pemanfaatan Platform Digital untuk Perluas Eksistensi Kolintang

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menaruh perhatian serius terhadap eksistensi dan segmentasi musik tradisional asli Indonesia Kolintang. Menurutnya, generasi milenial dan seluruh ekosistem masyarakat perlu memanfaatkan layanan digital untuk mengenalkan musik tradisional ke mancanegara.

“Sebagaimana peluang hilirisasi digital atau sektor digital lain, potensi layanan digital dapat juga dimanfaatkan untuk memperluas eksistensi dan segmentasi penggemar musik kolintang, melalui berbagai platform digital yang ada dan tumbuh secara baik di Indonesia,” ujarnya dalam Grand Final Lomba Virtual Kreativitas Kolintang Kominfo 2021, di Kantor Pusat RRI, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2021).



Aptika Dorong Penggunaan Identitas Digital untuk Tingkatkan Ekonomi

Jakarta, Ditjen Aptika – Pandemi Covid-19 telah membuat percepatan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Ditjen Aptika mendorong akselerasi penggunaan identitas digital melalui kajian dan regulasi.

“Ditjen Aptika sedang melakukan kajian tentang identitas digital, karena kita yakin ke depannya identitas ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi digital,” kata Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Milikta Jaya Sembiring dalam acara Fintech Talk Jumat (12/11/2021).

Untuk mendorong peningkatan tersebut, lanjut Milikta, Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika telah menyiapkan tiga hal. Peningkatan implementasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi jajaran pemerintah, tapi juga non pemerintah. “Ada tiga hal yang telah disiapkan oleh Kemkominfo saat ini, yaitu kerangka regulasi, membangun ekosistem, dan inovasi teknologi,” jelas Milikta.

Tingkatkan Daya Saing Produk Indonesia, GNBBi jadi Titik Penting Bangkitkan Bisnis UMKM

Jakarta, Ditjen Aptika – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program yang menjadi titik penting bagi kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah derasnya arus digitalisasi.



“Melalui program GNBBi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia lewat stimulus pelatihan ataupun pendampingan aktivitas bisnis UMKM ke ruang digital,” tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan dalam Seminar Daring Adaptasi Teknologi Digital untuk Memperluas Pasar Digitalisasi UMKM Menembus Lintas Batas Pemasaran, dari Jakarta, Rabu (17/11/2021).



STB Gratis bagi Masyarakat Miskin Dibagikan Paling Lambat 2 November 2022

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, menyatakan pemerintah menyiapkan sebanyak 6,7 juta *Set Top Box* (STB) bagi warga yang masuk dalam kategori miskin. Pembagian alat ini kepada kategori tersebut akan dilakukan sesuai dengan tahapan Analog Switch Off (ASO) yang paling lambat pada 2 November 2022.

"Untuk STB ini yang sedang kita siapkan agar 6,7 juta itu tersedia pada waktunya sesuai dengan tahapan ASO paling lambat 2 November 2022," ujar Menkominfo Johnny Gerard Plate yang dikutip melalui siaran persnya pada Selasa (16/11/2021).

Aptika Siapkan Tiga Infrastruktur SPBE untuk Fasilitasi Aplikasi Umum

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika telah menyiapkan tiga infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung pengembangan aplikasi umum. Aplikasi seperti SP4N-LAPOR dan Srikandi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Ditjen Aptika telah menyiapkan tiga infrastruktur SPBE, yaitu Pusat Data Nasional (PDN), Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Diharapkan melalui fasilitas tersebut, keterkaitan antar aplikasi umum sudah mulai bisa dikembangkan," kata Sekretaris Ditjen Aptika, Slamet Santoso saat Webinar Transformasi Digital, Kamis (18/11/2021).

10 HOAKS TERVIRAL DESEMBER 2021



1 [HOAKS] Surat Edaran Daftar Aplikasi Ilegal yang akan Diblokir Mengatasnamakan Kementerian Kominfo

Beredar sebuah gambar mengatasnamakan Kementerian Kominfo yang menuliskan daftar nama platform atau aplikasi yang akan diblokir atau ditutup aksesnya karena platform atau aplikasi tersebut tidak memiliki izin alias ilegal.

Faktanya, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan bahwa Kementerian Kominfo tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai pemutusan akses internet terhadap platform atau aplikasi seperti yang disebutkan pada informasi yang beredar tersebut.

2 [HOAKS] Pfizer dan WHO Bekerjasama Memunculkan Varian Covid-19 Omicron sebagai Hukuman untuk Afrika Selatan

Beredar sebuah narasi di media sosial memuat informasi bahwa Pfizer dan WHO bekerjasama memunculkan varian Omicron sebagai hukuman untuk Afrika Selatan. Disebutkan bahwa hukuman tersebut dikarenakan Afrika Selatan menolak pengiriman vaksin Pfizer.

Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, informasi bahwa Pfizer dan WHO bekerjasama memunculkan varian Omicron sebagai hukuman untuk Afrika Selatan tersebut tidak benar. Tidak ada bukti kuat terkait hal tersebut. Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Afrika, John Nkengasong mengatakan bahwa mengidentifikasi sebuah virus atau sebuah varian baru di suatu lokasi bukan berarti virus itu berasal dari sana. Michael Head, peneliti senior kesehatan global di Universitas Southampton kepada CNN dalam wawancara via telepon mengatakan kemunculan varian Omicron bisa jadi konsekuensi dari wabah dimana pemantauan genomik tidak banyak bisa dilakukan dan tingkat vaksinasi yang rendah.

November 24, 2021:
South Africa tells Pfizer they don't want more shipments of the vaccine.

November 26, 2021:
WHO says that the Omicron variant was discovered in South Africa on November 24, 2021.

November 24 onwards:
Many countries rush to ban flights and immigration from South Africa.

Did Pfizer collaborate with the WHO to punish South Africa for refusing more shipments of the vaccine?

3

[DISINFORMASI] Video Erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2021

Beredar sebuah unggahan berupa video yang memperlihatkan erupsi gunung disertai narasi "Cuplikan lain dari Letusan Semeru di pulau Jawa di Indonesia". Salah satu akun Twitter yang mengunggah video tersebut mengklaim bahwa video yang diunggahnya merupakan potret erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021.

Faktanya, video yang diklaim sebagai erupsi Gunung Semeru tersebut adalah keliru. Dilansir dari cek fakta liputan6.com, video yang diunggah akun Twitter tersebut adalah potret erupsi Gunung Berapi Calbuco di Chili Selatan pada April 2015, bukan erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021.

4 [HOAKS] Grup Telegram Mengatasnamakan Ternak Uang

Beredar sebuah grup Telegram mengatasnamakan Ternak Uang, platform edukasi investasi dan pengelolaan keuangan. Pada deskripsi grup Telegram tersebut tertulis "PT. Ternak Uang (investasi) adalah platform investasi keuangan digital 100% terpercaya, yang berinvestasi di pasar saham Indonesia. sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)".

Faktanya, grup Telegram mengatasnamakan Ternak Uang atau PT Ternak Uang Nusantara tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resminya, Ternak Uang mengatakan bahwa segala bentuk transaksi hanya melalui situs resmi Ternak Uang di www.ternakuang.id. Ternak Uang memang memiliki grup Telegram, yakni grup yang dapat diakses oleh semua orang pada tautan t.me/ternakuangofficial dan grup yang hanya diperuntukkan bagi member Ternak Uang. Segala bentuk narasi yang menawarkan jasa pengelolaan aset atau bentuk investasi yang mengatasnamakan Ternak Uang adalah penipuan.

5

[HOAKS] Vaksin Sebabkan Sperma Membeku dan Alat Kelamin Pria Mengecil

Beredar postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa vaksin membuat sperma membeku dan alat kelamin pria mengecil.

Dilansir dari liputan6.com, klaim bahwa vaksin membuat sperma membeku dan alat kelamin pria mengecil adalah tidak benar. Faktanya, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog, Dirga Sakti Rambe mengatakan, tidak ada bukti ilmiah vaksin membuat sperma membeku dan alat kelamin pria mengecil. Vaksin Covid-19 juga tidak mempengaruhi kesuburan baik pria atau wanita.

7

[HOAKS] Luing Memiliki Bisa yang Mematikan

Beredar di media sosial Facebook sebuah postingan yang menunjukkan foto seorang anak dan foto binatang yang setelah ditelusuri merupakan foto luing. Foto tersebut diklaim merupakan foto seorang anak yang meninggal karena mendapatkan gigitan dari luing yang memiliki bisa yang mematikan.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut keliru. Dilansir dari kompas.com, luing tidak menggigit atau menyengat, namun luing tetap memiliki pertahanan kimia meski dalam jumlah yang sedikit. Umumnya, cairan kimia yang dikeluarkan luing jika mengenai kulit manusia dapat ditangani dengan mencuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun. Selain itu, tidak ditemukan informasi mengenai foto seorang anak yang meninggal akibat luing seperti yang dijelaskan dalam postingan tersebut.

6

[HOAKS] Situs Schneider Electric Menawarkan Pembiayaan

Beredar sebuah situs pembiayaan dari Schneider Electric dengan alamat s.pembiayaan.net. Situs tersebut menawarkan pembiayaan bagi pengguna. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi beberapa data pribadi.

Berdasarkan hasil penelusuran, situs tersebut bukan merupakan situs resmi milik Schneider Electric. Melansir dari merdeka.com, *Head of Marketing Communication* PT Schneider Indonesia, Desy Pamela menegaskan bahwa situs tersebut bukan milik PT Schneider Indonesia maupun Perusahaan Schneider Electric Global. Desy juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan pembiayaan maupun produk finansial lainnya. Melalui akun Facebook resminya yang telah terverifikasi, Schneider Electric juga menyatakan bahwa segala informasi terkait produk dari Schneider Electric hanya dapat diakses melalui situs resmi se.com/id serta aplikasi "mySchneider" yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store.

[DISINFORMASI]**8 Video Kumpulan Atlet Jatuh Pingsan Dikaitkan dengan Efek Vaksin Covid-19**

Beredar sebuah video kompilasi beberapa kejadian atlet yang jatuh pingsan saat bertanding. Kumpulan kejadian tersebut diklaim sebagai masalah jantung atau miokarditis sebagai efek dari vaksin Covid-19 terhadap para olahragawan.

Dilansir dari reuters.com, klaim tersebut adalah keliru. Tidak ada bukti bahwa vaksin Covid-19 terkait dengan seluruh insiden dalam video tersebut. Beberapa kejadian yang dikutip dalam video merupakan kejadian lampau, beberapa lainnya adalah atlet yang belum menerima vaksin Covid-19, dan sisanya mengalami kondisi medis lain seperti tekanan darah rendah, kelelahan panas, masalah riwayat penyakit jantung, atau miokarditis yang disebabkan oleh infeksi Covid-19. Lebih lanjut, Kepala eksekutif the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), Dr. June Raine mengatakan MHRA memantau dengan cermat keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19, termasuk laporan dugaan peradangan jantung, miokarditis, atau perikarditis. Miokarditis menjadi potensi risiko yang sangat langka dari vaksin Covid-19. Adapun kejadian yang dilaporkan biasanya ringan dengan individu yang biasanya pulih dalam waktu singkat dengan pengobatan standar dan istirahat.

9**[DISINFORMASI] Virus Corona Varian Omicron Disebabkan oleh Komplikasi dari Vaksin Covid-19**

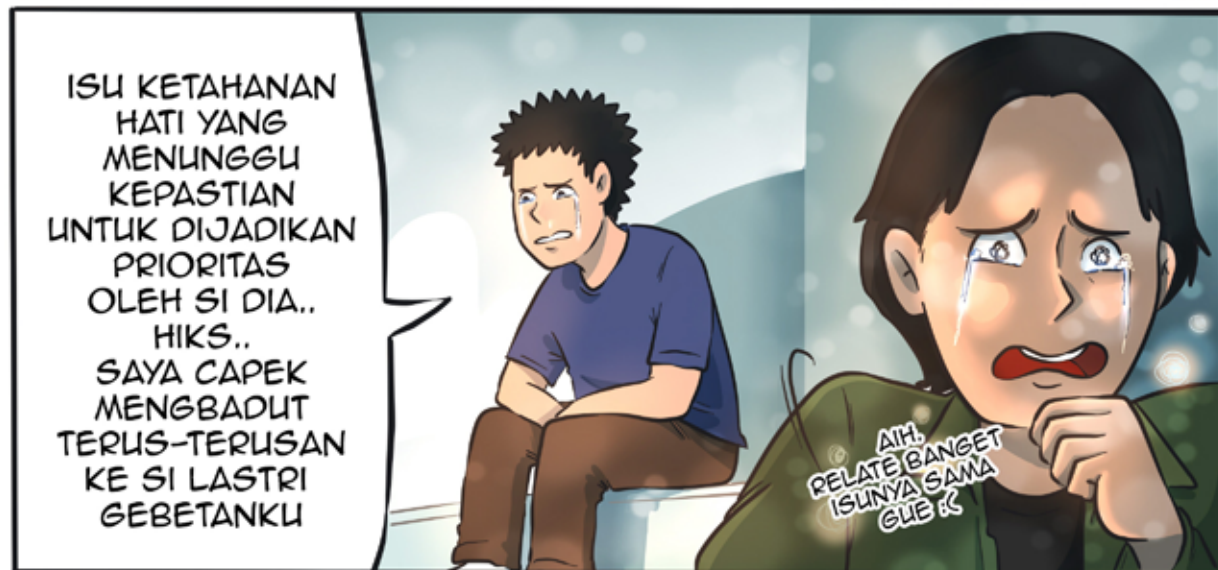
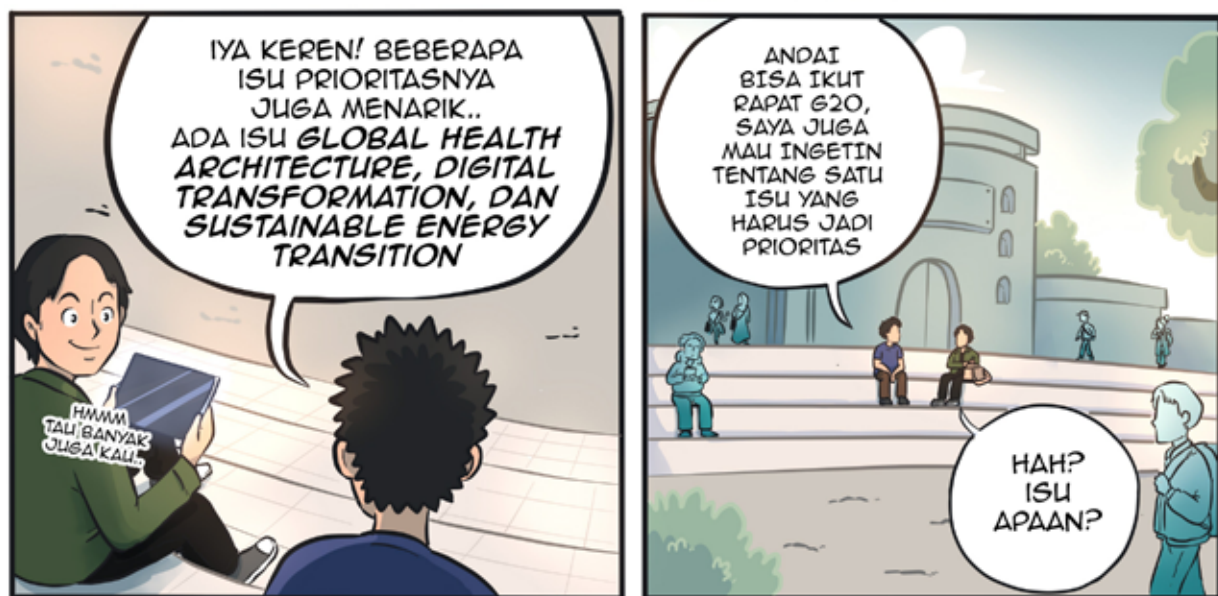
Sebuah postingan di media sosial membagikan daftar dugaan gejala virus Corona varian Omicron dan menyiratkan bahwa gejala tersebut sebenarnya adalah komplikasi dari vaksin Covid-19.

Dilansir dari reuters.com, klaim varian Omicron sebagai gejala komplikasi dari vaksin Covid-19 tidak memiliki dasar. Tidak ada bukti bahwa daftar gejala yang tercantum dalam postingan tersebut merupakan gejala komplikasi dari vaksin Covid-19. Begitu juga tidak ada bukti bahwa varian Omicron menyebabkan seseorang menunjukkan gejala-gejala tersebut. David O'Connor, Profesor Laboratorium Patologi dan Obat-obatan di University of Wisconsin-Madison, mengatakan bahwa sejauh ini belum cukup waktu atau kasus untuk dapat mengetahui apakah varian Omicron menunjukkan gejala yang berbeda dari varian lainnya. Lebih lanjut, WHO juga mengatakan belum jelas apakah varian Omicron lebih menular atau menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan varian lainnya.

10 [DISINFORMASI] Poster Film The Omicron Variant yang Ditayangkan Tahun 1963

Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah poster film berjudul The Omicron Variant yang diklaim telah ditayangkan pada tahun 1963. Poster film itu memperlihatkan potongan tangan dengan seekor serangga serta sepasang pria dan wanita dengan posisi wajah menengadahkan ke atas. Poster tersebut dibagikan seiring munculnya Covid-19 varian Omicron.

Berdasarkan penelusuran tempo.co, poster yang diklaim sebagai poster film The Omicron Variant yang telah ditayangkan pada 1963 adalah keliru. Poster tersebut merupakan hasil suntingan dari poster film *Sucesos En La IV Fase*. Judul film yang asli dihilangkan dan diganti dengan judul The Omicron Variant. Film berjudul Omicron sendiri memang pernah beredar pada tahun 1963, namun film tersebut bukan berkisah mengenai virus, melainkan seorang alien yang mengambil alih jasad seorang pekerja pabrik.



Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo

Ruang Buku Kominfo adalah Akses Koleksi Digital Perpustakaan Kementerian Kominfo

1



Kirimkan nama, NIP, e-mail, & satuan kerja ke:

perpustakaan@mail.kominfo.go.id

Subjek Email :
Pendaftaran Ruang
Buku Kominfo

2



Akan ada e-mail balasan dari perpustakaan kominfo berupa username/email dan password

3



Unduh "Ruang Buku Kominfo" di playstore/ appstore



4 Masukan username/email dan password



5 Klik buku yang ingin anda pinjam lalu klik pinjam



6 Selamat menikmati layanan EPerpustakaan

Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :
Agung (0813-8336-4421)





**INDONESIA
TERKONEKSI**

KOMINFO

Makin Digital, Makin Maju

Selamat Natal

25 Desember 2021



Tahun Baru

1 Januari 2022

"Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan"

(bdk. 1 Petrus 1:22)



Johnny G. Plate

Menteri Kominfo RI